



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

#2024
KKP BEYOND

LAPORAN KINERJA LPSPL SORONG



Pengarah :
Rosmini, S.Pi.

Penyusun :
Hendrik Sombo, S.Pi. M.Si
Ahmad Sabilul Muttaqin, S.T

TRIWULAN II TAHUN
2024

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong. Laporan Kinerja (LKj) LPSPL Sorong Triwulan II Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kontrak kinerja yang telah disepakati. Pada LKj Triwulan II Tahun 2024 ini kami sampaikan capaian indikator kinerja pada Triwulan II Tahun 2024, perbandingan capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan II Tahun 2024, perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan target jangka menengah, analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya, analisis keberhasilan, kegagalan dan solusi, kegiatan pendukung, rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan III tahun 2024, dan realisasi anggaran yang terserap pada Triwulan II Tahun 2024. Laporan ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan program/kegiatan LPSPL Sorong selama Bulan April sampai dengan Juni 2024.



Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk secara bersama-sama berupaya mencapai target kinerja sesuai yang telah disepakati di Triwulan II Tahun 2024 ini. Semoga LKj ini dapat menjadi salah satu masukan bagi organisasi yang lebih luas sebagai upaya perbaikan demi kemajuan pengelolaan ruang laut. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaporan ini, karenanya kami mohon maaf dan masukan serta kritik maupun evaluasi yang membangun akan kami terima dengan senang hati sebagai perbaikan di masa mendatang.

Sorong, 15 Juli 2024

Kepala LPSPL Sorong



Rosmini, S.Pi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di Kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Laporan kinerja disusun secara periodik baik triwulanan (LKj Interim) dan tahunan (LKj Tahunan). Penyusunan laporan kinerja meliputi pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai terhadap hasil capaian target kinerja. Pelaporan kinerja dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Hasil capaian kinerja yang dituangkan pada LKj Triwulan II Tahun 2024 ini telah mendukung pelaksanaan rencana strategis DJPKRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan kinerja (LKj) LPSPS Sorong Triwulan II Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan LPSPS Sorong dalam jangka waktu 1 (satu) triwulan dari Bulan April sampai Bulan Juni 2024. Pada pelaporan LKj Triwulan II Tahun 2024 data capaian dan target LPSPS Sorong telah disampaikan secara lengkap dan disertai dokumen data dukung yang tersimpan dalam folder bit.ly/SAKIPDJPKRL serta sesuai dengan format Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen KP No. 35/PERMEN-KP/2023 Tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP. Pada triwulan II tahun 2024 LPSPS Sorong memiliki target 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 5 Indikator Kinerja Mandatory (IKM). Pada triwulan II tahun 2024 terdapat 4 indikator kinerja yang capaiannya melebihi target kinerja yang ditetapkan dan 3 indikator kinerja yang capaiannya sama dengan target yang ditetapkan. Capaian indikator kinerja diantaranya IKU 6 bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LPSPS Sorong (Kelompok) tercapai 1 kelompok dari target 1 kelompok, IKU 8 jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di Wilayah Kerja LPSPS Sorong (Jenis) tercapai 2 jenis dari target 2 jenis, IKU 8 jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di Wilayah Kerja LPSPS Sorong



(Jenis) tercapai 2 jenis dari target 2 jenis, IKM 12 nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup LPSP Sorong (Nilai) tercapai 97,97 dari target 83, IKM 15 indeks profesionalitas ASN lingkup LPSP Sorong (Indeks) tercapai 89,82 dari target 83, IKM 17 laporan SPIP yang disusun lingkup LPSP Sorong tercapai 1 dokumen dari target 1 dokumen, IKM 18 persentase unit kerja lingkup LPSP Sorong yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar tercapai 133,33% dari target 94%, IKM 19 persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup LPSP Sorong yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan tercapai 100% dari target 80%.

Dalam rangka mendukung kinerja LPSP Sorong pada tahun anggaran 2024, anggaran yang diberikan Rp. 13.333.073.000 yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp. 11.993.073.000 dan bersumber dari PNPB sebesar Rp. 1.340.000.000, sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kinerja tanggal 25 Januari 2024. Hal ini juga sesuai dengan DIPA Petikan pagu definitif (pagu awal) tahun 2024 dengan Nomor: SP DIPA-032.07.2.477440/2024 tanggal 24 November 2023. Anggaran tersebut mendukung 3 (tiga) program yaitu program kualitas lingkungan hidup sebesar Rp. 3.500.000.000, program pengelolaan perikanan dan kelautan sebesar Rp. 1.150.000.000, dan program dukungan manajemen sebesar Rp. 8.683.073.000. Jika dijabarkan 3 program tersebut menjadi 5 kegiatan yaitu kegiatan perencanaan ruang laut sebesar Rp. 1.100.000.000, kegiatan perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut sebesar Rp. 2.700.000.000, kegiatan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau - pulau kecil sebesar Rp. 800.000.000, kegiatan penataan dan pemanfaatan jasa kelautan sebesar Rp. 50.000.000, dan kegiatan dukungan manajemen internal lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp. 8.683.073.000. Namun anggaran tersebut tidak bisa dicairkan secara keseluruhan, hal ini dijabarkan pada halaman IV A DIPA Petikan terkait blokir. Jumlah anggaran yang tidak dapat dicairkan yaitu Rp. 31.186.000 yang terdiri dari belanja barang (52) sebesar Rp. 31.186.000. Realisasi anggaran pada triwulan II tahun 2024 yang berdasarkan aplikasi OMSPAN yaitu Rp. 6.302.818.855 atau 47,27% dari anggaran Rp. 13.333.073.000.

Pengukuran Kinerja capaian kinerja LPSP Sorong dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian dengan realisasi indikator kinerja utama atau indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan yang tercantum di Perjanjian Kinerja (PK). Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Triwulan II Tahun 2024 adalah **104,73** (kategori Hijau=Baik) (*kinerjaku.kkp.go.id*).



Guna meningkatkan capaian kinerja LPSPL Sorong pada triwulan berikutnya perlu dilakukan beberapa perbaikan diantaranya perlu dilakukan revisi halaman III DIPA periode triwulan III tahun 2024 dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan halaman III yang ditetapkan serta kegiatan yang bersumber pada anggaran yang terblokir sebelumnya agar segera dilakukan pada triwulan III sebagai percepatan pelaksanaan kegiatan.



DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Isu Strategis (<i>Strategic Issues</i>)	1
1.4 Tugas dan Fungsi	6
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Rencana Strategis 2020-2024	10
2.2 Indikator dan Target Kinerja LPSPL Sorong Tahun 2023	14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Nilai PNBP LPSPL Sorong	20
3.2 Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja LPSPL Sorong	24
3.3 Sasaran Kegiatan 3 Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	30
3.4 Sasaran Kegiatan 4 Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	38
3.5 Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	42
3.6 Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam mendukung Konservasi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	47
3.7 Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	59
3.8 Sasaran Kegiatan 8 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	69



3.9	Sasaran Kegiatan 9 Terasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	75
3.10	Sasaran Kegiatan 10 Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran	80
3.11	Sasaran Kegiatan 11 Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup LPSPL Sorong	89
3.12	Akuntabilitas Anggaran	136
3.13	Tindaklanjut Atas Rekomendasi Triwulan I Tahun 2024	137
3.14	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya	138
BAB IV.	PENUTUP	142
4.1	Kesimpulan	142
4.2	Rekomendasi	143
	LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.1	Lokasi satuan kerja dan wilayah kerja LPSPSPL Sorong	8
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai LPSPSPL Sorong	9
Tabel 2.1	Indikator dan Target Kinerja LPSPSPL Sorong Tahun 2024	14
Tabel 3.1	IKU, IKM, Target dan Realisasi Kinerja LPSPSPL Sorong Triwulan II Tahun 2024	17
Tabel 3.2	Capaian IKU 1 Nilai PNBSP LPSPSPL Sorong (Rp.000)	21
Tabel 3.3	Realisasi Anggaran IKU 1 Nilai PNBSP LPSPSPL Sorong (Rp.000)	23
Tabel 3.4	Capaian IKU 2 Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja LPSPSPL Sorong (Orang)	24
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran IKU 2 Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja LPSPSPL Sorong (Orang)	30
Tabel 3.6	Capaian IKU 3 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPSPL Sorong (Dokumen)	31
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran IKU 3 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPSPL Sorong (Dokumen)	37
Tabel 3.8	Capaian IKU 4 Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LPSPSPL Sorong (Daerah)	38
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran IKU 4 Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LPSPSPL Sorong (Daerah)	41
Tabel 3.10	Capaian IKU 5 Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja LPSPSPL Sorong (Kesepakatan)	42
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran IKU 5 Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja LPSPSPL Sorong (Kesepakatan)	47
Tabel 3.12	Capaian IKU 6 Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LPSPSPL Sorong (Kelompok)	48
Tabel 3.13	Sarana Prasarana Kelompok Katora Jaya	52
Tabel 3.14	Daftar Barang yang Diserah Terimakan ke Pokmaswas Katora Jaya	54
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran IKU 6 Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LPSPSPL Sorong (Kelompok)	56



Tabel 3.16	Capaian IKU 7 Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja LPSPL Sorong yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)	57
Tabel 3.17	Realisasi Anggaran IKU 7 Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja LPSPL Sorong yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)	59
Tabel 3.18	Capaian IKU 8 Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)	60
Tabel 3.19	Realisasi Anggaran IKU 8 Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)	69
Tabel 3.20	Capaian IKU 9 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)	70
Tabel 3.21	Realisasi Anggaran IKU 9 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)	75
Tabel 3.22	Capaian IKU 10 Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang diidentifikasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)	76
Tabel 3.23	Realisasi Anggaran IKU 10 Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang diidentifikasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)	79
Tabel 3.24	Capaian IKU 11 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kawasan)	80
Tabel 3.25	Realisasi Anggaran IKU 11 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kawasan)	89
Tabel 3.26	Capaian IKM 12 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	90
Tabel 3.27	Realisasi Anggaran IKM 12 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	93
Tabel 3.28	Capaian IKM 13 Nilai Kinerja Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	95
Tabel 3.29	Realisasi Anggaran IKM 13 Nilai Kinerja Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	98
Tabel 3.30	Capaian IKM 14 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK LPSPL Sorong (Nilai)	98
Tabel 3.31	Realisasi Anggaran IKM 14 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju	



	WBK di LPSPL Sorong (Nilai)	101
Tabel 3.32	Kualifikasi tingkat Pendidikan	102
Tabel 3.33	Indikator riwayat pengembangan kompetensi	103
Tabel 3.34	Indikator penilaian prestasi	104
Tabel 3.35	Indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin	104
Tabel 3.36	Kategori penilaian IP ASN	106
Tabel 3.37	Capaian IKM 15 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)	106
Tabel 3.38	Realisasi Anggaran IKM 15 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)	110
Tabel 3.39	Kategori Nilai PM SAKIP Tahun 2024.	110
Tabel 3.40	Capaian IKM 16 Nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	112
Tabel 3.41	Realisasi Anggaran IKM 16 Nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	114
Tabel 3.42	Capaian IKM 17 Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)	115
Tabel 3.43	Realisasi Anggaran IKM 17 Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)	117
Tabel 3.44	Capaian IKM 18 Persentase Unit Kerja lingkup LPSPL Sorong yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	119
Tabel 3.45	Keaktifan Pejabat LPSPL Sorong Posting pada laman aplikasi <i>collaboration office</i> .	121
Tabel 3.46	Realisasi Anggaran IKM 18 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup LPSPL Sorong yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	121
Tabel 3.47	Capaian IKM 19 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup LPSPL Sorong yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	122
Tabel 3.48	Realisasi Anggaran IKM 19 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup LPSPL Sorong yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	125
Tabel 3.49	Capaian IKM 20 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup LPSPL Sorong (%)	125
Tabel 3.50	Realisasi Anggaran IKM 20 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LPSPL Sorong (%)	127
Tabel 3.51	Capaian IKM 21 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LPSPL Sorong (%)	128
Tabel 3.52	Realisasi Anggaran IKM 21 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LPSPL Sorong (%)	131
Tabel 3.53	Kategori Hasil Pengawasan Kearsipan	132



Tabel 3.54	Capaian IKM 22 Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup LPSPL Sorong (Nilai)		133
Tabel 3.55	Realisasi Anggaran IKM 22 Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup LPSPL Sorong (Nilai)		135
Tabel 3.56	Revisi Halaman III DIPA Triwulan II Tahun 2024		137
Tabel 3.57	Deviasi Halaman III DIPA Triwulan II Tahun 2024		137
Tabel 3.58	Membandingkan capaian kinerja LPSPL Sorong dengan Unit Pelaksana Teknis lain pada triwulan II tahun 2024.		138



DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Struktur Organisasi LPSPL Sorong	7
Gambar 1.2 Wilayah Kerja LPSPL Sorong	8
Gambar 3.1 NKO LPSPL Sorong Triwulan II Tahun 2024	17
Gambar 3.2 Grafik Perolehan PNPB Triwulan II Tahun 2024.	23
Gambar 3.3 Identifikasi dan Verifikasi Kelompok Peserta Bulan Cinta Laut di Maluku Utara.	27
Gambar 3.4 Identifikasi dan Verifikasi Kelompok Peserta Bulan Cinta Laut di Maluku.	28
Gambar 3.5 Identifikasi dan Verifikasi Kelompok Peserta Bulan Cinta Laut di Papua Barat Daya.	28
Gambar 3.6 Identifikasi dan Verifikasi Kelompok Peserta Bulan Cinta Laut di Papua Selatan.	29
Gambar 3.7 Pelaksanaan Sosialisasi KKPRL Triwulan II Tahun 2024.	33
Gambar 3.8 Komposisi Subjek Hukum Sosialisasi KKPRL	33
Gambar 3.9 Verifikasi Lapang dan Verifikasi Teknis	34
Gambar 3.10 Komposisi Wilayah Verifikasi Teknis di LPSPL Sorong	35
Gambar 3.11 Pelaksanaan Monitoring KKPRL Triwulan II Tahun 2024.	36
Gambar 3.12 Pelaksanaan Pengendalian KKPRL Triwulan II Tahun 2024	36
Gambar 3.13 Kegiatan Pendukung IKU 4	40
Gmabr 3.14 Pembahasan Draft Kerjasama LPSPL Sorong dengan Universitas Pattimura	45
Gambar 3.15 Pembahasan Draft Kerjasama LPSPL Sorong dengan Universitas Kristen Papua	46
Gambar 3.16 Verifikasi Calon Penerima Bantuan KOMPAK Tahun 2024.	51
Gambar 3.17 Wilayah Pengawasan Pokmaswas Katora Jaya	51
Gambar 3.18 Struktur Organisasi Pokmaswas Katora Jaya	52
Gambar 3.19 Serah Terima Bantuan Kepada Pokmaswas Katora Jaya	53
Gambar 3.20 Target Jenis LPSPL Sorong Tahun 2024.	62
Gambar 3.21 Pendataan Pari Manta di Kabupaten Raja Ampat	63
Gambar 3.22 Rehabilitasi Terumbu Karang di Zona Egek MHA Malaumkarta	64
Gambar 3.23 Pendataan Kima di Pulau Tidore	65



Gambar 3.24	Pendataan Penyu di Malaumkarta	66
Gambar 3.25	Penanganan Mamalia Laut Terdampar di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	67
Gambar 3.26	Sosialisasi Jenis Ikan Dilindungi	67
Gambar 3.27	Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja 8	68
Gambar 3.28	Target Pemanfaatan Jenis LPSPL Sorong Tahun 2024	72
Gambar 3.29	Pembekalan Enumerator Pendataan Jenis Ikan di Dobo.	73
Gambar 3.30	Pembekalan Enumerator Pendataan Jenis Ikan di Merauke	74
Gambar 3.31	Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja 9	74
Gambar 3.32	Sosialisasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi	78
Gambar 3.33	Identifikasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi	79
Gambar 3.34	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan Penimbangan Sampah Bulan Cinta Laut di Maluku Utara	83
Gambar 3.35	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan Penimbangan Sampah Bulan Cinta Laut di Maluku	84
Gambar 3.36	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan Penimbangan Sampah Bulan Cinta Laut di Papua Barat Daya	86
Gambar 3.37	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan Penimbangan Sampah Bulan Cinta Laut di Papua Selatan	87
Gambar 3.38	Aksi Bersih Pantai di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	88
Gambar 3.39	Nilai IKPA Triwulan II Tahun 2024	90
Gambar 3.40	Deviasi Halaman III DIPA LPSPL Sorong	92
Gambar 3.41	Nilai Kinerja Anggaran Triwulan II Tahun 2024	96
Gambar 3.42	Nilai WBK LPSPL Sorong	99
Gambar 3.43	Indeks Profesionalitas ASN Triwulan II Tahun 2024	107
Gambar 3.44	Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Pegawai LPSPL Sorong	109
Gambar 3.45	Dokumentasi Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja 16	113
Gambar 3.46	Kegiatan Pendukung Penyelenggaraan SPIP Triwulan II Tahun 2024	117
Gambar 3.47	Screenshot aplikasi SIDAK per 1 Juli 2024	123
Gambar 3.48	Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Kearsipan	135
Gambar 3.49	Indeks Profesionalitas ASN LPSPL Sorong Triwulan II	138



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi: (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan Data kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; dan (6) Reviu dan evaluasi kinerja.

Dalam hal ini, Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong juga menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 35/PERMEN-KP/2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan Kinerja ini merupakan salah satu upaya dalam implementasi SAKIP dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 ini adalah untuk menyampaikan capaian kinerja program/kegiatan yang dilaksanakan LPSPL Sorong pada Triwulan II Tahun 2024.

1.3 Isu Strategis (*Strategic Issues*)

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keunggulan secara geopolitik dan geografis. Hal ini dikarenakan posisi Indonesia yang sangat strategis yang terletak diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu, Indonesia sangat kaya akan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan karena dari 7,7 juta km² luas wilayahnya, 5,8 juta km² merupakan perairan laut (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km², luas perairan kepulauan 2,95 juta km², dan luas ZEE Indonesia 2,55 juta km²), dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia ($\pm$ 108.000 km). Indonesia juga



sangat kaya akan sumberdaya wilayah pesisir karena memiliki 17.504 pulau dengan 16.671 pulau diantaranya telah terdaftar di PBB. Keberadaannya yang strategis menjadikan Indonesia sebagai salah satu perlintasan alur pelayaran internasional dan perdagangan lintas samudera dan benua. Lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ini diatur melalui Konvensi Hukum Laut 1982 yakni ALKI I (Laut Cina Selatan-Selat Karimata - Laut DKI - Selat Sunda), ALKI II (Laut Sulawesi - Selat Makassar - Lautan Flores - Selat Lombok), dan ALKI III (Samudera Pasifik - Selat Maluku, Laut Seram - Laut Banda). Keberadaan 3 (tiga) alur tersebut telah membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan Asia Pasifik dan ASEAN hingga lebih maju dan produktif bagi Indonesia. Kekayaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan hayati Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 bahwa potensi sumberdaya ikan di 11 WPPNRI mencapai 12,01 juta ton per tahun dengan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan 8,6 juta ton per tahun. Ditunjang dengan ekosistem terumbu karang seluas 25.000 km² yang tersebar di 985 titik (namun, terumbu karang yang masih dalam kondisi sangat baik hanya sekitar 5,48% dan kondisi baik 25,48%). Sumberdaya perikanan di Indonesia juga sangat bervariasi, karena sekitar 37 % dari spesies ikan di dunia berada di Indonesia, yang terdiri dari sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota terumbu karang. Beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, diantaranya tuna, cakalang, tongkol, udang, cumi-cumi, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kerang, dan rumput laut. Indonesia mempunyai potensi sumberdaya kelautan dan perikanan non-hayati yang besar. Setidaknya 10 sektor jasa-jasa kelautan dapat membangkitkan ekonomi maritim Indonesia, yakni Energi, Perhubungan Laut, Bioteknologi Kelautan, Industri Kelautan, Bangunan Laut, Pariwisata Bahari, Energi dan SDM, Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil, dan Hutan Bakau. Diperkirakan potensi nilai ekonomi 10 sektor kelautan (termasuk perikanan) ini dapat mencapai lebih dari USD 1,2 triliun per tahunnya. Dengan potensi hayati dan non hayati yang sedemikian kaya merupakan tantangan yang teramat besar bagi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk mampu memanfaatkannya secara optimal demi kesejahteraan masyarakat, namun tetap menjaga kelestariannya secara berkelanjutan.

LPSPL Sorong berkedudukan di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya dengan wilayah kerja yang meliputi Provinsi Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Dalam melaksanakan tugasnya



dalam upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan. LPSPL Sorong sejak tahun 2011 telah memiliki 2 (dua) satker definitif yang berkedudukan di Kota Ambon dan Kabupaten Merauke (Permen-KP No. 65/PERMEN-KP/2020 jo Permen-KP No. PER-23/MEN/2011 tentang Perubahan Kedua atas Permen-KP No. PER-22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut).

Luas wilayah laut di wilayah kerja LPSPL Sorong diperkirakan mencapai $\pm 2.014.400,68$ km² (estimasi), panjang garis pantai $\pm 36.500,49$ km (BIG, 2021), terdapat ± 7.235 pulau (43,14%) dari jumlah pulau yang ada di Indonesia (Dit. P4K-DJPRL, 2021), dengan 32 pulau diantaranya merupakan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar (28,8% dari 111 PPKT di Indonesia), serta berbagai potensi sumberdaya kelautan dan perairan lautnya yang belum dikelola dengan maksimal.

Pulau-Pulau Kecil Terluar memiliki arti yang strategis yaitu sebagai 1) titik dasar dari garis pangkal lurus kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah perairan Indonesia; 2) zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan landas kontinen Indonesia; 3) sebagai beranda depan Negara Republik Indonesia; dan 4) sebagai kawasan lalu lintas pelayaran internasional. Lebih dari itu, karena geo-strategis dan geo-politis Indonesia di tengah persilangan Benua Asia dan Benua Australia serta menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, maka posisi tersebut rawan dalam permasalahan penegakan kedaulatan, khususnya di wilayah laut (Dahuri 2000). Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian di PPKT antara lain adalah : 1. Penutupan akses masyarakat dan nelayan lokal oleh investor di pulau-pulau kecil, seperti Gili Gede, di Lombok Barat, Pulau Nikoi di Tanjung Pinang, dan beberapa pulau di Wakatobi; 2. Konflik pemanfaatan tanah dan alih fungsi hutan di antara investor dan masyarakat, seperti di Pulau Romang di Pulau Maluku Barat Daya; 3. Aktivitas ilegal di pulau-pulau kecil, seperti penyelundupan orang dan barang, perbudakan, illegal fishing, illegal logging, narkoba, seperti di Pulau Benjina di Kabupaten Kepulauan Aru; 4. Pelanggaran peraturan pertanahan, pemberian hak atas tanah (SHM) secara perorangan yang mencapai 20 hektar per orang dalam satu hamparan, seperti Pulau Maratua di Berau; 5. Pemanfaatan pulau-pulau kecil belum memberikan PNPB secara optimal bagi negara;



LPSPL Sorong memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Tantangan tersebut mulai dari target rutin tahunan hingga tantangan yang diturunkan melalui Nawacita Presiden Republik Indonesia, yaitu:

1. Perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang partisipatif, serasi, dan implementatif melalui:
 - a. Fasilitasi Penyusunan materi teknis ruang dalam perumusan RTR Provinsi/RZ KAW dan RTR KSN/T dan Integrasi Dukungan penyusunan materi teknis ruang laut yang disusun oleh Direktorat Perencanaan Ruang Laut di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - b. Pendampingan Integrasi antara rencana tata ruang wilayah propinsi dengan RZWP3K, Integrasi antara rencana tata ruang KSN dengan rencana zonasi KSN/T di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - c. Pendampingan dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang didelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - d. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana tata ruang/ rencana zonasi di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - e. Dukungan pemberian KKPRL dan/atau insentif pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - f. Pengelolaan data KKPRL.
2. Pengelolaan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati Laut yang lestari dan berkelanjutan melalui:
 - a. Pendampingan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - b. Evaluasi Efektivitas Pengelolaan KKPD di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - c. Penyediaan data sebaran dan status populasi jenis ikan dilindungi/terancam punah di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - d. Pemulihan populasi/ Pengayaan jenis ikan di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - e. Inisiasi daerah perlindungan habitat penting jenis ikan di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - f. Rehabilitasi Habitat kritis jenis ikan dilindungi/terancam punah di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - g. Penanganan Biota Dilindungi di wilayah kerja LPSPL Sorong;



- h. Pelayanan perizinan/peredaran pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - i. Inisiasi jejaring dan Kerjasama konservasi Kawasan dan keanekaragaman Hayati Laut di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - j. Pemberian Bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di wilayah kerja LPSPL Sorong.
3. Pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari dan mandiri melalui:
 - a. Identifikasi dan Pendampingan Bantuan Sarana dan Prasarana di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - b. Dukungan Identifikasi dalam rangka fasilitasi KKPRL untuk masyarakat lokal dan tradisional di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - c. Dukungan dalam rangka Pemanfaatan PPK/T di wilayah kerja LPSPL Sorong.
4. Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui:
 - a. Identifikasi Kawasan Mangrove di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - b. Penanaman Mangrove di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - c. Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan ekosistem Pesisir di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - d. Identifikasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang akan ditanggulangi pencemarannya di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - e. Identifikasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah kerja LPSPL Sorong.
5. Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dalam rangka Optimalisasi Potensi Ekonomi Kelautan melalui:
 - a. Pemetaan potensi biota laut non komersil yang dapat dimanfaatkan di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - b. Pengelolaan Biofarmakologi/desa pangan laut di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - c. Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata Bahari di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - d. Identifikasi kesesuaian teknis Bangunan dan Instalasi Laut di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - e. Identifikasi dan verifikasi pelaksanaan reklamasi di wilayah kerja LPSPL Sorong.



6. Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PRL melalui:
 - a. Pengelolaan SDM Aparatur dan tata laksana di LPSPL Sorong;
 - b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja di LPSPL Sorong;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik di LPSPL Sorong;
 - d. Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Negara, Pengadaan Barang Jasa dan Umum di LPSPL Sorong;

1.4 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Permen KP Nomor 65/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL). Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut (UPT PRL) tersebut dipimpin oleh kepala. UPT PRL terdiri atas UPT KKPN dan UPT PSPL. Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri atas: Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) dan Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL). Klasifikasi UPT Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut tersebut didasarkan pada analisis beban kerja.

LPSPL Sorong sebagai salah satu UPT PRL mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sesuai dengan Permen KP Nomor 65/PERMEN-KP/2020 Pasal 12, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- b. pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- c. pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- d. pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;
- e. pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;



- f. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil;
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Struktur organisasi LPSPL Sorong sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, sebagaimana berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi LPSPL Sorong

Susunan organisasi Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri atas: Urusan Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT PRL sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan



Fungsional diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut dibentuk satuan kerja sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja. Satuan kerja tersebut merupakan unit organisasi nonstruktural di bidang pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang dipimpin oleh koordinator satuan kerja. Koordinator satuan kerja tersebut ditetapkan oleh Dirjen PRL. Berikut lokasi, satuan kerja, dan wilayah kerja LPSPL Sorong berdasarkan Permen KP Nomor 65/PERMEN-KP/2020:

Tabel 1.1 Lokasi satuan kerja dan wilayah kerja LPSPL Sorong.

UPT	Lokasi	Satuan Kerja	Wilayah Kerja
Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL)	Sorong, Provinsi Papua Barat Daya	Ambon	Provinsi Maluku
		-	Provinsi Maluku Utara
	Papua Barat Daya	Merauke	Provinsi Papua Selatan
		-	Provinsi Papua
		-	Provinsi Papua Pegunungan
		-	Provinsi Papua Tengah
		-	Provinsi Papua Barat
		-	Provinsi Papua Barat Daya

Wilayah Kerja LPSPL Sorong sesuai lampiran VI Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2020 seperti terlihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1.2 Wilayah Kerja LPSPL Sorong



Pada tahun 2024, jumlah SDM yang dimiliki LPSPL Sorong mencapai 54 orang yang terdiri dari 29 orang PNS, 2 orang PPPK, 21 orang tenaga kontrak jasa perorangan, dan 2 PPNP dengan komposisi pegawai sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai LPSPL Sorong

No.	Uraian	Tingkat Pendidikan					
		SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat	D3	D4/S1	S2
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	-	-	2	2	21	4
2.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK)	-	-	-	-	2	-
3.	Tenaga Kontrak Jasa Perorangan (JLP)	-	-	11	2	8	-
4.	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP)	-	-	-	1	1	-
Jumlah		-	-	13	5	32	4

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 adalah:

a. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam pengelolaan ruang laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

b. BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis, gambaran mengenai sasaran program Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun 2020-2024, rencana kerja dan anggaran LPSPL Sorong tahun 2024, dan penetapan kinerja LPSPL Sorong

c. BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

d. BAB IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020-2024

RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. RPJMN 2020-2024 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam menyusun Renstra 2020-2024, yang kemudian disusun lebih rinci ke dalam Renstra Unit Eselon I KKP, termasuk Ditjen PRL.

RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Presiden menetapkan 5 arahan utama sebagai strategi pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi. Kelima arahan utama ini dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu : (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil perikanan kelautan, dan petambak garam, dan para pelaku usaha bidang kelautan dan



perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya. Sebagai tindak lanjut visi dan arahan Presiden serta RPJMN Tahun 2020-2024, disusun Rencana Strategis KKP yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tanggal 26 Juni 2020.

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi Ditjen PRL 2020-2024 adalah “Pengelolaan Ruang Laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP”.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”.
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”.
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”.
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

Dalam rangka mendukung Misi KKP tersebut, Ditjen PRL mempunyai 3 (tiga) Misi yaitu:

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkungan Ditjen PRL.



Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Penjabaran dari Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2020-2024, yang didukung oleh Sasaran Program (SP) Ditjen PRL terdiri dari:

- SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat,
- SS-3 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan,
- SS-6 Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggungjawab,
- SS-7 Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing,
- SS-9 Tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kondisi yang diinginkan dan dicapai oleh Ditjen PKRL sebagai suatu hasil atau dampak dari beberapa program yang dilaksanakan dari pelaksanaan program pengelolaan ruang laut dan program dukungan manajemen. Sasaran Ditjen PRL Tahun 2020-2024 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Renstra Ditjen PRL Tahun 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

- a. Sasaran: "Kesejahteraan petambak garam meningkat", dengan Indikator Kinerja: Nilai Tukar Petambak Garam.
- b. Sasaran: "Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat", dengan Indikator Kinerja: Jumlah jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi; Jumlah pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan.
- c. Sasaran: " Meningkatkan lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan", dengan Indikator Kinerja: Lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan.
- d. Sasaran: "Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat", dengan Indikator Kinerja: Produksi Garam Nasional.
- e. Sasaran: "Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT", dengan Indikator Kinerja: Kawasan yang dibangun sarana prasarana wisata bahari dan BMKT.



- f. Sasaran: “Masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya”, dengan Indikator Kinerja: Komunitas masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya.
- g. Sasaran: “Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat”, dengan Indikator Kinerja: Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen PRL (skala 1-5).

2. Program Kualitas Lingkungan Hidup

- a. Sasaran: “Pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan” dengan Indikator Kinerja: Luas kawasan konservasi, Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan.
- b. Sasaran: “Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan” dengan Indikator Kinerja: Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan.
- c. Sasaran: “Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali” dengan Indikator Kinerja: Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih Kembali.
- d. Sasaran: “Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat” dengan Indikator Kinerja: Tingkat Kemandirian SKPT Kepulauan Mentawai SKPT.

3. Program Dukungan Manajemen

Sasaran: “Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL” dengan Indikator Kinerja: Nilai PMPRB DJPRL, Jumlah Unit Kerja DJPRL berpredikat WBK, Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup Ditjen PRL kurang dari 1 % setiap tahun, Indeks Profesionalitas ASN DJPRL, Nilai PM SAKIP DJPRL, Nilai Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dengan level 3, Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL, Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL, Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik DJPRL, Nilai



indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPRL, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPRL.

2.2 Indikator dan Target Kinerja LPSPL Sorong Tahun 2024

Pada tahun 2024 terdapat perubahan dan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja LPSPL Sorong dimana terdapat beberapa indikator yang tidak dipergunakan lagi pada tahun 2024 dan beberapa indikator baru yang dipergunakan pada tahun 2024. Indikator baru dan/atau yang dilakukan penyesuaian dan dipergunakan pada tahun 2024 adalah:

- Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja LPSPL Sorong (Orang).
- Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Kesepakatan).
- Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang diidentifikasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen).
- Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup LPSPL Sorong (Nilai).

Pada tahun 2024, Perjanjian Kinerja LPSPL Sorong dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2024 yang memuat 11 Indikator Kinerja Utama dan 11 Indikator Kinerja Mandatory dengan anggaran sebesar Rp. 13.333.073.000 yang mendukung kegiatan perencanaan ruang laut, kegiatan perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, kegiatan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil, kegiatan penataan dan pemanfaatan jasa kelautan, dan kegiatan dukungan manajemen internal lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut. Sumber anggaran LPSPL Sorong pada tahun 2024 berasal dari Rupiah Murni Rp 11.993.073.000 dan PNBP Rp. 1.340.000.000, akan tetapi pada halaman IV.A DIPA Nomor: DIPA-032.07.2.477440/2024 dijelaskan bahwa terdapat jumlah dana yang tidak dapat dicairkan sejumlah Rp. 31.186.000 yang merupakan belanja barang (52), sehingga mempengaruhi pelaksanaan beberapa kegiatan.

Tabel 2.1 Indikator dan Target Kinerja LPSPL Sorong Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Meningkatnya Nilai PNBP LPSPL Sorong	1.	Nilai PNBP LPSPL Sorong (Rp. 000)	1.100.000
2.	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja LPSPL Sorong	2.	Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja LPSPL Sorong (Orang)	320



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
3.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPS Sorong	3.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPS Sorong (Dokumen)	3
4.	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja LPSPS Sorong	4.	Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LPSPS Sorong (Daerah)	1
5.	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja LPSPS Sorong	5.	Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja LPSPS Sorong (Kesepakatan)	1
6.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam mendukung Konservasi di Wilayah Kerja LPSPS Sorong	6.	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LPSPS Sorong (Kelompok)	3
		7.	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja LPSPS Sorong yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)	1
7.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja LPSPS Sorong	8.	Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja LPSPS Sorong (Jenis)	4
8.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja LPSPS Sorong	9.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPS Sorong (Jenis)	3
9.	Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja LPSPS Sorong	10.	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang diidentifikasi di wilayah kerja LPSPS Sorong (Dokumen)	1
10.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran	11.	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja LPSPS Sorong (Kawasan)	4
11.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LPSPS Sorong	12.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPS Sorong (Nilai)	93,76
		13.	Nilai Kinerja Anggaran lingkup LPSPS Sorong (Nilai)	86
		14.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di LPSPS Sorong (Nilai)	75
		15.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPS Sorong (Indeks)	88
		16.	Nilai PM SAKIP lingkup LPSPS Sorong (Nilai)	81
		17.	Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPS Sorong (Dokumen)	4
		18.	Persentase Unit Kerja lingkup LPSPS Sorong yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
		19.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup LPSPS Sorong yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80

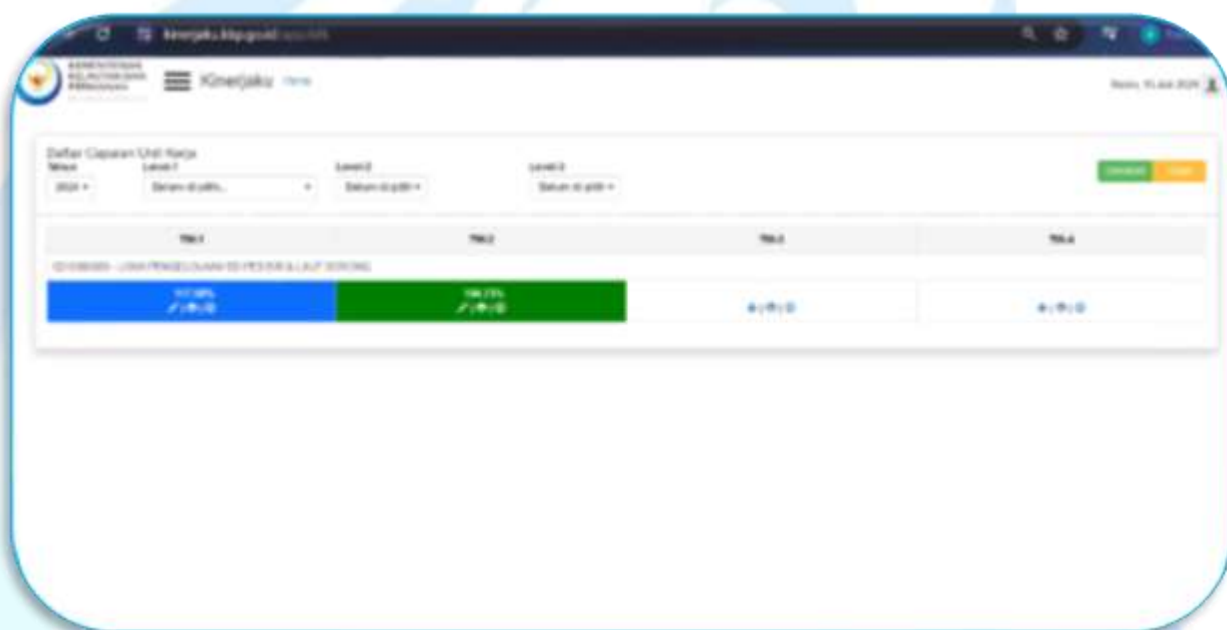


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		20.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup LPSPL Sorong (%)	100
		21.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LPSPL Sorong (%)	80
		22.	Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	65



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja LPSP Sorong dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi IKU/IKM. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja LPSP Sorong pada Triwulan II Tahun 2024 adalah **104,73** (kategori Hijau=Baik), seperti gambar 3.1 berikut:



Gambar 3.1 NKO LPSP Sorong Triwulan II Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Mandatory (IKM) serta target dan realisasinya pada triwulan II tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 IKU, IKM, Target dan Realisasi Kinerja LPSP Sorong Triwulan II Tahun 2024

Sasaran Kegiatan 1. Meningkatnya Nilai PNBSP LPSP Sorong						
IKU/IKM		FREKUENSI	TARGET	TRIWULAN II TAHUN 2024		
				TARGET	REALISASI	% KINERJAKU
IKU 1	Nilai PNBSP LPSP Sorong (Rp.000)	Tahunan	1.100.000	-	-	-
Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja LPSP Sorong						
IKU 2	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja LPSP Sorong (Orang)	Tahunan	320	-	-	-
Sasaran Kegiatan 3.						



Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong

IKU 3	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)	Tahunan	3	-	-	-
-------	--	---------	---	---	---	---

Sasaran Kegiatan 4.

Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja LPSPL Sorong

IKU 4	Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Daerah)	Tahunan	1	-	-	-
-------	--	---------	---	---	---	---

Sasaran Kegiatan 5.

Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja LPSPL Sorong

IKU 5	Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kesepakatan)	Tahunan	1	-	-	-
-------	--	---------	---	---	---	---

Sasaran Kegiatan 6.

Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam mendukung Konservasi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong

IKU 6	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kelompok)	Triwulanan	3	1	1	100%
IKU 7	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja LPSPL Sorong yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencarian Baru (Kelompok)	Tahunan	1	-	-	-

Sasaran Kegiatan 7.

Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong

IKU 8	Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)	Triwulanan	4	2	2	100%
-------	---	------------	---	---	---	------



Sasaran Kegiatan 8. Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong						
IKU 9	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)	Tahunan	3	-	-	-
Sasaran Kegiatan 9. Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong						
IKU 10	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang diidentifikasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)	Tahunan	1	-	-	-
Sasaran Kegiatan 10. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran						
IKU 11	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kawasan)	Tahunan	4	-	-	-
Sasaran Kegiatan 11. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LPSPL Sorong						
IKM 12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	Semesteran	93,76	83	97,97	118,04%
IKM 13	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	Tahunan	86	-	-	-
IKM 14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di LPSPL Sorong (Nilai)	Tahunan	75	-	-	-
IKM 15	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)	Semesteran	88	83	89,82	108,22%
IKM 16	Nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	Tahunan	81	-	-	-
IKM 17	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)	Triwulanan	4	2	2	100%
IKM 18	Persentase Unit Kerja Lingkup LPSPL Sorong yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	Triwulanan	94	94	133,33	120%
IKM 19	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup LPSPL Sorong yang Dokumen Tindak	Triwulanan	80	80	100	120%



	Lanjutnya Dilengkapi Disampaikan (%)	Telah dan					
IKM 20	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LPSPSPL Sorong (%)		Tahunan	100	-	-	-
IKM 21	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LPSPSPL Sorong (%)		Tahunan	80	-	-	-
IKM 22	Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup LPSPSPL Sorong (Nilai)		Tahunan	65	-	-	-

3.1 Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Nilai PNBPLSPSPL Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Meningkatnya Nilai PNBPLSPSPL Sorong, LPSPSPL Sorong menjabarkan sasaran kegiatan 1 ini kedalam 1 IKU yaitu IKU 1 Nilai PNBPLSPSPL Sorong (Rp.000).

3.1.1 IKU 1 Nilai PNBPLSPSPL Sorong (Rp.000)

Penerimaan Negara Bukan Pajak LPSPSPL Sorong adalah seluruh penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan berupa kegiatan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya. Kegiatan ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Teknik menghitung capaian IKU ini dengan formulasi sebagai berikut:

$$PNBP_{LPSPSPL\ Sorong} = PNBPLayanan + PNBPLBMN + PNBPLainnya$$

Dimana:

PNBPLayanan = Nilai PNBPL yang berasal dari Pendapatan Perizinan Lainnya dan Jasa Kelautan dan Perikanan

PNBPLBMN = Nilai PNBPL yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara

PNBPLainnya = Nilai PNBPL yang berasal dari Tuntutan Ganti Rugi dan Denda yang tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi



Tabel 3.2 Capaian IKU 1 Nilai PNBSP LPSPSPL Sorong (Rp.000)

SK.1		Meningkatnya Nilai PNBSP LPSPSPL Sorong									
IKU.1		Nilai PNBSP LPSPSPL Sorong (Rp.000)									
Realisasi 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra 2020-2024		
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi thd PK	Target s.d 2024	% Capaian thd Renstra 2024	
-	Rp. 1.647.742,751	-	-	-	-	-	Rp. 1.100.000,000				

Sumber Data: LPSPSPL Sorong, per 30 Juni 2024

1. *Capaian IKU Nilai PNBSP LPSPSPL Sorong (Rp.000) Triwulan II Tahun 2024*

Target IKU Nilai PNBSP LPSPSPL Sorong (Rp.000) pada tahun 2024 yaitu Rp. 1.100.000,000. Periode capaian dan periode pelaporan IKU ini adalah tahunan, berdasarkan realisasi penerimaan pada web <https://spanint.kemenkeu.go.id> bahwa pada periode triwulan I realisasi PNBSP LPSPSPL Sorong adalah Rp. 926.045.642 atau 84,19% dari target tahun 2024. Nilai PNBSP LPSPSPL Sorong diperoleh dari Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya (425629) + Pendapatan Perizinan Lainnya (425259) + Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131) + Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912).

2. *Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023*

Periode pencapaian dan pelaporan indikator kinerja ini pada tahun 2024 dan 2023 yaitu tahunan. Pada triwulan II pada tahun 2024 dan 2023 kegiatan ini masih dalam progress pencapaian sehingga belum dapat dibandingkan.

3. *Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah*

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang baru ada pada tahun 2022 dan belum tercantum dalam dokumen Renstra 2020-2024, sehingga tidak dapat dibandingkan.



4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi Sumberdaya Anggaran, Manusia, dan Waktu pada verifikasi online pada wilayah remote. Adanya SOP pelayanan jenis yang mengatur jumlah dan kategori produk yang akan di BAP di lokasi/gudang dengan jumlah produk yang di BAP di kantor LPSPL Sorong termasuk pelayanan verifikasi online menyebabkan penghematan dari segi waktu dan beban APBN yang ditimbulkan untuk melakukan verifikasi. Penggunaan aplikasi e-SAJI juga menyebabkan efisiensi waktu, karena waktu pelayanan menjadi semakin singkat.

5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala, dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

LPSPL Sorong melakukan sosialisasi pelayanan jenis ikan yang dilindungi di wilayah remote sehingga memperluas wilayah remote yang terlayani dan meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan jenis ikan dilindungi sehingga meningkatkan pendapatan PNBP LPSPL Sorong. Hal ini juga didukung SDM LPSPL Sorong yang dapat diandalkan dalam mengidentifikasi jenis ikan yang dimanfaatkan. Keberhasilan dalam mencapai target ini juga didukung oleh bendahara penerimaan negara tersertifikasi dengan nomor register: BNT-05785/185/655/2021.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Belum terdapat kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini.

c. Solusi

Belum terdapat kendala sehingga belum terdapat solusi.

6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKU 1

a. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Satuan Kerja LPSPL Sorong TA 2024

Pada periode triwulan II tahun 2024 LPSPL Sorong telah melakukan pemungutan PNBP dari kegiatan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya. Kegiatan ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jenis pendapatan yang dipungut berasal dari Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya (425629) + Pendapatan



Perizinan Lainnya (425259) + Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131) + Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912).



Gambar 3.2 Grafik Perolehan PNBP Triwulan II Tahun 2024.

7. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Pada triwulan II akan dilakukan beberapa kegiatan untuk mendukung tercapainya IKU ini, diantaranya pelayanan peredaran pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau appendik CITES sebagai rutinitas setiap bulan. Penarikan PNBP dari sewa tanah dan bangunan.

8. Realisasi Anggaran

Tidak ada pagu anggaran dalam mendukung capaian indikator kinerja Nilai PNBP LPSPSPL Sorong (Rp.000), yang dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran IKU 1 Nilai PNBP LPSPSPL Sorong (Rp.000)

No.	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
1	Nilai PNBP LPSPSPL Sorong (Rp.000)	-	-	-	-

Sumber Data: LPSPSPL Sorong, per 30 Juni 2024



3.2 Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja LPSPL Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam gerakan nasional bulan cinta laut di wilayah kerja LPSPL Sorong, LPSPL Sorong menjabarkan sasaran kegiatan 2 ini kedalam 1 IKU, yaitu tenaga kerja yang terlibat dalam gerakan nasional bulan cinta laut di wilayah kerja LPSPL Sorong (Orang).

3.2.1 IKU 2 Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja LPSPL Sorong

Tenaga kerja yang terlibat di Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa, yang menerima manfaat, dan/atau operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun nonfisik. Tenaga kerja berasal dari perhitungan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut oleh Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong.

Teknik menghitung capaian IKU ini dengan formulasi sebagai berikut:

$$TK_{LPSPL\ Sorong} = TK_{Lokasi\ 1} + TK_{Lokasi\ 2} + TK_{Lokasi\ 3} + TK_{Lokasi\ 4}$$

Keterangan:

$TK_{LPSPL\ Sorong}$ = Jumlah tenaga kerja yang terlibat Kegiatan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja LPSPL Sorong

$TK_{Lokasi\ 1,2,3,4}$ = Jumlah tenaga kerja yang terlibat Kegiatan Nasional Bulan Cinta Laut di Lokasi yang menjadi target pada tahun 2024

Tabel 3.4 Capaian IKU 2 Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja LPSPL Sorong (Orang)

SK.2		Meningkatnya Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja LPSPL Sorong									
IKU.2		Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja LPSPL Sorong (Orang)									
Realisasi 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra 2020-2024		
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi thd PK	Target s.d 2024	% Capaian thd Renstra 2024	
-	-	-	-	-	-	-	320				

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2024



1. Capaian IKU Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja LPSPL Sorong Triwulan II Tahun 2024

IKU tenaga kerja yang terlibat dalam gerakan nasional bulan cinta laut di wilayah kerja LPSPL Sorong (Orang) merupakan IKU Baru. Target Kinerja yang ditetapkan sesuai Perjanjian Kinerja LPSPL Sorong tahun 2024 adalah 320 orang, yang periode pelaporannya tahunan. Pada triwulan II tahun 2024, indikator kinerja ini progresnya pada tahap pelaksanaan. Capaian fisik pada triwulan II yaitu 95% dengan perhitungan fisik mengacu pada e monev Bappenas. Pelaksanaan kegiatan telah sampai pada tahap penyampaian hasil verifikasi nelayan peserta gerakan nasional bulan cinta laut. Hasil verifikasi nelayan yang dilakukan pada Kota Ternate, Kota Ambon, Kota Sorong, dan Kabupaten Merauke, dengan tenaga kerja yang terlibat gerakan nasional bulan cinta laut sebanyak 320 orang.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dan Triwulan II Tahun 2024

Sasaran kegiatan meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam gerakan nasional bulan cinta laut di wilayah kerja LPSPL Sorong dengan IKU tenaga kerja yang terlibat dalam gerakan nasional bulan cinta laut di wilayah kerja LPSPL Sorong merupakan Sasaran Kegiatan, Indikator, dan Target baru. sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang ada pada tahun 2024, sehingga belum tercantum dalam dokumen rencana strategis (Renstra) 2020-2024 dan tidak dapat dibandingkan.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan. Efisiensi anggaran disebabkan LPSPL Sorong memiliki satuan kerja di beberapa Provinsi sehingga meminimalkan belanja perjalanan dinas.



5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

LPSP Sorong memiliki hubungan yang harmonis dan dukungan dari Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Instansi Pemerintah terkait lainnya di wilayah kerja LPSP Sorong. Selain itu, pada tahun sebelumnya LPSP Sorong pernah melaksanakan kegiatan serupa.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Kegiatan ini terdapat kendala berupa konsistensi dari tenaga yang terlibat dalam melaksanakan gerakan nasional bulan cinta laut.

c. Solusi

LPSP Sorong aktif dalam melakukan pendampingan terhadap nelayan dalam pelaksanaan gerakan nasional bulan cinta laut melalui kegiatan sosialisasi maupun bimbingan teknis pelaksanaan gerakan nasional bulan cinta laut.

6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKU 2

a. Maluku Utara

LPSP Sorong telah melakukan beberapa kegiatan tahapan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini diantaranya identifikasi awal calon lokasi kelompok nelayan dan verifikasi data nelayan peserta bulan cinta laut. Identifikasi awal calon lokasi kelompok nelayan di Maluku Utara dilakukan di Kelurahan Makassar Timur, Kelurahan Gamala, Kelurahan Kayu Merah, Kelurahan Sasa, Kelurahan Fitu, Kelurahan Jambula dan Kelurahan Kastela. Dalam pelaksanaan kegiatan telah dilakukan identifikasi sebanyak 10 Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan tangkap yang terdiri dari KUB Ngolo Macahaya berjumlah 8 orang di Kelurahan Makassar Timur, KUB Fitu Raya berjumlah 8 orang di Kelurahan Fitu, KUB Wafiq Putra berjumlah 7 orang di Kelurahan Kastela, KUB Tanjung Selatan I berjumlah 13 orang di Kelurahan Sasa, KUB Gosa Laha berjumlah 13 orang di Kelurahan Sasa, KUB Sinar Rejeki berjumlah 13 orang di Kelurahan Sasa, KUB Berkah berjumlah 21 orang di Kelurahan Kayu Merah, KUB Marimoi Jaya berjumlah 25 orang di Kelurahan Jambula, KUB Kahacina berjumlah 17 orang di Kelurahan Jambulan, dan KUB Compact berjumlah 16 orang di Kelurahan Jambula.





Gambar 3.3 Identifikasi dan Verifikasi Kelompok Peserta Bulan Cinta Laut di Maluku Utara.

Hasil verifikasi data nelayan pasca identifikasi yaitu tenaga kerja yang terlibat gerakan nasional bulan cinta laut pada Provinsi Maluku Utara sebanyak 80 orang anggota nelayan yang berasal dari satu kelompok nelayan di Kelurahan Kayu Merah, satu kelompok nelayan di Kelurahan Fitu dan tiga kelompok nelayan di Kelurahan Jambula.

b. Maluku

LPSPSPL Sorong telah melakukan beberapa kegiatan tahapan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini diantaranya identifikasi awal calon lokasi kelompok nelayan dan verifikasi data nelayan peserta bulan cinta laut. Identifikasi awal calon lokasi kelompok nelayan di Maluku dilakukan di 3 Desa yakni Desa Waiheru, Desa Poka, dan Desa Hative Besar. Dalam identifikasi di Desa Waiheru diusulkan untuk menjadi peserta Gernas BCL di Desa Waiheru sebanyak 26 orang yang terdiri dari 1 orang perwakilan setiap POKDAKAN dan kelompok Ibu-Ibu istri dari anggota POKDAKAN. Identifikasi di Desa Poka diusulkan sebanyak 44 orang yakni 26 orang dari 4 POKDAKAN (Suli Indah, Lalosi, Kakap Putih, dan Avishai) dan 18 orang dari 2 kelompok ibu-ibu istri dari anggota POKDAKAN. Identifikasi di Desa Hative Besar diusulkan sebanyak 10 nelayan yang terdiri dari 2 kelompok nelayan, yakni Kelompok V4 sebanyak 6 orang dan Kelompok Suara Hati sebanyak 4 orang.





Gambar 3.4 Identifikasi dan Verifikasi Kelompok Peserta Bulan Cinta Laut di Maluku.

Hasil verifikasi data nelayan pasca identifikasi yaitu tenaga kerja yang terlibat gerakan nasional bulan cinta laut pada Provinsi Maluku terdiri dari Desa Poka, Desa Hative Besar, dan Desa Waiheru dengan total sebanyak 80 orang. Peserta di Desa Poka sebanyak 45 orang, Desa Hative Besar 10 orang, dan Desa Waiheru 25 orang. Pada lokasi Desa Poka terdapat 6 kelompok yakni 4 Pokdakan dan 2 Kelompok Ibu-Ibu, untuk Desa Hative Besar terdapat 2 kelompok nelayan, dan untuk Desa Waiheru terdiri dari 1 Kelompok Ibu-Ibu dan sejumlah Pokdakan yang perlu dikonfirmasi jumlahnya.

c. Papua Barat Daya

LPSPL Sorong telah melakukan beberapa kegiatan tahapan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini diantaranya identifikasi awal calon lokasi kelompok nelayan dan verifikasi data nelayan peserta bulan cinta laut. Identifikasi awal calon lokasi kelompok nelayan di Papua Barat Daya, dalam identifikasi tersebut terdapat 7 kelompok – 20 kelompok (80 orang).



Gambar 3.5 Identifikasi dan Verifikasi Kelompok Peserta Bulan Cinta Laut di Papua Barat Daya.



Hasil verifikasi data nelayan pasca identifikasi yaitu tenaga kerja yang terlibat gerakan nasional bulan cinta laut pada Provinsi Papua Barat Daya terdiri dari Distrik Maladumes sebanyak 20 orang, Distrik Sorong Barat sebanyak 10 orang, Distrik Sorong Timur sebanyak 10 orang, Distrik Sorong Manoi sebanyak 40 orang, dengan total 10 kelompok nelayan dari 4 distrik tersebut.

d. Papua Selatan

LPSPL Sorong telah melakukan beberapa kegiatan tahapan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini diantaranya identifikasi awal calon lokasi kelompok nelayan dan verifikasi data nelayan peserta bulan cinta laut. Identifikasi awal calon lokasi kelompok nelayan di Papua Selatan, dalam identifikasi tersebut terdata 7 kelompok nelayan tangkap (69 orang).



Gambar 3.6 Identifikasi dan Verifikasi Kelompok Peserta Bulan Cinta Laut di Papua Selatan.

Hasil verifikasi data nelayan pasca identifikasi yaitu tenaga kerja yang terlibat gerakan nasional bulan cinta laut pada Provinsi Papua Selatan sebanyak 80 Nelayan terdiri atas, 1 kelompok Nelayan (KUB), 7 kelompok Pengolahan Hasil Perikanan, 1 Kelompok Pokmaswas dan 30 nelayan mandiri.

7. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Pada triwulan III tahun 2024 untuk mendukung pencapaian IKU ini, akan dilaksanakan penutupan gerakan nasional bulan cinta laut pada Kota Ternate, Kota Ambon, Kota Sorong, dan Kabupaten Merauke.



8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan sasaran kegiatan meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam gerakan nasional bulan cinta laut di wilayah kerja LPSPL Sorong dengan IKU tenaga kerja yang terlibat dalam gerakan nasional bulan cinta laut di wilayah kerja LPSPL Sorong (Orang), sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar Rp. 532.544.790 atau 66,57% dari pagu anggaran Rp. 800.000.000 yang dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran IKU 2 Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja LPSPL Sorong (Orang)

No.	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja LPSPL Sorong (Orang)	800.000.000	532.544.790	267.455.210	66,57%
a.	Bulan Cinta Laut BCL	800.000.000	532.544.790	267.455.210	66,57%

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2024

3.3 Sasaran Kegiatan 3 Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong, LPSPL Sorong menjabarkan sasaran kegiatan 3 ini kedalam 1 IKU yaitu Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen).

3.3.1 IKU 3 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)

Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya kegiatan pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang dilakukan melalui kegiatan identifikasi/verifikasi, sosialisasi dan monitoring pemanfaatan ruang laut. Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut merupakan upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang laut, antara lain dapat mengetahui menemukan penggunaan, pemanfaatan serta riwayat perizinan lokasi, dimana



pada implementasi Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang menjadi KKPRL.

Cara menghitung capaian pada IKU ini yaitu menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang terdiri dokumen identifikasi dan verifikasi, sosialisasi dan monitoring pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja LPSPL Sorong yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 3.6 Capaian IKU 3 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)

SK.3	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong									
IKU.3	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)									
Realisasi 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra 2020-2024	
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi thd PK	Target s.d 2024	% Capaian thd Renstra 2024
-	3	-	-	-	-	-	3			

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2024

1. *Capaian IKU Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong Triwulan II Tahun 2024*

IKU dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong merupakan IKU baru yang muncul pada tahun 2023. Target Kinerja yang ditetapkan sesuai Perjanjian Kinerja LPSPL Sorong tahun 2024 adalah 3 Dokumen, yang periode pelaporannya tahunan. Pada triwulan II tahun 2024, indikator kinerja ini belum tercapai namun telah berprogres yaitu telah dilaksanakan sosialisasi, verifikasi, dan identifikasi. Capaian fisik pada triwulan II yaitu 56% dengan perhitungan fisik mengacu pada e monev Bappenas.

2. *Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dan Triwulan II Tahun 2024*

Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong dengan IKU Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL



Sorong ini merupakan Sasaran Kegiatan, Indikator, dan Target yang periode capaian dan pelaporannya tahunan sehingga pada triwulan II belum dapat dibandingkan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja ini merupakan indikator baru yang ada pada tahun 2023, sehingga belum tercantum dalam dokumen rencana strategis (Renstra) 2020-2024 dan tidak dapat dibandingkan.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi anggaran dan efisiensi sumberdaya manusia (SDM) dalam pelaksanaan kegiatan. LPSPL Sorong dalam melaksanakan verifikasi memanfaatkan teknologi komunikasi secara online, sehingga mengakibatkan efisiensi anggaran. Efisiensi sumberdaya diakibatkan karena SDM LPSPL Sorong telah mengikuti bimbingan teknis terkait penyelenggaraan KKPRL sehingga dapat diandalkan dalam melaksanakan proses identifikasi, verifikasi, dan monitoring kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Adanya satuan kerja pada provinsi lain juga mengakibatkan adanya efisiensi sumberdaya.

5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Ketercapaian target ini didukung oleh beberapa faktor diantaranya sumberdaya manusia (SDM) LPSPL Sorong telah mengikuti bimbingan teknis terkait penyelenggaraan KKPRL sehingga kompetensinya menunjang pelaksanaan kegiatan, koordinasi aktif dengan dengan Direktorat Pengelolaan Ruang Laut, serta Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Tidak terdapat kendala dalam mencapai indikator kinerja ini pada tahun 2024.

c. Solusi

Tidak terdapat kendala dalam mencapai target kinerja ini, namun guna untuk meningkatkan jumlah pelaku pemanfaatan ruang laut dalam mengajukan permohonan



penerbitan PKKPRL maka LPSPL Sorong akan melakukan pendampingan dan konsultasi dalam penyusunan proposal.

6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKU 3

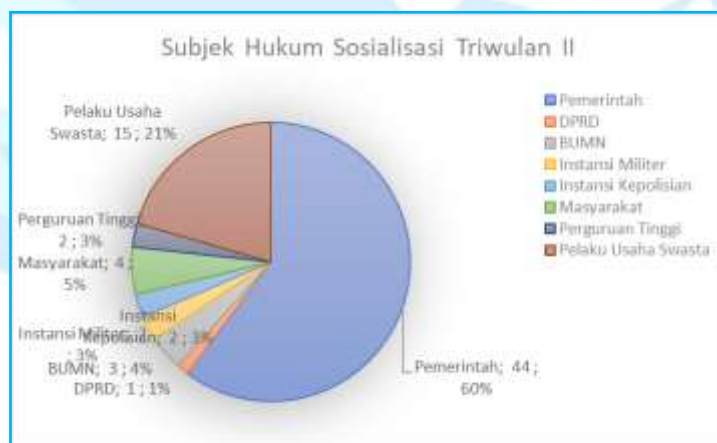
a. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut

Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk mensosialisasikan regulasi dan kebijakan tentang penyelenggaraan penataan ruang laut, mensosialisasikan tahapan-tahapan pengajuan perizinan KKPRL melalui sistem OSS, dan mengidentifikasi isu serta permasalahan terkait perizinan pemanfaatan ruang laut.



Gambar 3.7 Pelaksanaan Sosialisasi KKPRL Triwulan II Tahun 2024.

Pada triwulan II LPSPL Sorong telah melaksanakan sosialisasi di 1 Kabupaten/Kota yang terdapat pada 1 Provinsi yaitu Kota Jayapura di Provinsi Papua. Sosialisasi tertuju kepada masyarakat lokal di pemukiman Tanjung Ria, Kayu Batu, dan Argapura.



Gambar 3.8 Komposisi Subjek Hukum Sosialisasi KKPRL.



Pada periode bulan Januari hingga bulan Juni telah dilakukan sosialisasi pada 5 lokasi diantaranya Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku, Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Fak Fak Provinsi Papua Barat, dan Kota Jayapura Provinsi Papua. Jumlah subjek hukum secara keseluruhan sebanyak 73 Instansi/Stakeholder yang diikuti 146 orang peserta. Adapun komposisi target sosialisasi terdiri dari 44 subjek dari Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah (60,27%), 1 subjek anggota legislatif (DPRD) (1,37%), 3 subjek BUMN (4,11%), 2 subjek Instansi Militer (2,74%), 2 subjek Instansi Kepolisian (2,74%), 4 subjek dari masyarakat (5,48%), 2 subjek hukum perguruan tinggi (2,74) dan 15 subjek Pelaku Usaha Swasta (20,55%).

b. Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut

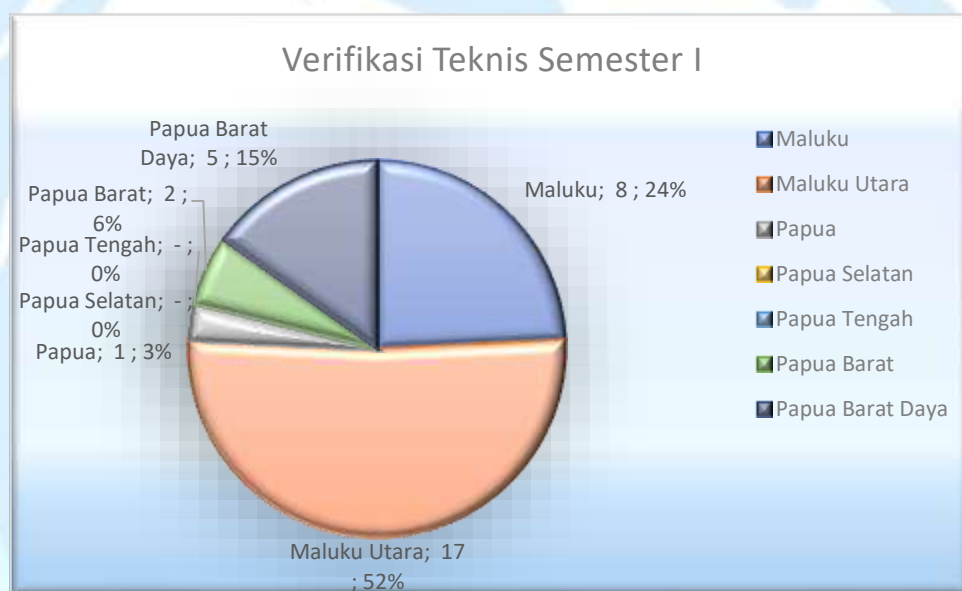
Verifikasi merupakan sebagian proses dalam hal pemberian pertimbangan dan rekomendasi agar dokumen KKPRIL dapat diterbitkan atau tidak dapat diterbitkan, sehingga pemrakarsa mendapatkan kejelasan status dalam kegiatan pemanfaatan ruang laut. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pendampingan prapendaftaran kepada stakeholder, melakukan verifikasi teknis dokumen permohonan, dan menginventarisasi subjek hukum yang telah memohonkan KKPRIL.



Gambar 3.9 Verifikasi Lapang dan Verifikasi Teknis.

Pada triwulan II, LPSPL Sorong telah melaksanakan pendampingan pra pendaftaran berupa konsultasi dan asistensi kepada 12 subjek hukum di wilayah kerja LPSPL Sorong. Selain itu, verifikasi dokumen atau penilaian teknis telah dilaksanakan kepada 22 pengajuan permohonan yang terdiri dari 19 pemrakarsa/subjek hukum.

Pada semester I, LPSPL Sorong telah melakukan kegiatan pra pendaftaran berupa konsultasi pada 9 pemrakarsa dan asistensi pada 3 pemrakarsa. Verifikasi teknis atau penilaian teknis di wilayah kerja LPSPL Sorong baik yang dilakukan oleh tim pusat maupun secara mandiri oleh LPSPL Sorong telah dilakukan kepada pada 30 pemrakarsa dengan total 55 pengajuan permohonan (32 Jadwal Penilaian Teknis) di 19 Kabupaten/Kota di 5 Provinsi. Pemanfaatan ruang laut yang dimohonkan diperuntukan untuk beberapa kegiatan diantaranya bangunan pengaman pantai, rumpon, dumping area, pelabuhan, terminal khusus/TUKS, reklamasi, keramba jaring apung, galangan kapal, permukiman, *water front city*, dan dermaga.



Gambar 3.10 Komposisi Wilayah Verifikasi Teknis di LPSPL Sorong.

Sebanyak 32 verifikasi teknis atau penilaian teknis untuk 55 permohonan dan berdasarkan PP 85 tahun 2021 tentang PNBP di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, teridentifikasi potensi Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) KKPRL yang diajukan pada semester I tahun 2024 mencapai 13,96 milyar rupiah. Potensi nilai PNBP ini bersumber dari 26 Pemrakarsa (86,67%) yang berstatus Persetujuan KKPRL dan insentif PNBP Rp 0 Rupiah pada 4 Pemrakarsa (13,33%) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan nilai 30,36 milyar rupiah.

c. Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut

Monitoring pemanfaatan ruang laut bermaksud untuk mengetahui kondisi pemanfaatan ruang laut yang pelaku usaha lakukan saat ini. Monitoring dilakukan juga



untuk mengidentifikasi isu dan permasalahan di lapangan terkait pemanfaatan ruang laut. Monitoring dilaksanakan dengan kunjungan langsung ke lokasi subjek hukum yang melakukan pemanfaatan ruang laut.



Gambar 3.11 Pelaksanaan Monitoring KKPRL Triwulan II Tahun 2024.

Pelaksanaan monitoring sampai dengan triwulan II telah dilakukan pada 6 Kabupaten/Kota pada di 5 Provinsi di wilayah kerja Loka PSPL Sorong yaitu di Kabupaten Halmahera Tengah (Maluku Utara), Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara (Maluku), Kabupaten Raja Ampat (Papua Barat Daya), Kabupaten Fakfak (Papua Barat) dan Kota Jayapura (Papua). Jumlah lokasi yang telah dimonitoring secara keseluruhan sebanyak 25 Subjek hukum yang terdiri dari 25 kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan total luasan mencapai 76,77 hektar. Adapun status 20 kegiatan tersebut antara lain 16 kegiatan konfirmasi KKPRL (64%) yang kegiatannya merupakan kegiatan Pemerintah (Pusat/Daerah) dan masyarakat lokal, sedangkan 9 kegiatan statusnya persetujuan KKPRL (36%).



Gambar 3.12 Pelaksanaan Pengendalian KKPRL Triwulan II Tahun 2024.

Selain melakukan monitoring terhadap pelaku pemanfaatan ruang laut LPSPSPL Sorong juga melaksanakan pengendalian yang berdasar pada Keputusan Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis



Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut. Pada triwulan II telah dilakukan pengendalian kepada 6 pelaku usaha dari target 12 pelaku usaha yang telah terbit dokumen PKKPRL pada tahun sebelumnya.

d. Kegiatan Pendukung lainnya

Pada triwulan II, LPSPL Sorong selain melaksanakan kegiatan sosialisasi, verifikasi, pengendalian, dan monitoring pemanfaatan ruang laut juga melaksanakan kegiatan pendukung lainnya yang termasuk dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut. Kegiatan tersebut diantara lain yaitu mengikuti bimbingan teknis pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pemetaan habitat dasar perairan dangkal.

7. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Pada triwulan III tahun 2024 untuk mendukung pencapaian IKU ini, akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi, verifikasi, pengendalian, dan monitoring pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja LPSPL Sorong.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan sasaran kegiatan terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja LPSPL Sorong dengan IKU dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen), sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar Rp. 475.064.910 atau 48,98% dari pagu anggaran Rp. 970.000.000 yang dapat dilihat pada tabel 3.7. Pagu anggaran Rp. 970.000.000 bersumber dari rupiah murni sebesar Rp. 700.000.000 dan PNBP sebesar Rp. 270.000.000.

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran IKU 3 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)

No.	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)	970.000.000	475.064.910	494.935.090	48,98%
a.	Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	281.230.000	212.202.895	69.027.105	75,46%
b.	Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut	471.600.000	182.124.382	289.475.618	38,62%

c.	Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut	217.170.000	80.737.633	136.432.367	37,18%
----	-----------------------------------	-------------	------------	-------------	--------

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2024

3.4 Sasaran Kegiatan 4 Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja LPSPL Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja LPSPL Sorong. LPSPL Sorong menjabarkan sasaran kegiatan 4 ini kedalam 1 IKU, yaitu IKU Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Daerah).

3.4.1 IKU 4 Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Daerah)

Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah Provinsi yang didampingi percepatan usulan penetapan Kawasan konservasi dapat melalui pendampingan penyusunan rencana zonasi, pendampingan penyusunan rencana pengelolaan, atau pendampingan lain sesuai dengan kondisi Kawasan konservasi. Sesuai dengan Permen KP nomor 65 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Teknis diberikan tugas untuk melaksanakan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan.

Teknik menghitung capaian IKU ini dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong yang didampingi dalam proses percepatan usulan penetapan Kawasan Konservasinya.

Tabel 3.8 Capaian IKU 4 Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Daerah)

SK.4		Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja LPSPL Sorong								
IKU.4		Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Daerah)								
Realisasi 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra 2020-2024	
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi thd PK	Target s.d 2024	% Capaian thd Renstra 2024
-	2	-	-	-	-	-	1			

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2024



1. Capaian IKU Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Daerah) Triwulan II Tahun 2024

Target IKU daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja LPSPL Sorong (Daerah) yaitu 1 Daerah. Pada tahun 2024 pendampingan dilaksanakan pada Calon Kawasan Konservasi Daerah (CKKD) Seram Bagian Timur Provinsi Maluku, pada triwulan II indikator kinerja ini masih dalam tahap perencanaan. Capaian fisik pada triwulan I yaitu 10% dengan perhitungan fisik mengacu pada e money Bappenas.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dan Triwulan II Tahun 2024

Periode pelaporan IKU Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong adalah tahunan, sehingga tidak memiliki target pada triwulanan. Oleh karena itu, pada triwulan II tahun 2024 belum terdapat realisasi capaian sama dengan triwulan I tahun 2023.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang baru ada pada tahun 2022 dan belum tercantum dalam dokumen Renstra 2020-2024, sehingga tidak dapat dibandingkan. Pada tahun 2024 sasaran kegiatan ini juga terdapat perubahan sehingga tidak sama dengan sasaran kegiatan pada tahun 2022 dan 2023.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan. Efisiensi anggaran terjadi karena adanya kerjasama pembiayaan dalam melaksanakan aksi mendukung percepatan penetapan kawasan konservasi daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong dengan pemerintah daerah. Efisiensi anggaran juga disebabkan LPSPL Sorong memiliki satuan kerja di beberapa Provinsi sehingga meminimalkan belanja perjalanan dinas.



5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Sumberdaya manusia LPSPL Sorong yang handal serta dukungan mitra konservasi keanekaragaman hayati laut dalam inisiasi, identifikasi, pencadangan dan pengusulan penetapan kawasan konservasi perairan serta koordinasi yang harmonis dengan pemerintah daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong menjadikan indikator kinerja ini dapat berprogres dalam mencapai target yang ditentukan. Pada triwulan II telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam merencanakan pelaksanaan kegiatan, hal ini merupakan salah satu langkah yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Pada triwulan II kegiatan ini masih dalam tahap perencanaan, hal ini disebabkan karena Pemerintah Daerah merencanakan kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan III tahun 2024.

c. Solusi

LPSPL Sorong akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku untuk menyusun timeline penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi.

6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKU 4

a. Pendampingan Percepatan Penetapan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Maluku

Pendampingan yang akan dilaksanakan di Provinsi Maluku yaitu sesuai dengan kondisi kawasan konservasinya. Pada triwulan II LPSPL Sorong masih dalam tahap perencanaan diantaranya koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku. Hasil dari koordinasi kegiatan direncanakan pada triwulan III tahun 2024.



Gambar 3.13 Kegiatan Pendukung IKU 4.



Selain kegiatan pendampingan terhadap percepatan penetapan kawasan konservasi seram bagian timur, LPSPL Sorong juga terlibat dalam beberapa kegiatan yang mendampingi Pemerintah Daerah diantaranya pembahasan revisi draf MPA Buru, konsultasi tata batas kawasan konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat, dan evaluasi teknis usulan penetapan Kawasan Konservasi Daerah Perairan Timur Patani-Bicoli, Pulau Sayafi dan Pulau Iiew.

7. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Pada triwulan III tahun 2024 untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini, akan dilakukan persiapan untuk rapat atau membentuk kelompok kerja penyusunan usulan penetapan calon kawasan konservasi daerah (CKKD) Seram Bagian Timur dan melakukan pengambilan data atau konsultasi publik.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan sasaran kegiatan terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong dengan IKU daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Daerah), sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar Rp. 0 atau 0% dari pagu anggaran Rp. 100.000.000 yang dapat dilihat pada tabel 3.9. Realisasi anggaran yang masih nihil dikarenakan kegiatan masih dalam perencanaan, sehingga pada periode selanjutnya agar dapat dilakukan percepatan pada kegiatan ini.

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran IKU 4 Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Daerah)

No.	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
	Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LPSPPL Sorong (Daerah)	100.000.000	0	100.000.000	0%
a.	Fasilitasi usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	100.000.000	0	100.000.000	0%

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2024

3.5 Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja LPSPL Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di wilayah kerja LPSPL Sorong, LPSPL Sorong menjabarkan sasaran kegiatan 5 ini kedalam 1 IKU yaitu IKU Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kesepakatan).

3.5.1 IKU 5 Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kesepakatan)

Kerjasama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan satu atau lebih Lembaga/badan/organisasi, untuk mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kerjasama dapat dilakukan dengan kementerian dan Lembaga pemerintah non kementerian. Pemerintah daerah, Lembaga Pendidikan, Lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha/ industri/ perusahaan, dan organisasi kemasyarakatan.

Teknik menghitung capaian IKU ini dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan draft kerjasama yang disusun/difasilitasi penyusunannya di wilayah kerja LPSPL Sorong untuk mendukung kegiatan konservasi dan keanekaragaman hayati laut dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I.

Tabel 3.10 Capaian IKU 5 Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kesepakatan)

Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja LPSPL Sorong										
IKU.5 Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kesepakatan)										
Realisasi 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra 2020-2024	
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi thd PK	Target s.d 2024	% Capaian thd Renstra 2024
-	-	-	-	-	-	-	1		6	133,33%

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2024



1. Capaian IKU Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kesepakatan) Triwulan II Tahun 2024

Target IKU kerjasama konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Kesepakatan) pada tahun 2024 yaitu 1 (satu) Kesepakatan. Pada tahun 2024 kerjasama akan diinisiasi antara LPSPL Sorong dengan Universitas Pattimura terkait rehabilitasi terumbu karang di Provinsi Maluku. Periode capaian dan periode pelaporan IKU ini adalah tahunan, pada triwulan II indikator kinerja ini capaian fisiknya 100%. Capaian fisik dicapai dengan telah disampaikan draf perjanjian kerjasama (PKS) antara LPSPL Sorong dengan Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Universitas Kristen Papua (UKIP) kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dengan nomor: B.583/LPSPL.1/KS.120/VI/2024 dan draf perjanjian kerjasama antara LPSPL Sorong dengan Pasca sarjana dan FPIK Universitas Pattimura kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dengan nomor: B.691/LPSPL.1/KS.120/VII/2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dan Triwulan II Tahun 2024

Periode pelaporan IKU kerjasama konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja LPSPL Sorong adalah tahunan, sehingga tidak memiliki target pada triwulanan. Selain itu, pada tahun 2023 LPSPL Sorong tidak memiliki indikator kinerja ini sehingga tidak dapat dibandingkan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi IKU kerjasama konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja LPSPL Sorong pada periode 2020-2022 telah tercapai 8 kesepakatan dengan target pada dokumen Renstra 2020-2024 yaitu 6 kesepakatan. Namun karena indikator ini periode pelaporan dan pencapaiannya tahunan maka pada triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi anggaran. LPSPL Sorong memiliki SDM yang kompetibel dan handal yang tersebar di 4 Provinsi (Papua Barat Daya, Papua Selatan, Maluku, Maluku Utara) sehingga memudahkan koordinasi dengan mitra kerja dalam kaitannya untuk pencapaian indikator kinerja ini secara efisien. Efisiensi biaya



diimplementasikan ketika pembahasan draft PKS dapat dilaksanakan secara daring dengan bantuan teknologi informasi.

5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Ketercapaian target ini didukung oleh beberapa faktor diantaranya sumberdaya manusia (SDM) LPSPL Sorong yang handal, serta hubungan yang harmonis dan dukungan dari mitra konservasi, Pemerintah Daerah, Kelompok Penggerak Konservasi, dan Satuan Kerja Instansi Pemerintah terkait lainnya di wilayah kerja LPSPL Sorong.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Tidak ada kendala dalam pencapaian target ini. Pencapaian target tidak akan terpenuhi apabila tidak ada hubungan harmonis antara LPSPL Sorong dengan mitra konservasi, Pemerintah Daerah, Kelompok Penggerak Konservasi, dan Satuan Kerja Instansi Pemerintah terkait lainnya yang akan memudahkan LPSPL Sorong berkoordinasi dalam menginisiasi dan menyusun kesepakatan dalam bidang konservasi.

c. Solusi

Tidak terdapat kendala dalam mencapai target kinerja ini, sehingga tidak terdapat Solusi.

6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKU 5

a. **Perjanjian Kerjasama (PKS) LPSP Sorong dengan Pascasarjana dan FPIK Universitas Pattimura**

Kerjasama dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong. Berkaitan dengan hal tersebut LPSPL Sorong berencana menyusun perjanjian kerjasama dengan Universitas Pattimura (Unpatti). Koordinasi awal dengan pihak universitas Pattimura juga telah dilakukan untuk menyamakan pandangan para pihak yang akan melakukan Kerjasama. Koordinasi awal dilakukan pada tanggal 23 Januari 2024, 8 Maret 2024 dan 15 Maret 2024. Hasil koordinasi tersebut menghasilkan bahwa Universitas Pattimura (Unpatti) sangat terbuka dan bersedia melakukan Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut atau LPSPL Sorong. Unpatti meyakini adanya

Kerjasama akan membuat pengelolaan wilayah pesisir dan pengembangan masyarakat pesisir di wilayah Maluku akan lebih optimal, selain itu adanya Kerjasama juga dapat memperkaya ketersediaan informasi dan memperluas pelaksanaan program merdeka belajar bagi para mahasiswa.



Gambar 3.14 Pembahasan Draft Kerjasama LPSPL Sorong dengan Universitas Pattimura.

Pada tanggal 20-21 Juni 2024 LPSPL Sorong melakukan pembahasan finalisasi draf perjanjian kerjasama dengan pascasarjana dan FPIK Unpatti. Hasil pembahasan draf tersebut telah disepakati ruang lingkup kerjasama yang meliputi pengelolaan sumberdaya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, magang, pelatihan, kunjungan belajar dan PKL, pengajaran dan pembimbingan mahasiswa di bidang kelautan dan perikanan, penggunaan sarana prasarana kajian dan pengembangan para pihak, dan kegiatan lainnya yang disepakati oleh para pihak. Draf perjanjian kerjasama ini jika ditandatangani akan berlaku dengan jangka waktu 3 tahun.

b. Perjanjian Kerjasama (PKS) antara LPSPL Sorong dengan Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Universitas Kristen Papua

Kerjasama antara LPSPL Sorong dengan program studi manajemen sumberdaya perairan Universitas Kristen Papua bertujuan untuk memperkuat sumberdaya manusia dalam pengelolaan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan melaksanakan pengelolaan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.





Gambar 3.15 Pembahasan Draft Kerjasama LPSPL Sorong dengan Universitas Kristen Papua.

Perjanjian kerjasama pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di Provinsi Papua Barat Daya. Pembahasan draf perjanjian bersama ini dilakukan di ruang rapat LPSPL Sorong pada tanggal 21-22 Mei 2024. Hasil pembahasan draf tersebut disepakati beberapa poin yang menjadi ruang lingkup perjanjian kerjasama diantaranya pengembangan sumberdaya manusia melalui Tridharma Perguruan Tinggi di bidang kelautan dan perikanan, konservasi jenis ikan yang dilindungi terancam punah dan/atau teratifikasi appendiks CITES, dan pengendalian pencemaran laut. Draf perjanjian kerjasama ini jika ditandatangani akan berlaku dengan jangka waktu 3 tahun.

7. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Pada triwulan III akan dilakukan beberapa kegiatan untuk mendukung tercapainya IKU ini, diantaranya pembahasan, perbaikan, dan finalisasi draft dokumen kerjasama dengan bagian kerjasama Setditjen PKRL dan menyusun laporan kegiatan inisiasi kerjasama di wilayah kerja LPSPL Sorong.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan sasaran kegiatan meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di wilayah kerja LPSPL Sorong dengan IKU kerjasama konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Kesepakatan), sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar Rp. 30.097.343 atau 43,00% dari pagu anggaran Rp. 70.000.000 yang dapat dilihat pada tabel 3.11.



Tabel 3.11 Realisasi Anggaran IKU 5 Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja LPSP Sorong (Kesepakatan)

No.	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
	Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja LPSP Sorong (Kesepakatan)	70.000.000	30.097.343	39.902.657	43,00%
a.	Penyusunan Kesepakatan Bersama	70.000.000	30.097.343	39.902.657	43,00%

Sumber Data: LPSP Sorong, per 30 Juni 2024

3.6 Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam mendukung Konservasi di Wilayah Kerja LPSP Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di wilayah kerja LPSP Sorong, LPSP Sorong menjabarkan sasaran kegiatan 6 ini kedalam 2 IKU yaitu IKU bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja LPSP Sorong (Kelompok) dan IKU kelompok masyarakat di kawasan konservasi daerah pada wilayah kerja LPSP Sorong yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (Kelompok).

3.6.1 IKU 6 Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LPSP Sorong (Kelompok)

Bantuan pemerintah merupakan bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah. Sedangkan bantuan konservasi merupakan bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat dalam mendukung Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan konservasi atau jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi.

Tata cara pemberian bantuan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 71 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Teknik menghitung capaian IKU ini dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan kelompok masyarakat yang diberikan bantuan konservasi sesuai tahapan sebagaimana



diatur dalam Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 71 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2024.

Tabel 3.12 Capaian IKU 6 Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LPSPSPL Sorong (Kelompok)

SK.6	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam mendukung Konservasi di Wilayah Kerja LPSPSPL Sorong									
IKU.6	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LPSPSPL Sorong (Kelompok)									
Realisasi 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra 2020-2024	
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi thd PK	Target s.d 2024	% Capaian thd Renstra 2024
3	3	-	1	1	100%	(-2)	3	33,33%	17	64,70%

Sumber Data: LPSPSPL Sorong, per 30 Juni 2024

1. *Capaian IKU Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LPSPSPL Sorong (Kelompok) Triwulan II Tahun 2024*

Target IKU bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja LPSPSPL Sorong (Kelompok) yaitu 3 (Tiga) kelompok. Periode capaian dan periode pelaporan IKU ini adalah triwulanan, pada triwulan II target capaian yaitu 1 kelompok. Pada triwulan II telah tercapai 1 kelompok yaitu Pokmaswas Katora Jaya Kabupaten Manokwari (Nomor BAST: B.640/LPSPSPL.1/PRL.440/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024). Capaian ini telah disampaikan kepada Kepala LPSPSPL Sorong melalui memorandum oleh penanggung jawab kegiatan.

2. *Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dan Triwulan II Tahun 2024*

Periode pencapaian dan pelaporan indikator kinerja ini yaitu triwulanan. Target indikator kinerja ini pada tahun 2023 sama dengan tahun 2024 yaitu 3 kelompok. Pada triwulan II capaian pada tahun 2023 yaitu 3 kelompok atau lebih tinggi daripada capaian triwulan II tahun 2024 yaitu 1 kelompok. Hal ini disebabkan penyerahan bantuan kepada 2 kelompok lainnya diagendakan pada bulan Juli 2024.



3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi IKU bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja LPSPL Sorong sampai dengan triwulan II tahun 2024 adalah 11 kelompok. Dengan demikian, sampai dengan triwulan II tahun 2024 target renstra 2020-2024 IKU ini telah tercapai 64,70% (11 kelompok dari target 17 kelompok).

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi biaya karena memanfaatkan teknologi komunikasi dalam melakukan identifikasi kelompok, sehingga tidak mengeluarkan biaya untuk perjalanan dinas dalam rangka identifikasi calon kelompok penerima bantuan. Adanya wilayah kerja pada provinsi lain juga menyebabkan efisiensi anggaran.

5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Penyaluran bantuan pemerintah sudah mengacu pada petunjuk teknis penyaluran bantuan konservasi tahun 2024 yang tertuang dalam Keputusan Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 71 Tahun 2023. Serta terdapat peran dari stakeholder terkait yang memudahkan koordinasi identifikasi dan verifikasi calon kelompok penerima bantuan seperti dengan DKP di Kab/Kota maupun Provinsi setempat.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Tidak terdapat kendala dalam mencapai indikator kinerja ini.

c. Solusi

Untuk meningkatkan nilai kinerja ini pada triwulan III agar dilakukan serah terima pada 2 kelompok yang belum dilakukan serah terima.

6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKU 6

a. Identifikasi Calon Kelompok Penerima Bantuan

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi dan seleksi kelompok masyarakat konservasi (KOMPAK) yang memiliki ruang lingkup kegiatan pelaksanaan



konservasi sumberdaya ikan, yang terkendala pada keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki sehingga perlu dilakukan kegiatan penyaluran pemberian bantuan. Identifikasi dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2023, melalui surat Kepala LPSPL Sorong kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah kerja LPSPL Sorong dengan nomor B.751/LPSPL.1/PRL.440/XII/2023 perihal Permintaan Usulan Kelompok Calon Penerima Bantuan Konservasi/KOMPAK dan Proposal Usulan Kegiatan Bantuan Konservasi/KOMPAK Tahun 2024. Hasil dari identifikasi tersebut terdapat 8 (delapan) kelompok calon yang telah teridentifikasi dari 4 (empat) provinsi di wilayah kerja LPSPL Sorong.

Setelah dilakukan identifikasi, LPSPL Sorong melakukan seleksi kelompok calon penerima Bantuan Konservasi/KOMPAK berdasarkan syarat dan ketentuan yang tertuang dalam Kepdirjen PKRL No. 71/2023 tentang penyaluran bantuan konservasi tahun 2024. Hasil dari seleksi menghasilkan 3 (tiga) kelompok calon prioritas dari (delapan) kelompok calon yang diusulkan diantaranya Pokmaswas Bangkit sehati sehati yang berlokasi di kabupaten Pulau Morotai, Pokmaswas Katoraja yang berlokasi di kabupaten Manokwari, dan Pokmaswas Sebelei yang di kabupaten Halmahera Selatan.

b. Verifikasi Calon Kelompok Penerima Bantuan

Kegiatan verifikasi merupakan tindaklanjut dari hasil identifikasi calon kelompok penerima bantuan. LPSPL Sorong melaksanakan verifikasi lapang bagi calon kelompok prioritas penerima bantuan konservasi tahun anggaran 2024 (Pokmaswas Bangkit sehati sehati yang berlokasi di kabupaten Pulau Morotai, Pokmaswas Katoraja yang berlokasi di kabupaten Manokwari, dan Pokmaswas Sebelei yang di kabupaten Halmahera Selatan) yang berada di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat. Verifikasi lapang bertujuan untuk memastikan kelengkapan administrasi dan pendukung, yaitu: Proposal, Form Lampiran Proposal, Rincian barang kebutuhan dan spesifikasinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.



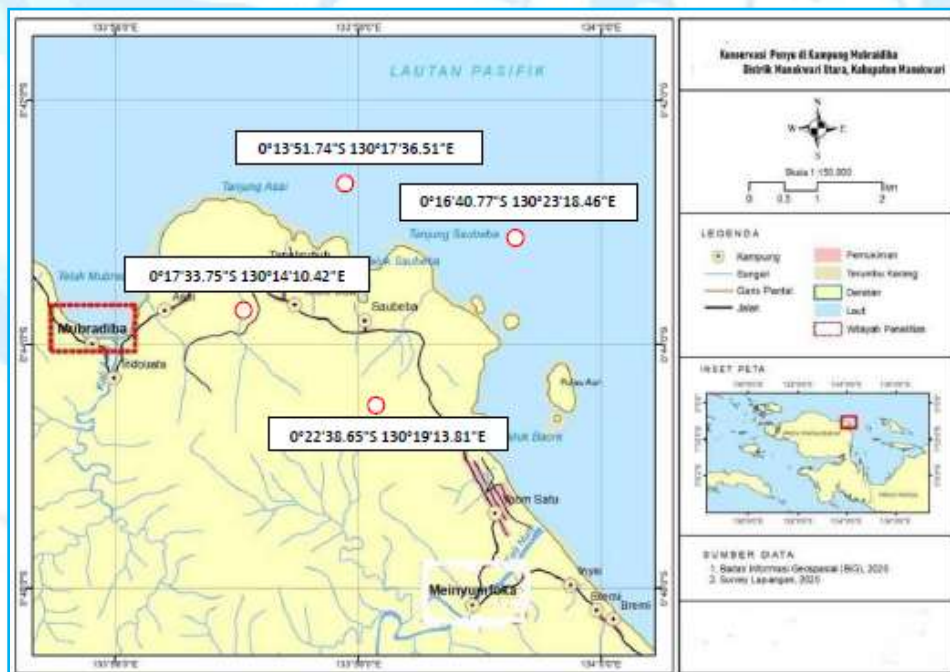


Gambar 3.16 Verifikasi Calon Penerima Bantuan KOMPAK Tahun 2024.

c. Serah Terima Bantuan KOMPAK

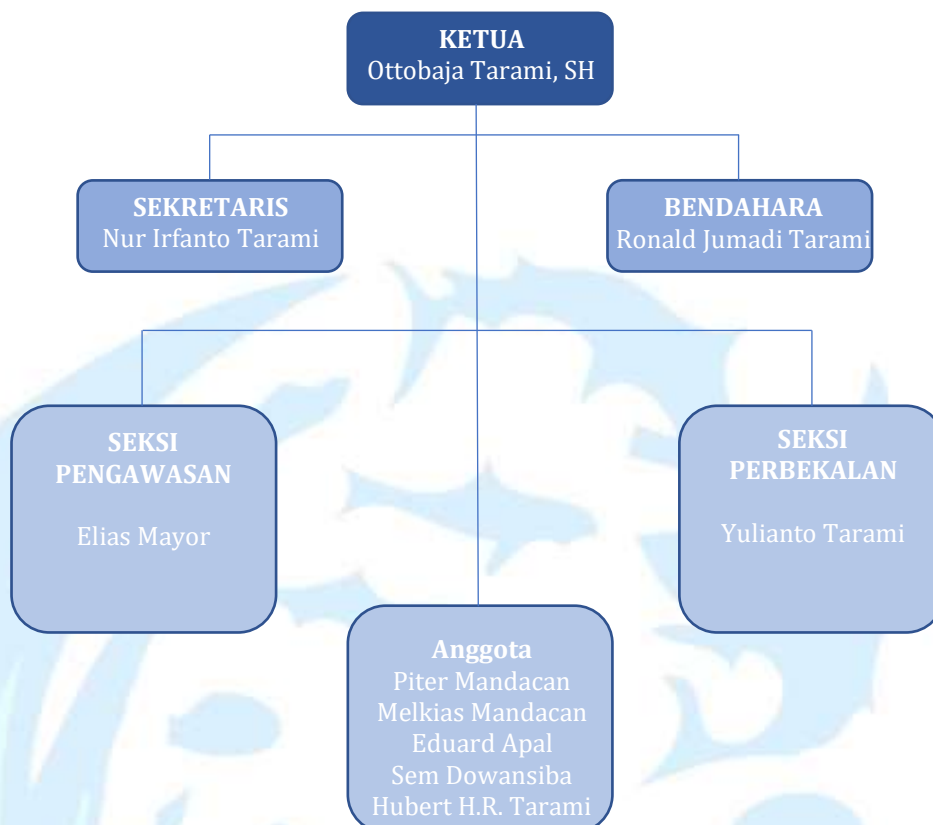
- Pokmaswas Katora Jaya Kabupaten Manokwari**

Pokmaswas Katora Jaya berada dalam salah satu kawasan konservasi penyu di Manokwari yang dikelola secara swadaya. Keterlibatan Keterlibatan masyarakat dalam menjaga pelestarian penyu sudah banyak dilakukan baik itu melalui program pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta akademisi. Kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) Katora Jaya secara geografis terletak di koordinat $0^{\circ}44'0''S$ $133^{\circ}56'0''E$ atau pada Kampung Mubraida, wilayah kerja Pokmaswas Katora Jaya meliputi perairan pantai Manokwari dan daratan seluas 9,12 km².



Gambar 3.11 Wilayah Pengawasan Pokmaswas Katora Jaya.





Gambar 3.18 Struktur Organisasi Pokmaswas Katora Jaya.

Pokmaswas Katora Jaya telah melakukan beberapa kegiatan yang mendukung konservasi diantaranya sosialisasi jenis ikan/penyu yang dilindungi, berpartisipasi dalam praktikum mahasiswa UNIPA Jurusan FPIK, dan sosialisasi bidang lingkungan hidup.

Tabel 3.13 Sarana Prasarana Kelompok Katora Jaya

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah	Sumber	Kondisi Barang
1	Tempat penetasan telur penyu	1 Unit	Swadaya, DKP PB	Baik
2	Tempat penangkaran tukik	5 Unit	Swadaya, DKP PB	Baik
3	Pos pengawasan	1 Unit	DKP PB	Baik
4	Perahu Fiber	1 Unit	Gubernur PB	Rusak
5	Mesin 15 PK Suzui	1 Unit	Gubernur PB	Rusak
6	Baju Kaos Pokmaswas	10 Unit	DKP PB	Baik
7	Alat Komunikasi HT	10 Unit	DKP PB	Rusak
8	Senter Halogen	10 Unit	DKP PB	Rusak



No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah	Sumber	Kondisi Barang
9	Teropong Binocular	10 Unit	DKP PB	Baik
10	Life Jacket	12 Unit	DKP PB	Baik
11	Kamera Digital	2 Unit	DKP PB	Rusak
12	Handphone Android	1 Unit	DKP PB	Baik
13	GPS	5 Unit	DKP PB	Baik

Pokmaswas Katora Jaya mengajukan proposal bantuan dengan tujuan untuk mendukung kegiatan penetasan telur, penangkaran tukik dan pelepasliaran tukik ke laut bersama pelajar, mahasiswa dan stakeholder serta instansi terkait. Selain itu alat-alat yang diajukan juga akan digunakan untuk membuat pelaporan.

Setelah melewati proses identifikasi dan verifikasi oleh LPSP Sorong, serta persetujuan oleh Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut terhadap hasil identifikasi dan verifikasi yang dilakukan oleh LPSP Sorong, maka Pokmaswas Katora Jaya ditetapkan sebagai penerima bantuan konservasi tahun 2024 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) LPSP Sorong dengan Nomor: 01/SK/LPSP.Sorong/PPK/IV/2024 tanggal 17 April 2024.



Gambar 3.19 Serah Terima Bantuan Kepada Pokmaswas Katora Jaya.

Pokmaswas Katora Jaya menjadi salah satu kelompok yang ditetapkan sebagai penerima bantuan konservasi tahun 2024, sehingga dilakukan serah terima bantuan yang dilaksanakan di Aula Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua pada tanggal 26 Juni 2024. Kegiatan serah terima bantuan kepada Pokmaswas Katora Jaya tertuang dalam Berita Acara Serah Terima (BAST)



Nomor: B.640/LPSPL.1/PRL.440/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 dengan daftar barang yang diserahkan terimakan sebagai berikut:

Tabel 3.14 Daftar Barang yang Diserahkan Terimakan ke Pokmaswas Katora Jaya

No	Nama Barang/Merk /Spesifikasi	Vol	Satuan	Harga Perolehan (Rp.)	Dokumentasi
1	Mesin pompa air laut	1	Unit	4.329.000	
2	Selang pipa HDPE 1,5 Inci	50	Meter	5.883.000	
3	Laptop Acer Aspire	1	Unit	13.875.000	
4	Motor roda 3 merk VIAR	1	Unit	49.617.000	
5	Kamera Olympus Tough TG-7	1	Unit	9.990.000	



6	Memory Card Kamera 128 GB	1	Unit	582.750	
7	Printer Epson L3210	1	Unit	3.774.000	
8	Projector Infocus Epson EB-X400 XGA 3300	1	Unit	9.435.000	
Total Harga Perolehan				97.485.750	

7. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Pada triwulan III akan dilakukan beberapa kegiatan untuk mendukung tercapainya IKU ini, akan dilakukan serah terima bantuan KOMPAK pada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Bangkit Sehati dan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Sebelei.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan sasaran kegiatan meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di wilayah kerja LPSPS Sorong dengan IKU bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja LPSPS Sorong (Kelompok), sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar Rp. 334.840.312 atau 85,74% dari pagu anggaran Rp. 390.520.000 yang dapat dilihat pada tabel 3.15.



Tabel 3.15 Realisasi Anggaran IKU 6 Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kelompok)

No.	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kelompok)	390.520.000	334.840.312	55.679.688	85,74%
a.	Bantuan KOMPAK 2024	300.000.000	294.005.700	5.994.300	98,00%
b.	Identifikasi Verifikasi Bantuan KOMPAK 2024	30.244.000	30.237.012	6.988	99,98%
c.	Penyerahan Bantuan KOMPAK 2024	60.276.000	10.597.600	49.678.400	17,58%

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2024

3.6.2 IKU 7 Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja LPSPL Sorong yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)

Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru adalah kelompok masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru melalui kegiatan pelatihan/bimtek yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Bantuan masyarakat merupakan kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha Bersama di bidang kelautan dan perikanan.

Teknik menghitung capaian IKU ini dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan kelompok masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru di wilayah kerja LPSPL Sorong.



Tabel 3.16 Capaian IKU 7 Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja LPSPL Sorong yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)

SK.6	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam mendukung Konservasi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong									
IKU.7	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja LPSPL Sorong yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)									
Realisasi 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra 2020-2024	
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi thd PK	Target s.d 2024	% Capaian thd Renstra 2024
-	-	-	-	-	-	-	1			

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2024

1. Capaian IKU Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja LPSPL Sorong yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok) Triwulan II Tahun 2024

IKU kelompok masyarakat di kawasan konservasi daerah pada wilayah kerja LPSPL Sorong yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru merupakan IKU Baru. Target kinerja yang ditetapkan sesuai Perjanjian Kinerja LPSPL Sorong tahun 2024 adalah 1 Kelompok, yang periode pelaporannya tahunan. Pada triwulan II tahun 2024, indikator kinerja ini progresnya pada tahap perencanaan. Capaian fisik pada triwulan I yaitu 5% dengan perhitungan fisik mengacu pada e monev Bappenas.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dan Triwulan II Tahun 2024

Sasaran kegiatan meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong dengan IKU kelompok masyarakat di kawasan konservasi daerah pada wilayah kerja LPSPL Sorong yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru merupakan Sasaran Kegiatan, Indikator, dan Target baru. sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.



3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang ada pada tahun 2024, sehingga belum tercantum dalam dokumen rencana strategis (Renstra) 2020-2024 dan tidak dapat dibandingkan.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi biaya karena memanfaatkan teknologi komunikasi dalam melakukan identifikasi kelompok, sehingga tidak mengeluarkan biaya untuk perjalanan dinas dalam rangka identifikasi kelompok yang akan diberikan pelatihan.

5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

LPSPSPL Sorong memiliki hubungan yang harmonis dan dukungan dari konservasi, Pemerintah Daerah, Kelompok Penggerak Konservasi, dan Satuan Kerja Instansi Pemerintah terkait lainnya di wilayah kerja LPSPSPL Sorong.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Tidak terdapat kendala, kegiatan baru dalam tahap perencanaan disebabkan anggaran yang mendukung kegiatan ini baru buka blokir.

c. Solusi

Untuk mempercepat pencapaian indikator kinerja ini, LPSPSPL Sorong akan melaksanakan kegiatan pada triwulan III.

6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKU 7

Pada triwulan II dilaksanakan revisi buka blokir sehingga anggaran yang mendukung kegiatan ini baru bisa digunakan, pasca buka blokir LPSPSPL Sorong telah melakukan koordinasi dan rapat persiapan untuk melakukan bimbingan teknis atau pemberdayaan masyarakat pada kawasan konservasi perairan di Kabupaten Fak Fak.



7. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini, pada triwulan III akan dilaksanakan bimbingan teknis atau pelatihan terhadap masyarakat yang terdapat pada kawasan konservasi perairan di Kabupaten Fakfak.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan sasaran kegiatan meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong dengan IKU kelompok masyarakat di kawasan konservasi daerah pada wilayah kerja LPSPL Sorong yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (Kelompok), sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar Rp. 0 atau 0% dari pagu anggaran Rp. 300.000.000 yang dapat dilihat pada tabel 3.17. Realisasi anggaran yang masih nihil dikarenakan kegiatan masih dalam tahap perencanaan dan anggaran baru buka blokir secara keseluruhan.

Tabel 3.17 Realisasi Anggaran IKU 7 Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja LPSPL Sorong yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)

No.	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja LPSPL Sorong yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)	300.000.000	0	300.000.000	0%
a.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	300.000.000	0	300.000.000	0%

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2024

3.7 Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja LPSPL Sorong. LPSPL Sorong menjabarkan sasaran kegiatan 7 ini kedalam 1 IKU, yaitu jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Jenis).



3.7.1 IKU 8 Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)

Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi adalah jenis ikan yang diintervensi pengelolaannya melalui pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat/pemulihan populasi, atau penanganan biota dilindungi guna menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan keanekaragaman hayati perairan. Jumlah target jenis LPSPL Sorong yaitu pari manta, penyu, kima, arwana.

Teknik menghitung capaian IKU ini dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan jenis ikan yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat/pemulihan populasi, atau penanganan biota dilindungi di wilayah kerja LPSPL Sorong.

Tabel 3.18 Capaian IKU 8 Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)

SK.7	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong									
IKU.8	Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)									
Realisasi 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra 2020-2024	
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi thd PK	Target s.d 2024	% Capaian thd Renstra 2024
3	7	1	2	2	100%	(-1)	4	50%	23	104,34%

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2024

1. Capaian IKU Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis) Triwulan II Tahun 2024

Target IKU jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja LPSPL Sorong pada tahun 2024 yaitu 4 (empat) Jenis (Pari Manta, Penyu, Kima, dan Arwana). Periode capaian dan periode pelaporan IKU ini adalah triwulanan, pada triwulan II tahun 2024 LPSPL Sorong memiliki target capaian 2 (satu) jenis. Capaian pada triwulan



II tahun 2024 yaitu telah tercapai 2 (dua) jenis (Pari Manta dan Karang), capain tersebut di dukung dari beberapa kegiatan diantaranya: 1) Pendataan dan survei populasi pari manta di Kabupaten Raja Ampat. 2) Rehabilitasi terumbu karang di Provinsi Papua Barat Daya. Capaian tersebut telah disampaikan ketua tim kerja perlindungan dan pelestarian kepada Kepala LPSPL Sorong melalui memorandum.

2. *Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dan Triwulan II Tahun 2024*

Periode pencapaian dan pelaporan indikator kinerja ini yaitu triwulanan. Target indikator kinerja ini pada tahun 2023 sama dengan tahun 2024 yaitu 4 jenis. Pada triwulan II capaian pada tahun 2023 yaitu 3 jenis atau lebih tinggi daripada capaian triwulan II tahun 2024 yaitu 2 jenis. Hal ini disebabkan karena pada triwulan II kegiatan pendataan jenis yang anggarannya bersumber dari PNPB tidak dapat dilaksanakan karena adanya keterbatasan maksimum pencairan (MP).

3. *Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah*

Realisasi IKU jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja LPSPL Sorong sampai dengan tahun 2023 adalah 22 jenis. Dengan demikian, sampai dengan tahun 2023 target renstra 2020-2024 IKU ini telah tercapai 95,65% (22 jenis dari target 23 jenis). Realisasi pada triwulan II tahun 2024 yaitu 2 jenis dari target kinerja 2 (dua) jenis, sehingga sampai dengan triwulan II tahun 2024 capain indikator ini terhadap renstra 2020-2024 yaitu 104,34%.

4. *Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya*

Efisiensi penggunaan sumberdaya manusia dilakukan melalui kemitraan dalam jejaring first responder, kemitraan dengan NGO, pemerintah daerah serta stakeholder lainnya serta mendorong peningkatan peran serta aktif masyarakat dan mitra konservasi keanekaragaman hayati laut. Efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan penggunaan peralatan-peralatan survei yang merupakan BMN LPSPL Sorong (perlengkapan scuba, perlengkapan penanganan mamalia laut dan peralatan jenis ikan



dilindungi/terancam punah), sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pihak lain (sewa).

5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Kapasitas SDM LPSP Sorong yang handal dan tersertifikasi dalam kegiatan monitoring jenis ikan dan giatnya LPSP Sorong dalam melakukan sosialisasi, serta pelibatan mitra konservasi keanekaragaman hayati laut yang terjalin harmonis dan dukungan masyarakat dalam melakukan penanganan mamalia laut terdampar.

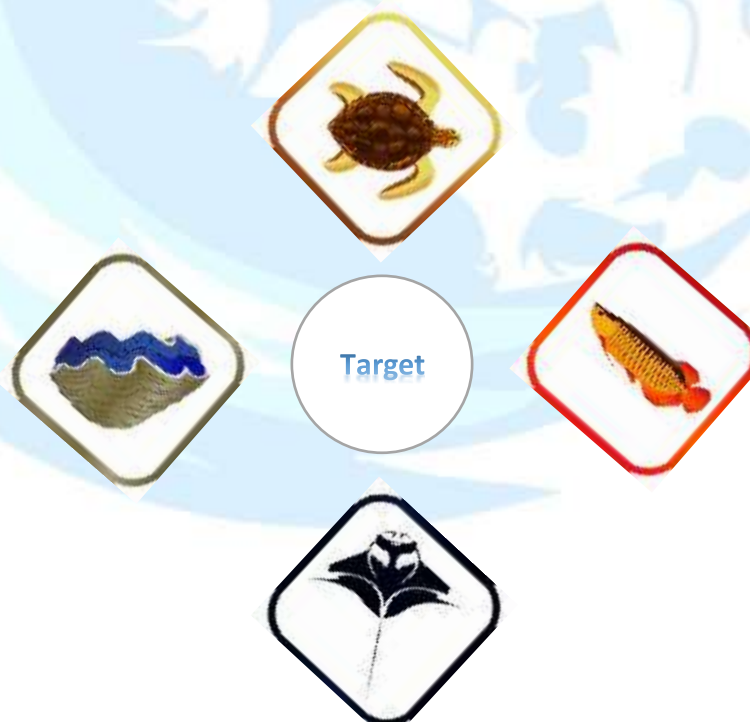
b. Analisis Kegagalan/Kendala

Pada triwulan II penurunan media transplantasi terkendala cuaca dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber pada anggaran PNPB sedikit mengalami keterlambatan disebabkan oleh keterbatasan maksimum pencairan.

c. Solusi

LPSP Sorong bersurat kepada Sesditjen PKRL untuk mempercepat atau merubah maksimum pencairan PNPB.

6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKU 8



Gambar 3.20 Target Jenis LPSP Sorong Tahun 2024.



a. Pendataan Pari Manta di Kabupaten Raja Ampat

Pada Kabupaten Raja Ampat, pari manta merupakan salah satu hewan laut yang paling ingin dijumpai wisatawan, dengan meningkatnya jumlah wisatawan serta operator wisata di Raja Ampat, semakin tinggi pula tekanan yang diberikan aktivitas pariwisata terhadap populasi pari manta. Dalam upaya meningkatkan kualitas, menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pemanfaatan non ekstraktif, serta efektifitas perlindungan yang telah dilakukan maka UPT Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong melakukan survei monitoring ikan pari manta di Perairan Kawasan Konservasi Daerah Kepulauan Raja Ampat, guna memperoleh data kemunculan, informasi kondisi lingkungan biofisik perairan. Tujuan kegiatan ini untuk mengumpulkan data dan informasi (jenis, individu, ukuran, pola warna, dll) terkait kemunculan ikan pari manta di lokasi *cleaning station* / *feeding station* manta, menginventarisasi data biofisik lingkungan perairan di lokasi *cleaning station* pari manta, dan menginventarisasi data sosial ekonomi masyarakat sekitar lokasi kemunculan pari manta.



Gambar 3.21 Pendataan Pari Manta di Kabupaten Raja Ampat.

Hasil dari pendataan dan survei tersebut yaitu teridentifikasi 24 individu dari 28 foto ID dengan rincian 15 individu pari manta yang berkarakteristik *Chevron* dan 9 individu pari manta berkarakter *melanistic*. Hasil pengamatan lewat foto udara (Drone), teridentifikasi 22 kemunculan individu selama kegiatan monitoring disemua lokasi. Pari Manta yang ditemukan memiliki kisaran ukuran Lebar tubuh (jarak antar sirip) sekitar 2,1 – 3,8 Meter, sedangkan ukuran panjang tubuh (jarak dari mulut ke pangkal ekor) sekitar 1,1 – 1,9 Meter.

b. Rehabilitasi Karang di Zona Egek MHA Malaumkarta

Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki ekosistem terumbu karang di Zona Egek MHA Malaumkarta yang mengalami degradasi. Selain itu, rehabilitasi terumbu karang bertujuan untuk meningkatkan kualitas terumbu karang sebagai *coral stock center*. Rehabilitasi yang dilaksanakan dengan cara transplantasi fragmen karang pada media transplantasi yang dikehendaki.



Gambar 3.22 Rehabilitasi Terumbu Karang di Zona Egek MHA Malaumkarta.

Pada tahun 2024, media transplantasi karang yang berhasil diturunkan dan disusun seluruhnya sebanyak 50 media dengan kapasitas bibit karang per media adalah 18 bibit dengan total bibit + 900 bibit karang yang berasal dari famili *Pocilloporidae*, *Acroporidae*, dan *Poritidae*. Media transplantasi diturunkan di area *Coral Stock Center* MHA Malaumkarta di sekitar titik koordinat 131°34'32.77"E dan 0°43'44.58"S.

Adapun kegiatan yang dilakukan serangkaian dengan rehabilitasi terumbu karang yaitu monitoring transplantasi terumbu karang yang diturunkan pada tahun sebelumnya. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan berupa pengamatan terhadap Survival Rate bibit karang di media transplantasi yang telah diturunkan sebelumnya, pemantauan kondisi di sekitar media, pembersihan media, serta pengukuran T0 (panjang awal) bibit karang yang baru ditransplantasi. Survival Rate pada 6 (enam) media spider yang dijadikan media sampel adalah sebesar 51,28%, hal ini terjadi karena sebagian bibit tertimbun pasir, serta terdapat beberapa bibit yang lepas. Pengamatan survival rate terhadap media rak meja, secara umum kondisi masih sangat baik (tidak terganggu arus maupun gelombang) dengan survival rate bibit sebesar 84,72%.



c. Pendataan Kima di Pulau Tidore, Maluku Utara

Pendataan atau monitoring Kima (*Tridacninae*) di Pulau Tidore, Provinsi Maluku Utara dilakukan dalam rangka mendukung pendataan jenis ikan dilindungi dan/atau terancam punah, sebagai upaya pengelolaan jenis ikan dilindungi dan/atau terancam punah di wilayah kerja LPSPL Sorong. Pendataan populasi kima dilakukan dengan menggunakan metode transek garis (*line transect*), yakni dengan mengamati dan mencatat data keberadaan dan ukuran individu kima yang ditemukan di sekitar garis sepanjang 100 meter. Selain pendataan populasi secara langsung, dilakukan juga pengumpulan data sosial dari masyarakat melalui pengisian kuesioner untuk memperoleh data persepsi masyarakat, partisipasi masyarakat dan peran pemerintah.



Gambar 3.23 Pendataan Kima di Pulau Tidore.

Pendataan dilakukan pada 8 (delapan) stasiun pengamatan meliputi stasiun Tugulufa, Trikora, Ake Sahu (Tosa), Mareku, Ome, Rum, Tongowai dan Soasio. Hasil dari delapan stasiun tersebut terdata sebanyak 45 individu. Individu kima yang ditemukan berada pada kedalaman perairan mulai dari 1 – 15 meter di bawah permukaan air laut. Adapun jenis kima yang ditemukan bervariasi meliputi jenis Kima Sisik (*Tridacna squamosa*), Kima Raksasa (*Tridacna gigas*), dan Kima Lubang (*Tridacna crocea*).

d. Pendataan Penyu di Pulau Um, Malaumkarta

Kegiatan monitoring bertujuan untuk mengetahui jumlah sarang, jumlah rata-rata telur pada sarang, dan daya tetas telur hingga produksi tukik. Kegiatan monitoring dilaksanakan di Pulau Um, dimana Pulau Um merupakan pantai peneluran penyu yang memiliki luas pantai sekitar 2,5 Ha. Pendataan mengacu pada Kepdirjen PRL no. 67 tahun 2022 terkait Petunjuk Teknis Pendataan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Apendiks CITES.





Gambar 3.24 Pendataan Penyu di Malaumkarta.

Pendataan penyu di Malaumkarta sampai dengan triwulan II masih dalam tahap pelaksanaan. Hasil pengamatan sementara yaitu terdapat ancaman terhadap sarang penyu di Pulau Um yakni berupa predasi oleh Biawak dan pasang surut, untuk meminimalisasi dampak ancaman, tim enumerator telah membuat demplot sarang relokasi di bagian utara pulau, dan terdapat 33 sarang yang telah direlokasi dengan rentang waktu peneluran 6 April s.d 6 Mei 2024.

Monitoring dilaksanakan dalam dua tahap, yakni monitoring peneluran dan monitoring penetasan. Berdasarkan hasil pendataan, terdapat 21 sarang penyu yang dilakukan pengecekan. Seluruh sarang merupakan sarang Penyu Lekang. Peneluran terjadi pada rentang waktu 17 April s.d 5 Mei 2024. Masih terdapat sekitar 4 sarang yang diperkirakan belum waktunya menetas karena peneluran baru terjadi di akhir Mei hingga awal Juni. Dari 21 sarang yang dilakukan pengecekan, terdapat satu sarang yang memiliki tukik hidup baru menetas sebanyak 8 ekor. Hasil analisis sementara, tingkat daya tetas sarang relokasi penyu lekang di Pulau Um adalah sebesar 72,55%.

e. **Penanganan Biota Dilindungi/Terancam Punah**

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai potensi sumberdaya ikan yang dilindungi dan tidak dilindungi yang sangat besar yang tersebar di seluruh wilayah perairan Indonesia. Salah satu biota dilindungi yaitu mamalia laut, mamalia laut yang berhabitat di lingkungan perairan Inonesia antara dari jenis dugong, paus, dan lumba-lumba. Ancaman utama terhadap spesies ini mencakup penangkapan yang tidak disengaja (*bycatch*), terdampar (*stranded*), perburuan (*whaling*), dan rusaknya habitat laut mereka.





Gambar 3.25 Penanganan Mamalia Laut Terdampar di Wilayah Kerja LPSPL Sorong.

Pada triwulan II LPSPL Sorong telah melaksanakan kegiatan penanganan mamalia laut dan biota laut jenis dilindungi terdampar baik penanganan secara langsung maupun penanganan tidak secara langsung. Pada triwulan II terdapat 3 penanganan diantaranya penanganan secara tidak langsung paus terdampar mati di Perairan Raja Ampat dan dugong terdampar mati di Morotai, penanganan secara langsung dugong terdampar mati di Malaumkarta, dan pendataan terhadap kejadian perburuan penyu di Kabupaten Sorong.

f. Sosialisasi Jenis Ikan di Dilindungi di Wilayah Kerja

Konservasi jenis ikan merupakan salah satu tugas dan fungsi LPSPL Sorong, sebagai upaya dalam konservasi jenis ikan LPSPL Sorong melaksanakan sosialisasi jenis ikan dilindungi sebagai penyadartahuan kepada masyarakat terkait jenis biota laut dilindungi sehingga diharapkan dengan adanya upaya penyadartahuan ini, masyarakat dapat memahami tidak hanya terkait aturan perlindungan biota laut tetapi juga turut berperan aktif dalam menjaga kelestarian biota laut dan ekosistemnya. Pada triwulan II LPSPL Sorong telah melakukan sosialisasi jenis ikan pada 2 lokasi yaitu Negeri Rutong dan Manokwari.



Gambar 3.26 Sosialisasi Jenis Ikan Dilindungi.



g. Kegiatan Pendukung Lainnya

Pada triwulan II, LPSPL Sorong juga melaksanakan beberapa kegiatan lain yang mendukung ketercapaian indikator kinerja ini. Beberapa kegiatan yang diikuti selama triwulan II diantaranya kegiatan pembahasan lanjutan posisi PEMRI pada pertemuan Animals Committe ke-33 CITES, pertemuan pembentukan kelompok kerja peningkatan kapasitas beserta gugus tugasnya, kegiatan penilaian kebutuhan kapasitas dan penyusunan peta jalan pengembangan sumberdaya manusia Provinsi Papua Barat Daya, pemaparan hasil penelitian *climate resilience reef* Raja Ampat, pertemuan rutin tahunan komite pengelola bersama perikanan (KPBP) yang ke-XII, monitoring dan evaluasi implementasi CSC lingkup UPT DJPKRL, dan pengumpulan bahan keterangan kapal Kandas di Perairan Kabupaten Sorong.



Gambar 3.27 Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja 8.

7. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Pada triwulan III akan dilakukan beberapa kegiatan untuk mendukung tercapainya IKU ini, diantaranya monitoring penyu, rehabilitasi terumbu karang, dan penanganan biota laut dilindungi/terancam punah, dan sosialisasi jenis ikan dilindungi.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan sasaran kegiatan meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja LPSPL Sorong dengan IKU jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Jenis), sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar Rp. 259.046.327 atau 43,17% dari pagu anggaran Rp. 600.000.000 yang



dapat dilihat pada tabel 3.19. Pagu anggaran Rp. 600.000.000 bersumber dari rupiah murni sebesar Rp. 450.000.000 dan PNBP sebesar Rp. 150.000.000.

Tabel 3.19 Realisasi Anggaran IKU 8 Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)

No.	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
	Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)	600.000.000	259.046.327	340.953.673	43,17%
a.	Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah	214.151.000	89.591.739	124.559.261	41,84%
b.	Rehabilitasi Populasi Habitat Kritis Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah	105.873.000	57.127.192	48.745.806	53,96%
c.	Respon Cepat Penanganan Biota Dilindungi/Terancam Punah	51.146.000	1.253.500	49.892.500	2,45%
d.	Sosialisasi Biota Dilindungi/Terancam Punah	228.830.000	111.073.896	117.756.104	48,54%

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2024

3.8 Sasaran Kegiatan 8 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja LPSPL Sorong. LPSPL Sorong menjabarkan sasaran kegiatan 8 ini kedalam 1 IKU, yaitu jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja LPSPL Sorong (Jenis).

3.8.1 IKU 9 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)

Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan adalah jenis ikan yang dilakukan upaya pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya, melalui perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/atau *look alike species*, pendampingan/sosialisasi pemanfaatan jenis ikan, pendataan potensi jenis ikan yang dilindungi dan/atau CITES yang dimanfaatkan. Target



jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan adalah Hiu, Pari, Arwana di wilayah kerja LPSPL Sorong.

Teknik menghitung capaian IKU ini dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan melalui Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/atau look alike species, Pendampingan/Sosialisasi pemanfaatan jenis ikan dan/atau Pendataan potensi jenis ikan yang dilindungi dan/atau CITES yang dimanfaatkan di wilayah kerja LPSPL Sorong dalam kurun waktu 1 Tahun.

Tabel 3.20 Capaian IKU 9 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)

SK.8		Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong								
IKU.9		Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)								
Realisasi 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra 2020-2024	
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi thd PK	Target s.d 2024	% Capaian thd Renstra 2024
-	5	-	-	-	-	-	3		14	128,57%

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2024

1. Capaian IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis) Triwulan II Tahun 2024

Target jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja LPSPL Sorong (Jenis) pada tahun 2024 yaitu 3 (tiga) Jenis (Hiu, Pari, Arwana). Periode capaian dan periode pelaporan IKU ini adalah tahunan, pada triwulan II telah dilakukan pelayanan pemanfaatan jenis ikan dengan penerbitan dokumen surat rekomendasi sebanyak 145 dokumen dan dokumen surat angkut jenis ikan dalam negeri (SAJI-DN) sebanyak 100 dokumen. Jenis ikan yang dimanfaatkan adalah hiu, pari, arwana, dan teripang.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dan Triwulan II Tahun 2024

Periode pencapaian dan pelaporan indikator kinerja ini pada tahun 2023 dan 2024 yaitu tahunan. Target indikator kinerja ini pada tahun 2023 yaitu 2 jenis (Hiu dan Pari)



sedangkan target pada tahun 2024 yaitu 3 jenis (Hiu, Pari, Arwana). Pada triwulan II pada tahun 2023 dan 2024 kegiatan ini masih dalam progress pencapaian sehingga belum dapat dibandingkan.

3. *Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah*

Realisasi IKU jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja LPSPL Sorong sampai dengan tahun 2023 adalah 18 jenis. Dengan demikian, sampai dengan tahun 2023 target renstra 2020-2024 IKU ini telah tercapai 128,57% (18 jenis dari target 14 jenis). Realisasi pada triwulan II tahun 2024 masih dalam progress pencapaian, sehingga belum dapat dibandingkan dengan target pada dokumen Renstra 2020-2024.

4. *Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya*

Efisiensi Sumberdaya Anggaran, Manusia, dan Waktu pada Verifikasi Online. Adanya SOP pelayanan jenis yang mengatur jumlah dan kategori produk yang akan di BAP di lokasi/gudang dengan jumlah produk yang di BAP di kantor LPSPL Sorong termasuk pelayanan verifikasi online menyebabkan penghematan dari segi waktu dan beban APBN yang ditimbulkan untuk melakukan verifikasi. Selain itu, LPSPL Sorong terhubung dalam jejaring media sosial (WAG) dengan mitra kerja baik pemerintah maupun pelaku usaha sehingga secara aktif dapat memberi informasi ataupun sosialisasi terkait regulasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi, terancam punah dan appendiks CITES di wilayah kerjanya tanpa bertemu/tatap muka langsung sehingga hal ini menghemat biaya koordinasi.

5. *Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi*

a. Analisis Keberhasilan

Terdapat sosialisasi SOP pelayanan Hiu dan Pari di wilayah kerja LPSPL Sorong kepada pelaku usaha Hiu dan Pari secara berkala, adanya transparansi dalam pelayanan penerbitan SR dan SAJI-DN, pelayanan berbasis aplikasi e-SAJI juga mempermudah dalam melakukan pelayanan, dan selalu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik



kepada para pelaku usaha Hiu dan Pari. Komitmen tersebut tertulis pada Maklumat Pelayanan dan Pakta Integritas. Hal ini juga didukung SDM LPSPL Sorong yang dapat diandalkan/tersertifikasi dalam mengidentifikasi jenis ikan yang dimanfaatkan serta penguasaan penggunaan system aplikasi e-SAJI. Selain itu, nilai indeks kepuasan masyarakat pada triwulan II tahun 2024 pada aplikasi susan KKP adalah 94,25 (sangat baik). Pelayanan LPSPL Sorong juga telah tersertifikasi ISO 9001:2015 dan mendapat predikat pelayanan prima dari Inspektorat Jenderal KKP. Saat ini guna meningkatkan kualitas pelayanan LPSPL Sorong juga sedang berproses untuk tersertifikasi ISO 37001:2016.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Tidak ada kendala dalam pencapaian target ini, namun pada pendataan jenis di Perairan Merauke mengalami perbedaan metode sehingga perlu dilakukan pendataan ulang.

c. Solusi

Belum terdapat kendala dalam pencapaian target ini, namun guna memperoleh data yang sesuai LPSPL Sorong telah berkoordinasi dan memberikan bimbingan teknis dalam pengambilan data pada enumerator.

6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKU 8



Gambar 3.28 Target Pemanfaatan Jenis LPSPL Sorong Tahun 2024.

a. Pemanfaatan Jenis Ikan

Pemanfaatan jenis ikan terdapat dua mekanisme, untuk pemanfaatan jenis ikan *look alike spesies* menggunakan surat rekomendasi sedangkan untuk jenis ikan Appendiks CITES menggunakan surat angkut jenis ikan dalam negeri (SAJI DN). Pada triwulan II tahun 2024 jumlah surat rekomendasi (SR) yang terbit sebanyak 145 dokumen dan dokumen surat angkut jenis ikan dalam negeri (SAJI DN) yang terbit sebanyak 100 dokumen.



b. Pengumpulan Data Potensi dan Status Pemanfaatan Jenis di Maluku

Kegiatan pengumpulan data potensi dan status pemanfaatan jenis di Maluku masih dalam tahap persiapan. Pada tahap persiapan LPSPL Sorong melakukan koordinasi dan pembekalan calon enumerator pendataan jenis ikan hiu dan pari dilakukan dengan menyampaikan latar belakang dilaksanakan pendataan jenis ikan beserta panduan pendataan jenis ikan Hiu dan Pari sesuai dengan Kepdirjen PRL N0. 67 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendataan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES. Pelaksanaan pendataan akan dilakukan pada triwulan III dikarenakan pengaruh musim jenis ikan.



Gambar 3.29 Pembekalan Enumerator Pendataan Jenis Ikan di Dobo.

c. Pengumpulan Data Potensi dan Status Pemanfaatan Jenis di Papua Selatan

Kegiatan pengumpulan data potensi dan status pemanfaatan jenis di Papua Selatan masih dalam tahap persiapan. Pada tahap persiapan LPSPL Sorong melakukan koordinasi dan pembekalan calon enumerator pendataan potensi jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks cites / *look alike species* di Merauke dilakukan pada pelabuhan dan gudang pelaku usaha CV. Surya Maro Sakti. Calon enumerator merupakan Kapten Kapal KMN. Meliora GT 39 milik pelaku usaha CV. Surya Maro Sakti atas nama Bapak Yulianus Martin Parera. Pendataan dengan kapal KMN. Meliora dilaksanakan selama 2-3 bulan (1 kali trip). Pembekalan diberikan dengan materi terkait panduan pendataan dan pengisian form pendataan berdasarkan Kepdirjen PRL 67 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendataan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Terancam dalam Appendiks CITES.





Gambar 3.30 Pembekalan Enumerator Pendataan Jenis Ikan di Merauke.

Pada triwulan II dilakukan pembekalan calon enumerator pendataan potensi jenis ikan yang dilindungi/*appendiks cites/look alike species* trip kapal ke-2, ke-3, dan ke-4. Pembekalan enumerator dilakukan pada armada KMN. Sinar Fajar 02, KMN. Beta Samudera 5, dan KMN. PALMA.

d. Kegiatan Pendukung Lainnya

Pada triwulan II, LPSPL Sorong juga melaksanakan beberapa kegiatan lain yang mendukung ketercapaian indikator kinerja ini. Beberapa kegiatan yang diikuti selama triwulan II diantaranya mengikuti rapat pembahasan usulan rekomendasi kuota pengambilan alam jenis ikan hiu *uplisting* pada COP 19, restocking arwana jardini hasil penangkapan dari alam kuota tahun 2023, pembahasan revisi petunjuk teknis tata cara penetapan kuota pengambilan untuk pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau yang tercantum dalam Appendiks II CITES, pembahasan Penyusunan dokumen ndf jenis ikan kuda laut (*Hippocampus spp.*), dan pembahasan mekanisme pengumpulan data usulan kuota pengambilan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES Tahun 2025.



Gambar 3.31 Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja 9.

7. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Pada triwulan III akan dilakukan beberapa kegiatan untuk mendukung tercapainya IKU ini, diantaranya pelayanan peredaran pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau appendik CITES sebagai rutinitas setiap bulan dan pendataan jenis ikan di Provinsi Maluku dan Provinsi Papua Selatan.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan sasaran kegiatan meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja LPSPL Sorong dengan IKU jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja LPSPL Sorong (Jenis), sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar Rp. 519.804.042 atau 61,15% dari pagu anggaran Rp. 850.000.000 yang dapat dilihat pada tabel 3.21. Pagu anggaran Rp. 850.000.000 bersumber dari rupiah murni sebesar Rp. 260.000.000 dan PNPB sebesar Rp. 590.000.000.

Tabel 3.21 Realisasi Anggaran IKU 9 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)

No.	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)	850.000.000	519.804.042	330.195.958	61,15%
a.	Penyediaan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES	150.000.000	49.595.713	101.404.287	32,40%
b.	Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan appendiks CITES	700.000.000	471.208.329	228.791.671	67,32%

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2024

3.9 Sasaran Kegiatan 9 Terasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan terfasilitasinya pemanfaatan air laut selain energi di wilayah kerja LPSPL Sorong. LPSPL Sorong menjabarkan sasaran kegiatan 9 ini kedalam 1 IKU, yaitu pemanfaatan air laut selain energi yang diidentifikasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)



3.9.1 IKU 10 Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang diidentifikasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)

Pemaanfaatan Air Laut Selain Energi adalah pemanfaatan air laut selain energi yang menghasilkan produk/ekstraksi termasuk yang berasal dari Laut Dalam dengan skala lebih besar dari 50 liter/detik dan/atau berada pada kawasan konservasi serta ditujukan untuk kepentingan komersial skala luas yang memanfaatkan ruang laut secara menetap minimal 30 hari. Identifikasi pemanfaatan air laut selain energi adalah inventarisasi/pengumpulan data dan informasi yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang akan didorong proses perizinannya. Verifikasi pemanfaatan air laut selain energi adalah pemeriksaan untuk memastikan atas kebenaran dokumen dan data pengurusan perizinan air laut selain energi. Verifikasi ini dilakukan apabila terdapat permohonan di OSS.

Teknik menghitung capaian IKU ini dengan cara menginventarisasi dan menghitung jumlah dokumen identifikasi dan/atau verifikasi perizinan pemanfaatan air laut selain energi.

Tabel 3.22 Capaian IKU 10 Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang diidentifikasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)

SK.9 Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong										
IKU.10 Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang diidentifikasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)										
Realisasi 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra 2020-2024	
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi thd PK	Target s.d 2024	% Capaian thd Renstra 2024
-	-	-	-	-	-	-	1			

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2024

1. Capaian IKU Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang diidentifikasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen) Triwulan II Tahun 2024

Target pemanfaatan air laut selain energi yang diidentifikasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen) pada tahun 2024 yaitu 1 (satu) dokumen. Periode capaian dan periode pelaporan IKU ini adalah adalah tahunan, pada triwulan II telah dilakukan sosialisasi pemanfaatan air laut selain energi di Kabupaten Sorong. Sehingga capaian fisik pada triwulan II yaitu 70% dengan perhitungan fisik mengacu pada e monev Bappenas.



2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dan Triwulan II Tahun 2024

Sasaran Kegiatan terfasilitasinya pemanfaatan air laut selain energi di wilayah kerja LPSPL Sorong dengan IKU pemanfaatan air laut selain energi yang diidentifikasi di wilayah kerja LPSPL Sorong merupakan Sasaran Kegiatan, Indikator, dan Target baru. sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang ada pada tahun 2024, sehingga belum tercantum dalam dokumen rencana strategis (Renstra) 2020-2024 dan tidak dapat dibandingkan.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan. Efisiensi anggaran disebabkan LPSPL Sorong dalam melakukan sosialisasi dapat dilakukan secara luring maupun daring serta kegiatan identifikasi pemanfaatan air laut selain energi dapat dilakukan dengan bantuan pengolahan citra.

5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Ketercapaian target ini didukung oleh beberapa faktor diantaranya sumberdaya manusia (SDM) LPSPL Sorong telah mengikuti sosialisasi terkait pemanfaatan air laut selain energi serta merupakan jabatan fungsional analis perusahaan jasa kelautan (APJK) sehingga kompetensinya menunjang pelaksanaan kegiatan, koordinasi aktif dengan dengan Direktorat Jasa Kelautan, serta Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Tidak ada kendala dalam pencapaian target ini. Indikator kinerja ini merupakan kegiatan yang bersumber pada anggaran PNBK, sehingga sedikit mengalami keterlambatan disebabkan oleh keterbatasan maksimum pencairan.



c. Solusi

LPSPL Sorong bersurat kepada Sesditjen PKRL untuk mempercepat atau merubah maksimum pencairan PNPB.

6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKU 10

a. Sosialisasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi

Kegiatan sosialisasi perusahaan jasa kelautan ALSE KBLI 36001 & 36002 dilaksanakan di Kabupaten Sorong. Adapun definisi dari KBLI 36001 & 36002 adalah pemanfaatan air laut selain energi yang berupa non-produk/layanan (KBLI 36002: Penampungan dan penyaluran air baku) dan produk (KBLI 36001: Penampungan penjernihan dan penyaluran air minum).



Gambar 3.32 Sosialisasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi.

b. Kunjungan Lapangan Identifikasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi

LPSPL Sorong melakukan kunjungan lapangan kepada PT Indonesia Power Services yang berlokasi di kampung Arar, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong. Kunjungan dilakukan dalam rangka identifikasi pemanfaatan air laut selain energi sesuai dengan mandat PP No 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko yang menyebutkan pada pasal 24 ayat 2 huruf (f) tentang pemanfaatan air laut selain energi, dimana PLTMG MPP Sorong 50MW adalah perusahaan pembangkit listrik yang menggunakan *supply* gas yang berasal dari pipa darat.

Adapun hasil dari identifikasi lapangan yang dilakukan LPSPL Sorong, ditemukan bahwa PT. Indonesia Power Services tidak menggunakan air laut dalam operasional

pembangkit listrik. PLTMG MMP Sorong 50 MW memanfaatkan air tanah sebagai *cooling water* dimana pendaftaran perizinan didaftarkan dengan nomor KBLI 36002.



Gambar 3.33 Identifikasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi.

7. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Pada triwulan III akan dilakukan kegiatan untuk mendukung tercapainya IKU ini, yaitu melakukan identifikasi lapangan terhadap pemanfaatan air laut selain energi.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan sasaran kegiatan terfasilitasinya pemanfaatan air laut selain energi di wilayah kerja LPSPL Sorong dengan IKU pemanfaatan air laut selain energi yang diidentifikasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen), sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar Rp. 5.871.000 atau 11,74% dari pagu anggaran Rp. 50.000.000 yang bersumber dari PNPB yang dapat dilihat pada tabel 3.23.

Tabel 3.23 Realisasi Anggaran IKU 10 Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang diidentifikasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)

No.	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang diidentifikasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)	50.000.000	5.871.000	44.129.000	11,74%
a.	Pengelolaan dan Pemetaan Potensi Pemanfaatan Air Laut	50.000.000	5.871.000	44.129.000	11,74%

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2024



3.10 Sasaran Kegiatan 10 Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran, LPSPL Sorong menjabarkan sasaran kegiatan 10 ini kedalam 1 IKU, yaitu kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di wilayah kerja LPSPL Sorong (Kawasan).

3.10.1 IKU 11 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja LPSPL Sorong

Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja LPSPL Sorong adalah Kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil yang dilakukan upaya penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Padang melalui Gerakan Bulan Cinta Laut (BCL). Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil merujuk pada satuan wilayah Kabupaten/Kota. Bulan Cinta Laut merupakan salah satu program prioritas Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pengelolaan sampah plastik di Laut. Bulan Cinta Laut ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengendalian sampah plastik yang masuk laut dan mengenalkan upaya-upaya penanggulangan dan pengendalian sampah plastik untuk nantinya dapat diadopsi oleh masyarakat.

Teknik menghitung capaian IKU ini dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan kegiatan gerakan bebas sampah di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berupa Bulan Cinta Laut (BCL).

Tabel 3.24 Capaian IKU 11 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kawasan)

SK.10	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran									
IKU.11	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kawasan)									
Realisasi 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra 2020-2024	
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi thd PK	Target s.d 2024	% Capaian thd Renstra 2024
-	-	-	-	-	-	-	4			

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2024



1. Capaian IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kawasan) Triwulan II Tahun 2024

IKU kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di wilayah kerja LPSPL Sorong (Kawasan) merupakan IKU Baru. Target Kinerja yang ditetapkan sesuai Perjanjian Kinerja LPSPL Sorong tahun 2024 adalah 4 kawasan, yang periode pelaporannya tahunan. Pada triwulan II tahun 2024, indikator kinerja ini progresnya pada tahap pelaksanaan. Capaian fisik pada triwulan II yaitu 95% dengan perhitungan fisik mengacu pada e monev Bappenas.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dan Triwulan II Tahun 2024

Sasaran kegiatan meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran dengan IKU kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di wilayah kerja LPSPL Sorong merupakan Sasaran Kegiatan, Indikator, dan Target baru. sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang ada pada tahun 2024, sehingga belum tercantum dalam dokumen rencana strategis (Renstra) 2020-2024 dan tidak dapat dibandingkan.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan. Efisiensi anggaran disebabkan LPSPL Sorong memiliki satuan kerja di beberapa Provinsi sehingga meminimalkan belanja perjalanan dinas.

5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

d. Analisis Keberhasilan

LPSPL Sorong memiliki hubungan yang harmonis dan dukungan dari Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Instansi Pemerintah terkait lainnya di wilayah kerja LPSPL



Sorong. Selain itu, pada tahun sebelumnya LPSPL Sorong pernah melaksanakan kegiatan serupa.

e. Analisis Kegagalan/Kendala

Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan indikator kinerja ini.

f. Solusi

LPSPL Sorong aktif dalam melakukan pendampingan terhadap nelayan dalam pelaksanaan gerakan nasional bulan cinta laut melalui kegiatan sosialisasi maupun bimbingan teknis pelaksanaan gerakan nasional bulan cinta laut.

6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKU 11

a. Maluku Utara

LPSPL Sorong telah melakukan beberapa kegiatan tahapan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini diantaranya identifikasi awal calon lokasi kelompok nelayan dan verifikasi data nelayan peserta bulan cinta laut. Identifikasi awal calon lokasi kelompok nelayan di Maluku Utara dilakukan di Kelurahan Makassar Timur, Kelurahan Gamala, Kelurahan Kayu Merah, Kelurahan Sasa, Kelurahan Fitu, Kelurahan Jambula dan Kelurahan Kastela. Dalam pelaksanaan kegiatan telah dilakukan identifikasi sebanyak 10 Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan tangkap yang terdiri dari KUB Ngolo Macahaya berjumlah 8 orang di Kelurahan Makassar Timur, KUB Fitu Raya berjumlah 8 orang di Kelurahan Fitu, KUB Wafiq Putra berjumlah 7 orang di Kelurahan Kastela, KUB Tanjung Selatan I berjumlah 13 orang di Kelurahan Sasa, KUB Gosa Laha berjumlah 13 orang di Kelurahan Sasa, KUB Sinar Rejeki berjumlah 13 orang di Kelurahan Sasa, KUB Berkah berjumlah 21 orang di Kelurahan Kayu Merah, KUB Marimoi Jaya berjumlah 25 orang di Kelurahan Jambula, KUB Kahacina berjumlah 17 orang di Kelurahan Jambulan, dan KUB Compact berjumlah 16 orang di Kelurahan Jambula. Hasil verifikasi data nelayan pasca identifikasi yaitu tenaga kerja yang terlibat gerakan nasional bulan cinta laut pada Provinsi Maluku Utara sebanyak 80 orang anggota nelayan yang berasal dari satu kelompok nelayan di Kelurahan Kayu Merah, satu kelompok nelayan di Kelurahan Fitu dan tiga kelompok nelayan di Kelurahan Jambula.

Pasca verifikasi kelompok atau peserta gerakan nasional bulan cinta laut, LPSPL Sorong melaksanakan sosialisasi mekanisme pelaksanaan gerakan nasional bulan



cinta laut (BCL). Kegiatan tersebut merupakan pembukaan pelaksanaan kegiatan BCL yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat terhadap pengelolaan sampah khususnya di pesisir laut. Selain itu pada kegiatan sosialisasi juga dilakukan pembagian alat berupa karung yang nantinya akan digunakan dalam proses pengumpulan sampah di pesisir dan laut dan diinformasikan kembali untuk penimbangan sampah.



Gambar 3.34 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan Penimbangan Sampah Bulan Cinta Laut di Maluku Utara.

Kegiatan penimbangan sampah dilakukan secara periodik, pada periode sampai dengan triwulan II telah dilakukan penimbangan sampah sebanyak 6 kali dengan total sampah terkumpul sebanyak 10.072 kg dengan sampah circular sebanyak 6.225 kg. Selama kegiatan bulan cinta laut berlangsung LPSPL Sorong juga memberikan bimbingan teknis sebanyak 3 kali kepada peserta kegiatan BCL. Bimbingan teknis kesatu disampaikan materi terkait kebijakan pemerintah terkait pengurangan dan penanganan sampah serta sumber timbulan sampah dan dampaknya. Bimbingan teknis kedua disampaikan mengenai upaya pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pada bimtek terakhir atau ketiga peserta BCL menerima materi terkait teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah berbasis 3R (*Recycle, Reuse, Reduce*).

b. Maluku

LPSPL Sorong telah melakukan beberapa kegiatan tahapan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini diantaranya identifikasi awal calon lokasi kelompok nelayan dan verifikasi data nelayan peserta bulan cinta laut. Identifikasi awal calon lokasi kelompok nelayan di Maluku dilakukan di 3 Desa yakni Desa Waiheru, Desa



Poka, dan Desa Hative Besar. Dalam identifikasi di Desa Waiheru diusulkan untuk menjadi peserta Gernas BCL di Desa Waiheru sebanyak 26 orang yang terdiri dari 1 orang perwakilan setiap POKDAKAN dan kelompok Ibu-Ibu istri dari anggota POKDAKAN. Identifikasi di Desa Poka diusulkan sebanyak 44 orang yakni 26 orang dari 4 POKDAKAN (Suli Indah, Lalosi, Kakap Putih, dan Avishai) dan 18 orang dari 2 kelompok ibu-ibu istri dari anggota POKDAKAN. Identifikasi di Desa Hative Besar diusulkan sebanyak 10 nelayan yang terdiri dari 2 kelompok nelayan, yakni Kelompok V4 sebanyak 6 orang dan Kelompok Suara Hati sebanyak 4 orang. Hasil verifikasi data nelayan pasca identifikasi yaitu tenaga kerja yang terlibat gerakan nasional bulan cinta laut pada Provinsi Maluku terdiri dari Desa Poka, Desa Hative Besar, dan Desa Waiheru dengan total sebanyak 80 orang. Peserta di Desa Poka sebanyak 45 orang, Desa Hative Besar 10 orang, dan Desa Waiheru 25 orang. Pada lokasi Desa Poka terdapat 6 kelompok yakni 4 Pokdakan dan 2 Kelompok Ibu-Ibu, untuk Desa Hative Besar terdapat 2 kelompok nelayan, dan untuk Desa Waiheru terdiri dari 1 Kelompok Ibu-Ibu.

Pasca verifikasi kelompok atau peserta gerakan nasional bulan cinta laut, LPSPL Sorong melaksanakan sosialisasi mekanisme pelaksanaan gerakan nasional bulan cinta laut (BCL). Kegiatan tersebut merupakan pembukaan pelaksanaan kegiatan BCL yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat terhadap pengelolaan sampah khususnya di pesisir laut. Selain itu pada kegiatan sosialisasi juga dilakukan pembagian alat berupa karung yang nantinya akan digunakan dalam proses pengumpulan sampah di pesisir dan laut dan diinformasikan kembali untuk penimbangan sampah.



Gambar 3.35 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan Penimbangan Sampah Bulan Cinta Laut di Maluku.



Kegiatan penimbangan sampah dilakukan secara periodik, pada periode sampai dengan triwulan II telah dilakukan penimbangan sampah sebanyak 6 kali dengan total sampah yang terkumpul sebanyak 2.659,60 kg dengan sampah circular sebanyak 2.609,0 kg. Selama kegiatan bulan cinta laut berlangsung LPSPL Sorong juga memberikan bimbingan teknis sebanyak 3 kali kepada peserta kegiatan BCL. Bimbingan teknis kesatu disampaikan materi terkait pengenalan jenis sampah dan manajemen pengelolaannya. Bimbingan teknis kedua disampaikan mengenai upaya pengolahan dan pemanfaatan sampah. Pada bimtek terakhir atau ketiga peserta BCL melakukan praktek pengolahan sampah organik (*Eco-soap* dan *Eco-Enzyme*).

c. Papua Barat Daya

LPSPL Sorong telah melakukan beberapa kegiatan tahapan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini diantaranya identifikasi awal calon lokasi kelompok nelayan dan verifikasi data nelayan peserta bulan cinta laut. Identifikasi awal calon lokasi kelompok nelayan di Papua Barat Daya, dalam identifikasi tersebut terdata 7 kelompok – 20 kelompok (80 orang). Hasil verifikasi data nelayan pasca identifikasi yaitu tenaga kerja yang terlibat gerakan nasional bulan cinta laut pada Provinsi Papua Barat Daya terdiri dari Distrik Maladumes sebanyak 20 orang, Distrik Sorong Barat sebanyak 10 orang, Distrik Sorong Timur sebanyak 10 orang, Distrik Sorong Manoi sebanyak 40 orang, dengan total 10 kelompok nelayan dari 4 distrik tersebut.

Pasca verifikasi kelompok atau peserta gerakan nasional bulan cinta laut, LPSPL Sorong melaksanakan sosialisasi mekanisme pelaksanaan gerakan nasional bulan cinta laut (BCL). Kegiatan tersebut merupakan pembukaan pelaksanaan kegiatan BCL yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat terhadap pengelolaan sampah khususnya di pesisir laut. Selain itu pada kegiatan sosialisasi juga dilakukan pembagian alat berupa karung yang nantinya akan digunakan dalam proses pengumpulan sampah di pesisir dan laut dan diinformasikan kembali untuk penimbangan sampah.





Gambar 3.36 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan Penimbangan Sampah Bulan Cinta Laut di Papua Barat Daya.

Kegiatan penimbangan sampah dilakukan secara periodik, pada periode sampai dengan triwulan II telah dilakukan penimbangan sampah sebanyak 6 kali dengan total sampah terkumpul sebanyak 1.515,74 kg dengan sampah circular sebanyak 1441 kg. Selama kegiatan bulan cinta laut berlangsung LPSPL Sorong juga memberikan bimbingan teknis sebanyak 3 kali kepada peserta kegiatan BCL. Bimbingan teknis kesatu disampaikan materi terkait sumber timbulan sampah beserta dampaknya dan sosialisasi jenis ikan dilindungi atau appendiks CITES. Bimbingan teknis kedua dan ketiga disampaikan mengenai cara pengolahan sampah plastic menjadi barang yang bermanfaat atau memiliki nilai jual seperti kerajinan tangan.

d. Papua Selatan

LPSPL Sorong telah melakukan beberapa kegiatan tahapan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini diantaranya identifikasi awal calon lokasi kelompok nelayan dan verifikasi data nelayan peserta bulan cinta laut. Identifikasi awal calon lokasi kelompok nelayan di Papua Selatan, dalam identifikasi tersebut terdata 7 kelompok nelayan tangkap (69 orang). Hasil verifikasi data nelayan pasca identifikasi yaitu tenaga kerja yang terlibat gerakan nasional bulan cinta laut pada Provinsi Papua Selatan sebanyak 80 Nelayan terdiri atas, 1 kelompok Nelayan (KUB), 7 kelompok Pengolahan Hasil Perikanan, 1 Kelompok Pokmaswas dan 30 nelayan mandiri.





Gambar 3.37 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan Penimbangan Sampah Bulan Cinta Laut di Papua Selatan.

Pasca verifikasi kelompok atau peserta gerakan nasional bulan cinta laut, LPSPL Sorong melaksanakan sosialisasi mekanisme pelaksanaan gerakan nasional bulan cinta laut (BCL). Kegiatan tersebut merupakan pembukaan pelaksanaan kegiatan BCL yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat terhadap pengelolaan sampah khususnya di pesisir laut. Selain itu pada kegiatan sosialisasi juga dilakukan pembagian alat berupa karung yang nantinya akan digunakan dalam proses pengumpulan sampah di pesisir dan laut dan diinformasikan kembali untuk penimbangan sampah.

Kegiatan penimbangan sampah dilakukan secara periodik, pada periode sampai dengan triwulan II telah dilakukan penimbangan sampah sebanyak 6 kali dengan total sampah terkumpul sebanyak 10.127,6 kg dengan sampah circular 1.463,2 kg. Selama kegiatan bulan cinta laut berlangsung LPSPL Sorong juga memberikan bimbingan teknis sebanyak 3 kali kepada peserta kegiatan BCL. Bimbingan teknis kesatu disampaikan materi terkait kebijakan pemerintah terkait pengurangan dan penanganan sampah serta sumber timbulan sampah dan dampaknya. Bimbingan teknis kedua disampaikan mengenai upaya pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pada bimtek terakhir atau ketiga peserta BCL menerima materi terkait teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah berbasis 3R (*Recycle, Reuse, Reduce*) dan pelatihan pembuatan ecobrick.



e. Kegiatan Pendukung Lainnya

Adapun beberapa kegiatan yang diikuti oleh LPSPL Sorong dalam rangka mendukung gerakan nasional bulan cinta laut yaitu aksi bersih pantai dalam rangka hari laut sedunia yang jatuh pada tanggal 8 juni.



Gambar 3.38 Aksi Bersih Pantai di Wilayah Kerja LPSPL Sorong.

7. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Pada triwulan III tahun 2024 untuk mendukung pencapaian IKU ini, akan dilaksanakan penimbangan sampah dan penutupan gerakan nasional bulan cinta laut.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan sasaran kegiatan meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran dengan IKU kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di wilayah kerja LPSPL Sorong (Kawasan), sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar Rp. 532.544.790 atau 66,57% dari pagu anggaran Rp. 800.000.000 yang dapat dilihat pada tabel 3.25.



Tabel 3.25 Realisasi Anggaran IKU 11 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kawasan)

No.	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kawasan))	800.000.000	532.544.790	267.455.210	66,57%
a.	Bulan Cinta Laut BCL	800.000.000	532.544.790	267.455.210	66,57%

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2024

3.11 Sasaran Kegiatan 11 Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup LPSPL Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup lpspl sorong, maka LPSPL Sorong menjabarkan dalam 11 IKM, yaitu (i) IKM 12 nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai), (ii) IKM 13 nilai kinerja anggaran lingkup LPSPL Sorong (Nilai), (iii) IKM 14 nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di LPSPL Sorong (Nilai), (iv) IKM 15 indeks profesionalitas ASN lingkup LPSPL Sorong (Indeks), (v) IKM 16 nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong (Nilai), (vi) IKM 17 laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen), (vii) IKM 18 persentase unit kerja lingkup lpspl sorong yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%), (viii) IKM 19 persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup LPSPL Sorong yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) (ix) IKM 20 persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup LPSPL Sorong (%), (x) IKM 21 tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup LPSPL Sorong (%), (xi) IKM 22 nilai pengawasan internal kearsipan lingkup LPSPL Sorong (Nilai).

3.11.1 IKM 12 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Indikator tersebut antara lain Revisi DIPA (10%), Deviasi Halaman III DIPA (10%), Data Kontrak (10%),



Penyelesaian Tagihan (10%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), Dispensasi SPM (5%), Penyerapan Anggaran (20%), dan Capaian Output (25%).

Tabel 3.26 Capaian IKM 12 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSP Sorong (Nilai)

SK.11	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup LPSP Sorong									
IKU.12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSP Sorong (Nilai)									
Realisasi 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra 2020-2024	
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi thd PK	Target s.d 2024	% Capaian thd Renstra 2024
88,69	91,83	-	83	97,97	118,04%	(+9,28)	93,76	104,49%	91	107,65%

Sumber Data: LPSP Sorong, per 30 Juni 2024

1. Capaian IKM Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSP Sorong (Nilai) Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan aplikasi OMSPAN pada <https://spanint.kemenkeu.go.id> bahwa nilai IKPA LPSP Sorong sampai dengan triwulan II atau semester I yaitu 97,97. Periode pencapaian target dan periode pelaporan capaian IKM ini adalah semesteran dengan target semester I adalah 83 dan target semester II adalah 93,76 sehingga pada semester I capaiannya 118,04% dari target semester I.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sangat Bagus: 75%

No	Kode KPN	Kode SK	Kode Subsk	Uraian Subsk	Keterangan	Realisasi Pelaksanaan Anggaran		Realisasi Pelaksanaan Anggaran				Realisasi Target Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Kesesuaian Rasio	Dipenuhi atau (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Kesesuaian Rasio)
						Revisi DIPA	Revisi Rulensi di DIPA	Penyerapan Anggaran	Saluran Kontribusi	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	006	032	47740	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	Nilai	100.00	92.40	96.03	100.00	100.00	93.42	100.00	97.97	100%	0.00	97.97
					Saldo	10	10	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	110.00	102.40	116.03	110.00	110.00	103.42	125.00				
					Nilai Akhir	96.00		96.00				100.00				

Gambar 3.39 Nilai IKPA Triwulan II Tahun 2024. (Sumber: Aplikasi OMSPAN per 30 Juni 2024)



2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dan Triwulan II Tahun 2024

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong pada triwulan II tahun 2024 yaitu 97,97. Hal ini menunjukkan bahwa nilai indikator pelaksanaan anggaran LPSPL Sorong pada triwulan II tahun 2024 lebih tinggi dari nilai IKPA pada triwulan II tahun 2023.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi nilai IKPA LPSPL Sorong pada triwulan II tahun 2024 yaitu 97,97, sedangkan target nilai posisi akhir dalam renstra 2020-2024 adalah 91 sehingga capaian pada triwulan II tahun 2024 sudah tercapai 107,65% atau sudah di atas target nilai posisi akhir renstra 2020-2024.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi sumberdaya anggaran. IKPA digunakan dalam mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran. Efisiensi anggaran terlihat bahwa target kinerja telah dilaksanakan namun terdapat sisa anggaran.

5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

LPSPL Sorong memiliki komitmen untuk memperbaiki kualitas perencanaan anggaran melalui pelaksanaan revisi DIPA; menjaga kualitas pelaksanaan anggaran melalui monitoring penyerapan anggaran setiap bulan, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP-TUP dan dispensasi SPM serta berusaha meningkatkan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memaksimalkan capaian output. LPSPL Sorong secara rutin melakukan monitoring capaian output dengan perencanaan dan realisasi anggaran setiap bulannya melalui rapat bulanan.



b. Analisis Kegagalan/Kendala

Pada triwulan II nilai pada komponen deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, dan pengelolaan UP TUP tidak maksimal, sehingga nilai IKPA LPSPL Sorong pada triwulan II tidak maksimal. Halaman III DIPA tidak maksimal disebabkan oleh adanya deviasi pada belanja 52 dan belanja 53. Pengelolaan UP TUP tidak maksimal disebabkan oleh keterlambatan pertanggungjawaban UP TUP. Penyerapan anggaran tidak maksimal pada bulan Juni.

c. Solusi

LPSPL Sorong melakukan monitoring secara berkala terkait deviasi halaman III DIPA dan melakukan revisi halaman III DIPA secara periodik. LPSPL Sorong berkomitmen dalam melakukan penyerapan anggaran sesuai target yang telah ditetapkan serta tidak terlambat dalam pertanggungjawaban UP TUP.

6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKM 12

LPSPL Sorong melakukan monitoring halaman III DIPA dan penyerapan anggaran secara berkala dan dihitung secara bulanan. Pada triwulan II deviasi halaman III DIPA sebesar 92,40 hal ini diakibatkan adanya deviasi belanja 52 pada bulan April dan bulan Juni serta deviasi belanja 53 pada bulan Juni. Hal ini dapat digunakan dasar evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan terutama pada belanja 53. Untuk komponen penyerapan anggaran LPSPL Sorong pada triwulan II tidak berhasil mencapai target penyerapan yang ditargetkan hal ini karena ada keterbatasan maksimum pencairan pada anggaran bersumber dari PNBP.



Deviasi			Deviasi Tertimbang			Deviasi Seluruh Jenis Belanja	Total Deviasi DIPA	Nilai IKPA
51	52	53	51	52	53			
$k = (d-a)/a$	$l = (e-b)/b$	$m = (f-c)/c$	$n = k \times g$	$o = l \times h$	$p = m \times i$	$q = n + o + p$	r	s
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00
2,73	36,00	0,00	0,94	22,36	0	23,30	11,65	88,35
-	-	100,00	-	-	3,47	3,47	8,92	91,08
0,07	9,81	0,00	0,03	6,09	0	6,12	8,22	91,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	6,58	93,42
0,56	14,58	100	0,19	9,06	3,47	12,72	7,60	92,40

Gambar 3.40 Deviasi Halaman III DIPA LPSPL Sorong.



Pada gambar 3.40 dapat kita lihat bahwa pada bulan April terdapat deviasi belanja 52 pada klasifikasi rincian output (KRO) PBT dan KRO EBA. Sedangkan pada bulan Juni terdapat deviasi halaman III DIPA pada belanja 52 dan belanja 53. Belanja 52 terdapat deviasi sebesar 14,58% hal ini disebabkan oleh beberapa kegiatan yang pelaksanaan kegiatan yang serapannya tidak sesuai dengan rencana penarikan dana. Sedangkan belanja 53 terdapat deviasi sebesar 100% atau tidak terserap, hal ini disebabkan belanja 53 bersumber pada anggaran PNPB yang terkendala oleh maksimum pencairan.

7. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Pada triwulan III akan dilakukan pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI, melakukan revisi POK dan halaman III DIPA untuk acuan pelaksanaan kegiatan pada triwulan III. LPSPL Sorong akan melaksanakan belanja 53 atau kontraktual sehingga berpengaruh pada nilai IKPA.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup LPSPL Sorong dengan IKM nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai), sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar Rp. 68.109.848 atau 37,45% dari pagu anggaran Rp. 181.854.000 yang dapat dilihat pada tabel 3.27. Indikator kinerja ini didukung dari komponen layanan BMN dan perencanaan program dan anggaran. Pagu komponen layanan BMN sebesar Rp. 121.186.000 terdapat blokir sebesar Rp. 31.186.000.

Tabel 3.27 Realisasi Anggaran IKM 12 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

No.	IKM	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	181.854.000	68.109.848	113.744.152	37,45%
a.	Layanan BMN	90.000.000	35.505.855	54.494.145	39,45%
b.	Perencanaan Program dan Anggaran	91.854.000	32.603.993	59.250.007	35,50%

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2024

3.11.2 IKM 13 Nilai Kinerja Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

Dasar Hukum pelaksanaan penilaian kinerja anggaran adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi:

- Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Pada level satuan kerja, cakupan evaluasi kinerja mencakup Aspek Implementasi.
- Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/Lembaga.
- Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

- Sangat Baik, apabila $NKA > 90$;
- Baik, apabila $NKA > 80 - 90$;
- Cukup, apabila $NKA > 60 - 80$;
- Kurang, apabila $NKA > 50 - 60$;
- Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Nilai kinerja anggaran tingkat satuan kerja Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor 22/PMK.02/2021 dihitung berdasarkan nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja terkait, yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai capaian kinerja anggaran setiap variabel aspek implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada tingkat unit eselon I atau satuan kerja yang terdiri atas:

- capaian output sebesar 43,5% (empat puluh tiga koma lima persen);
- efisiensi sebesar 28,6% (dua puluh delapan koma enam persen);



- c. konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2% (delapan belas koma dua persen); dan
- d. penyerapan anggaran sebesar 9,7% (Sembilan koma tujuh persen)

Capaian NKA tersebut diperoleh dari data target capaian (input) dan realisasi capaian (output) kegiatan dan anggaran yang dimasukan setiap satker lingkup K/L ke dalam aplikasi SMART yang dikelola oleh Kemenkeu. Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satker kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi SMART dapat diakses melalui link <https://smart.kemenkeu.go.id>.

Tabel 3.28 Capaian IKM 13 Nilai Kinerja Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

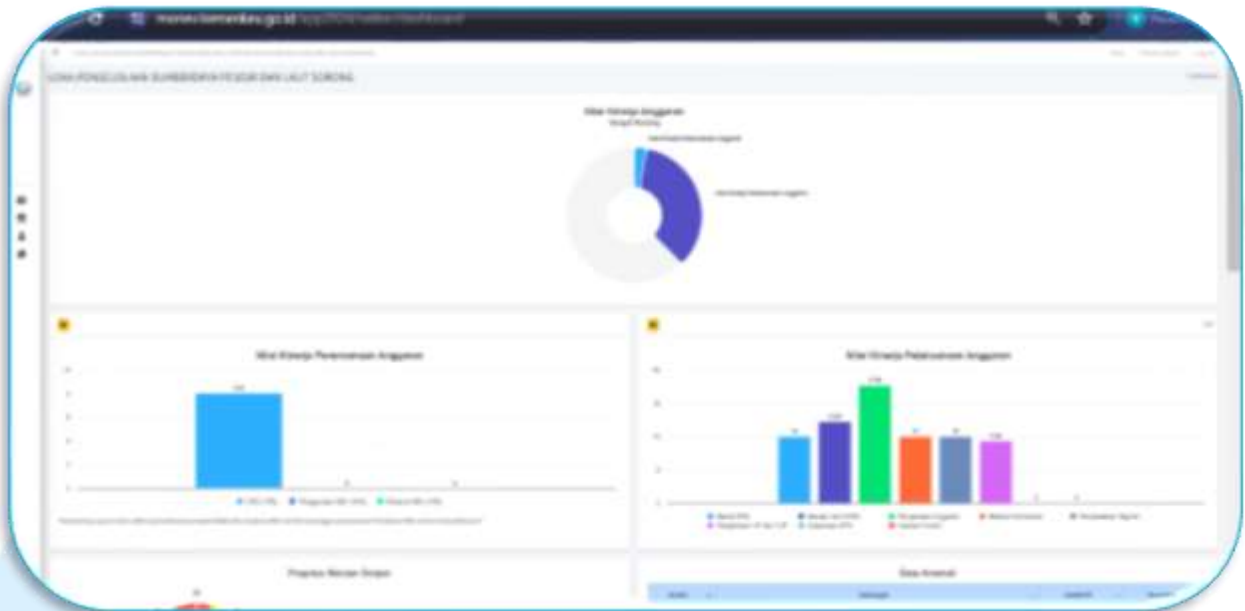
SK.11 Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup LPSPL Sorong										
IKU.13 Nilai Kinerja Anggaran lingkup LPSPL Sorong (Nilai)										
Realisasi 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra 2020-2024	
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi thd PK	Target s.d 2024	% Capaian thd Renstra 2024
-	92,11	-	-	-	-	-	86		89	

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2024

1. Capaian IKM Nilai Kinerja Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai) Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan aplikasi DJA SMART pada <https://monev.kemenkeu.go.id/> bahwa nilai kinerja anggaran LPSPL Sorong sampai dengan triwulan II masih dalam kategori sangat kurang. Periode pencapaian target dan periode pelaporan capaian IKM ini adalah tahunan dengan target adalah 86, sehingga sampai dengan triwulan II belum diisi capaiannya pada aplikasi kinerjaku dan belum dapat dihitung persentase capaiannya karena masih proses pencapaian. Nilai pada triwulan II tahun 2024 merupakan nilai yang diperoleh dari reformulasi nilai kinerja anggaran.





Gambar 3.41 Nilai Kinerja Anggaran Triwulan II Tahun 2024. (Sumber: Aplikasi DJA SMART 2 Juli 2024)

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dan Triwulan II Tahun 2024

Periode pencapaian dan pelaporan indikator kinerja ini pada tahun 2023 dan 2024 yaitu tahunan. Pada triwulan II pada tahun 2023 dan 2024 kegiatan ini masih dalam progress pencapaian sehingga belum dapat dibandingkan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi IKM nilai kinerja anggaran lingkup LPSPSPL Sorong pada triwulan II tahun 2024 masih dalam progress pencapaian, sehingga belum dapat dibandingkan dengan target pada dokumen Renstra 2020-2024.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi sumberdaya anggaran. Apabila nilai kinerja anggaran LPSPSPL Sorong dalam kategori baik maka terdapat efisiensi anggaran yang tercipta dari serapan anggaran dalam mencapai output terhadap standar biaya keluaran (SBK).



5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

LPSP Sorong secara rutin mengontrol realisasi anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan dan mengisi secara bertahap capaian pada aplikasi SAKTI. Selain itu, SDM LPSP Sorong telah mengikuti bimbingan teknis terkait mengelola aplikasi SMART DJA. Selain itu setiap triwulan LPSP melakukan revisi atau penyesuaian halaman III DIPA untuk meningkatkan nilai pelaksanaan anggaran.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Adanya reformulasi baru dari Kementerian Keuangan terkait perhitungan nilai kinerja anggaran maka teridentifikasi potensi tidak tercapainya nilai kinerja anggaran pada tahun 2024.

c. Solusi

LPSP Sorong berkoordinasi dengan bagian program maupun monitoring evaluasi Setditjen PKRL untuk menyesuaikan target nilai kinerja anggaran.

6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKM 13

LPSP Sorong melakukan penginputan capaian output pada aplikasi SAKTI setiap bulan serta monitoring update nilai kinerja anggaran pada aplikasi DJA SMART. Secara rutin nilai kinerja anggaran disampaikan pada rapat bulanan.

7. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Pada triwulan III akan dilakukan penginputan capaian rincian output pada aplikasi SAKTI dan melakukan revisi atau penyesuaian halaman III DIPA.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup LPSP Sorong dengan IKM nilai kinerja anggaran lingkup LPSP Sorong (Nilai), sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar Rp.32.603.993 atau 35,50% dari pagu anggaran Rp. 91.854.000 yang dapat dilihat pada tabel 3.29.



Tabel 3.29 Realisasi Anggaran IKM 13 Nilai Kinerja Anggaran Lingkup LPSP Sorong (Nilai)

No.	IKM	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup LPSP Sorong (Nilai)	91.854.000	32.603.993	59.250.007	35,50%
a.	Perencanaan Program dan Anggaran	91.854.000	32.603.993	59.250.007	35,50%

Sumber Data: LPSP Sorong, per 30 Juni 2024

3.11.3 IKM 14 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di LPSP Sorong (Nilai)

WBK adalah suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Standar penilaian antara lain:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0;
4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Nilai WBK merupakan hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam SK Menteri KP dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri KP. Jika pada tahun anggaran, tidak dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal, maka capaian menggunakan capaian tahun sebelumnya.

Tabel 3.30 Capaian IKM 14 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK LPSP Sorong (Nilai)

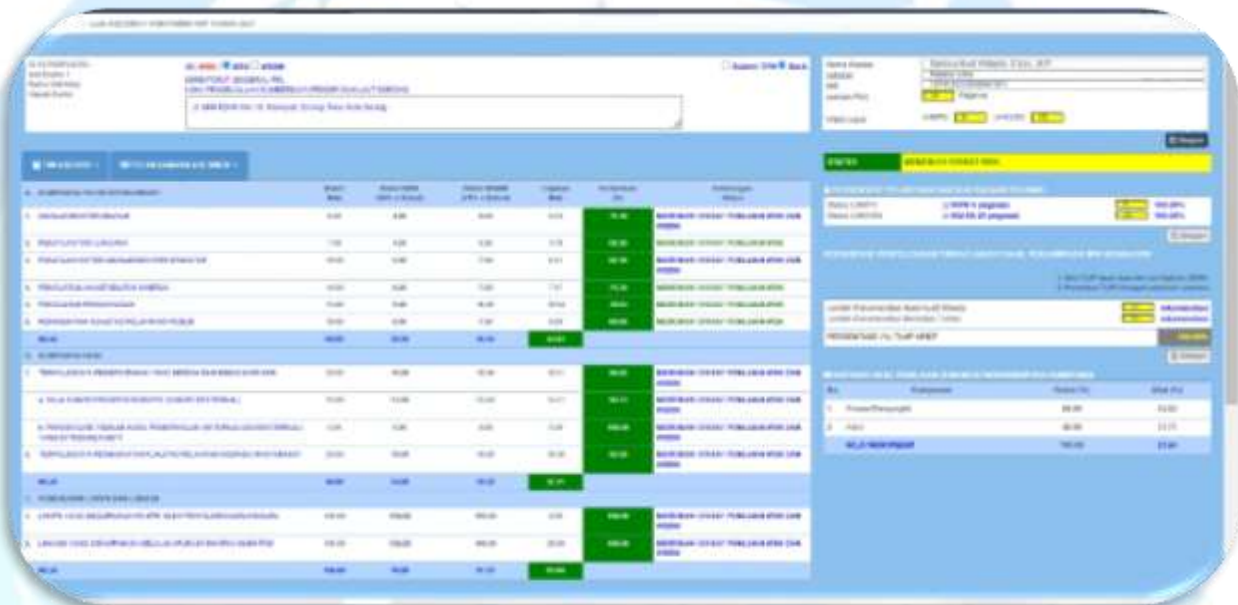
SK.11	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup LPSP Sorong									
IKU.14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di LPSP Sorong (Nilai)									
Realisasi 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra 2020-2024	
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi thd PK	Target s.d 2024	% Capaian thd Renstra 2024
-	81,64	-	-	-	-	-	75		75	

Sumber Data: LPSP Sorong, per 30 Juni 2024



1. Capaian IKM Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di LPSP Sorong (Nilai Triwulan II Tahun 2024)

Berdasarkan aplikasi e-ZI pada ezi.kkp.go.id bahwa nilai LPSP Sorong sampai dengan triwulan II tahun 2023 nilai WBK LPSP Sorong masih tercantum nilai di tahun 2021, yaitu 81,64. Periode pencapaian target dan periode pelaporan capaian IKM ini adalah tahunan dengan target 75, sehingga sampai dengan triwulan II belum diisi capaiannya pada aplikasi kinerjaku dan belum dapat dihitung persentase capaiannya karena masih proses pencapaian.



Indikator	Nilai	Target	Persentase	Status
1. Kemampuan Berpikir Kritis	81,64	75	108,72	Terpenuhi
2. Kemampuan Berpikir Kreatif	81,64	75	108,72	Terpenuhi
3. Kemampuan Berpikir Komprehensif	81,64	75	108,72	Terpenuhi
4. Kemampuan Berpikir Kritis, Kreatif, dan Komprehensif	81,64	75	108,72	Terpenuhi
5. Kemampuan Berpikir Kritis, Kreatif, dan Komprehensif (K3)	81,64	75	108,72	Terpenuhi
6. Kemampuan Berpikir Kritis, Kreatif, dan Komprehensif (K3) (K3)	81,64	75	108,72	Terpenuhi
7. Kemampuan Berpikir Kritis, Kreatif, dan Komprehensif (K3) (K3) (K3)	81,64	75	108,72	Terpenuhi
8. Kemampuan Berpikir Kritis, Kreatif, dan Komprehensif (K3) (K3) (K3) (K3)	81,64	75	108,72	Terpenuhi
9. Kemampuan Berpikir Kritis, Kreatif, dan Komprehensif (K3) (K3) (K3) (K3) (K3)	81,64	75	108,72	Terpenuhi
10. Kemampuan Berpikir Kritis, Kreatif, dan Komprehensif (K3) (K3) (K3) (K3) (K3) (K3)	81,64	75	108,72	Terpenuhi

Gambar 3.42 Nilai WBK LPSP Sorong (Sumber: Aplikasi ezi.kkp.go.id per 30 Juni 2024).

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dan Triwulan II Tahun 2024

Periode pencapaian dan pelaporan indikator kinerja ini pada tahun 2023 dan 2024 yaitu tahunan. Pada triwulan II pada tahun 2023 dan 2024 kegiatan ini masih dalam progress pencapaian sehingga belum dapat dibandingkan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi IKM unit kerja berpredikat menuju WBK di LPSP Sorong pada triwulan II tahun 2024 masih dalam progress pencapaian, sehingga belum dapat dibandingkan dengan target pada dokumen Renstra 2020-2024.



4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumberdaya ada pada sumberdaya manusia (SDM), dengan kondisi SDM LPSPL Sorong yang terbatas, LPSPL Sorong dapat mencapai target pada tahun sebelumnya. Efisiensi penggunaan anggaran ada pada pemenuhan dokumen WBK dapat memanfaatkan teknologi informasi sehingga meminimalkan belanja perjalanan dinas.

5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

LPSPL Sorong memiliki 6 (enam) kelompok kerja yang tertuang pada surat tugas Kepala LPSPL Sorong Nomor: ST.032/LPSPL.1/TU.110/III/2024, yang selalu memonitor pelaksanaan kinerja organisasi dalam rangka mencapai predikat WBK sehingga masing-masing komponen penilaian dapat dimonitoring kemajuannya.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Kegagalan mencapai target dapat terjadi apabila tidak ada dokumen terkait proses terbentuknya predikat WBK di organisasi LPSPL Sorong, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang setiap tahapannya harus didokumentasikan dan diarsipkan. Jumlah SDM LPSPL Sorong yang setiap tahunnya berkurang juga membuat tidak maksimalnya pencapaian nilai WBK.

c. Solusi

LPSPL Sorong melakukan pertemuan setiap minggu pada hari rabu dengan seluruh pegawai untuk monitoring status kelengkapan dokumen WBK, sekretaris pembangunan zona integritas memantau dan menghimbau agar setiap kelompok kerja melengkapi dokumen yang belum tersedia, serta mengupdate persentase pemenuhan dokumen yang telah disusun dan diupload.

6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKM 14

Pada triwulan II tahun 2024, LPSPL Sorong menerbitkan surat tugas terkait kelompok kerja pembangunan WBK serta menyusun rencana aksi pemenuhan dokumen WBK tahun 2024. LPSPL Sorong juga melaksanakan monitoring mingguan terhadap kelengkapan WBK tahun 2023 hingga triwulan II tahun 2024.



7. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Pada triwulan III tahun 2024 akan dilaksanakan pemenuhan dokumen secara berkala. monitoring kelengkapan dokumen dan menyampaikan persentase pemenuhan dokumen yang telah disusun dan diupload oleh Sekretariat Pembangunan WBK LPSPL Sorong.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup LPSPL Sorong dengan IKM nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di LPSPL Sorong (Nilai), sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar Rp. 3.227.500 atau 12,54% dari pagu anggaran Rp. 25.732.000 yang dapat dilihat pada tabel 3.31.

Tabel 3.31 Realisasi Anggaran IKM 14 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di LPSPL Sorong (Nilai)

No.	IK	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di LPSPL Sorong (Nilai)	25.732.000	3.227.500	22.504.500	12,54%
a.	Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP	25.732.000	3.227.500	22.504.500	12,54%

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2024

3.11.4 IKM 15 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas (IP) ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Teknik perhitungan sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin.



2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi: Pendidikan S-3 (Strata-Tiga), Pendidikan S-2 (Strata-Dua), Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat), Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda), Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan Pendidikan di bawah SLTA. Perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki, bagi pejabat administrasi yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional mendapatkan bobot yang sama dengan pejabat fungsional yang telah mengikuti pelatihan fungsional berdasarkan hasil koordinasi Instansi Pengguna dengan Instansi Pembina dan melampirkan bukti berupa surat keterangan/rekomendasi yang selanjutnya dimutakhirkan ke dalam SIASN, dengan formula sebagai berikut:

Tabel 3.32 Kualifikasi tingkat Pendidikan.

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	S1/ DIV	DIII	DII/DI/ SLTA/ Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DIII/DI/ SLTA sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan	DIII/DI/	25	23	22	21	20	15



	Fungsional (Keterampilan)	SLTA sederajat						
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir
- Bagi pegawai negeri sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari akan dinilai secara proposional;
 - Riwayat pelatihan teknis dan diklat pendukung/seminar/workshop/sejenisnya dapat melalui jalur pelatihan secara klasikal dan/atau nonklasikal, dengan formula sebagai berikut:

Tabel 3.33 Indikator riwayat pengembangan kompetensi

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22,5
1	Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22,5
0	Tidak Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0



	Seminar	10	10	17,5
1	Pernah Ikut Seminar	10	10	17,5
0	Tidak Pernah Ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

Tabel 3.34 Indikator penilaian prestasi

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Tabel 3.35 Indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin

Nilai	Keterangan Nilai SKP	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

6. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
- Kualifikasi dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi SIMPEG Online KKP.



- b. Kompetensi diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sbb:
- Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;
 - Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40;
 - Pejabat Fungsional wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
 - Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
- c. Kinerja diolah datanya dari aplikasi Kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada aplikasi SIASN BKN dengan nilai Kinerja dari Kategori;
- d. Disiplin diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang **tidak pernah/pernah** dijatuhi hukuman disiplin selama 1 tahun terakhir dan di update pada aplikasi e-Pegawai.
7. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:
- a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
 - b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
 - c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
 - d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).
8. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:
- IPASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Displin*
- IPLev 2 = Rerata Nilai IPASN dari seluruh ASN lingkup Level 2*
- IPLev 1 = IPASN Pejabat Lev 1 + Rerata Nilai IPLev 2*



9. Kategori Penilaian IP ASN:

Tabel 3.36 Kategori penilaian IP ASN

Nilai	Kategori
91-100	Sangat Profesional / Sangat Tinggi
81-90	Cenderung Profesional / Tinggi
71-80	Rentan Tidak Profesional / Sedang
61-70	Cenderung Tidak Profesional / Rendah
≤60	Sangat Tidak Profesional / Sangat Rendah

Tabel 3.37 Capaian IKM 15 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)

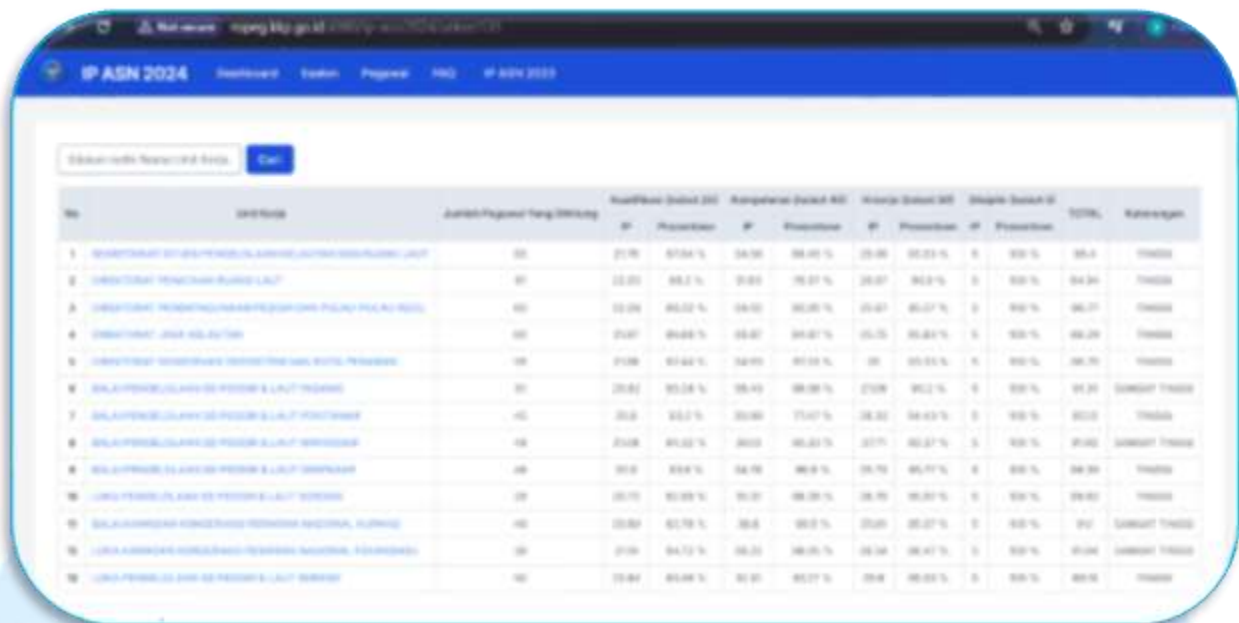
SK.11	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup LPSPL Sorong									
IKU.15	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)									
Realisasi 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra 2020-2024	
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi thd PK	Target s.d 2024	% Capaian thd Renstra 2024
83,31	89,17	-	83	89,82	108,22%	(+6,51)	88	102,06%	76	118,18%

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2024

1. Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks) Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan tautan IP ASN pada <http://ropeg.kkp.go.id:4080/#/ip-asn/eselon> bahwa indeks profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong sampai dengan triwulan II yaitu 89,82. Periode pencapaian target dan periode pelaporan capaian IKM ini adalah semesteran dengan target semester I adalah 83 dan target semester II adalah 88, sehingga pada semester I untuk indikator kinerja ini capaiannya 108,22% dari target semester I.





No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai yang Ditinjau	Kategori Indeks 200		Kategori Indeks 400		Kategori Indeks 600		Kategori Indeks 800		Total	Rata-rata
			Nilai	Persentase	Nilai	Persentase	Nilai	Persentase	Nilai	Persentase		
1	Subsistem Kelautan Perikanan, Kelautan, Kelautan Kelautan, Kelautan	10	21,75	67,50 %	34,50	69,00 %	25,00	50,00 %	5	100 %	86,4	86,40 %
2	Subsistem Kelautan Perikanan Kelautan Kelautan Kelautan Kelautan	10	22,00	66,00 %	35,00	70,00 %	25,00	50,00 %	5	100 %	86,4	86,40 %
3	Subsistem Kelautan Perikanan Kelautan Kelautan Kelautan Kelautan	10	22,00	66,00 %	35,00	70,00 %	25,00	50,00 %	5	100 %	86,4	86,40 %
4	Subsistem Kelautan Perikanan Kelautan Kelautan Kelautan Kelautan	10	22,00	66,00 %	35,00	70,00 %	25,00	50,00 %	5	100 %	86,4	86,40 %
5	Subsistem Kelautan Perikanan Kelautan Kelautan Kelautan Kelautan	10	22,00	66,00 %	35,00	70,00 %	25,00	50,00 %	5	100 %	86,4	86,40 %
6	Subsistem Kelautan Perikanan Kelautan Kelautan Kelautan Kelautan	10	22,00	66,00 %	35,00	70,00 %	25,00	50,00 %	5	100 %	86,4	86,40 %
7	Subsistem Kelautan Perikanan Kelautan Kelautan Kelautan Kelautan	10	22,00	66,00 %	35,00	70,00 %	25,00	50,00 %	5	100 %	86,4	86,40 %
8	Subsistem Kelautan Perikanan Kelautan Kelautan Kelautan Kelautan	10	22,00	66,00 %	35,00	70,00 %	25,00	50,00 %	5	100 %	86,4	86,40 %
9	Subsistem Kelautan Perikanan Kelautan Kelautan Kelautan Kelautan	10	22,00	66,00 %	35,00	70,00 %	25,00	50,00 %	5	100 %	86,4	86,40 %
10	Subsistem Kelautan Perikanan Kelautan Kelautan Kelautan Kelautan	10	22,00	66,00 %	35,00	70,00 %	25,00	50,00 %	5	100 %	86,4	86,40 %
11	Subsistem Kelautan Perikanan Kelautan Kelautan Kelautan Kelautan	10	22,00	66,00 %	35,00	70,00 %	25,00	50,00 %	5	100 %	86,4	86,40 %
12	Subsistem Kelautan Perikanan Kelautan Kelautan Kelautan Kelautan	10	22,00	66,00 %	35,00	70,00 %	25,00	50,00 %	5	100 %	86,4	86,40 %
13	Subsistem Kelautan Perikanan Kelautan Kelautan Kelautan Kelautan	10	22,00	66,00 %	35,00	70,00 %	25,00	50,00 %	5	100 %	86,4	86,40 %
14	Subsistem Kelautan Perikanan Kelautan Kelautan Kelautan Kelautan	10	22,00	66,00 %	35,00	70,00 %	25,00	50,00 %	5	100 %	86,4	86,40 %
15	Subsistem Kelautan Perikanan Kelautan Kelautan Kelautan Kelautan	10	22,00	66,00 %	35,00	70,00 %	25,00	50,00 %	5	100 %	86,4	86,40 %
16	Subsistem Kelautan Perikanan Kelautan Kelautan Kelautan Kelautan	10	22,00	66,00 %	35,00	70,00 %	25,00	50,00 %	5	100 %	86,4	86,40 %
17	Subsistem Kelautan Perikanan Kelautan Kelautan Kelautan Kelautan	10	22,00	66,00 %	35,00	70,00 %	25,00	50,00 %	5	100 %	86,4	86,40 %
18	Subsistem Kelautan Perikanan Kelautan Kelautan Kelautan Kelautan	10	22,00	66,00 %	35,00	70,00 %	25,00	50,00 %	5	100 %	86,4	86,40 %
19	Subsistem Kelautan Perikanan Kelautan Kelautan Kelautan Kelautan	10	22,00	66,00 %	35,00	70,00 %	25,00	50,00 %	5	100 %	86,4	86,40 %
20	Subsistem Kelautan Perikanan Kelautan Kelautan Kelautan Kelautan	10	22,00	66,00 %	35,00	70,00 %	25,00	50,00 %	5	100 %	86,4	86,40 %

Gambar 3.43 Indeks Profesionalitas ASN Triwulan II Tahun 2024. (Sumber: <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2023>, per 30 Juni 2024)

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian kinerja IP ASN LPSPL Sorong triwulan II atau semester I tahun 2023 yaitu 83,31 sedangkan capaian pada semester I tahun 2024 yaitu 89,82. Hal ini menunjukkan bahwa IP ASN LPSPL Sorong pada semester I tahun 2024 lebih tinggi dari IP ASN pada semester I tahun 2023.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi IKM indeks profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong pada semester I tahun 2024 yaitu 89,82, sedangkan target nilai posisi akhir dalam renstra 2020-2024 adalah 76 sehingga capaian pada semester I tahun 2023 sudah tercapai 118,18% atau lebih tinggi dari target nilai posisi akhir renstra 2020-2024.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi sumberdaya anggaran. Sumberdaya manusia (SDM) LPSPL Sorong sebagian besar mengikuti Bimtek/Webinar/Workshop/Seminar/Diklat melalui daring sehingga tidak ada



pengeluaran biaya perjalanan yang besar untuk meningkatkan kapasitas SDM LPSPL Sorong.

5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

1. Kualifikasi: tingkat Pendidikan ASN LPSPL Sorong meningkat setiap tahunnya melalui tugas belajar maupun ijin belajar. Berdasarkan pemantauan pada pada laman <http://ropeg.kkp.go.id:4080/#/ip-asn/eselon> nilai kualifikasi LPSPL Sorong pada triwulan II tahun 2024 adalah 20,72.
2. Kompetensi: masing-masing ASN LPSPL Sorong memiliki kompetensi beranekaragam yang didapatkan dari Bimtek/Webinar/Workshop/Seminar/Diklat. Kompetensi tersebut diakui dengan penerbitan sertifikat atas kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti dengan minimal pembelajaran 20 jam pembelajaran (JP). Berdasarkan pemantauan pada pada laman <http://ropeg.kkp.go.id:4080/#/ip-asn/eselon> nilai kompetensi LPSPL Sorong pada triwulan II tahun 2024 adalah 35,31.
3. Kinerja: pengisian sasaran kinerja pegawai (SKP) secara individu sudah menggunakan SKP online, sehingga sudah ada rincian target kinerja yang harus dicapai masing-masing individu dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan pemantauan pada pada laman <http://ropeg.kkp.go.id:4080/#/ip-asn/eselon> nilai kinerja LPSPL Sorong pada triwulan II tahun 2024 adalah 28,79.
4. Disiplin: tingkat kehadiran individu telah di monitoring secara berkala oleh kepegawaian sehingga meningkatkan nilai pada indikator ini. Berdasarkan pemantauan pada pada laman <http://ropeg.kkp.go.id:4080/#/ip-asn/eselon> nilai disiplin LPSPL Sorong pada triwulan II tahun 2024 adalah 5.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Pada triwulan II tidak terdapat kendala dalam mencapai indikator ini, namun pegawai yang telah mengikuti bimbingan teknis/workshop/seminar ada yang belum mengupdate sertifikatnya pada MyASN.



c. Solusi

Kepegawaian LPSPL Sorong melakukan monitoring secara berkala dan memberikan himbauan kepada pegawai LPSPL Sorong untuk update data peningkatan kapasitas di MyASN.

6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKM 15

Kegiatan pendukung pencapaian target IKM 15 yaitu telah dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia melalui bimtek/diklat/workshop bagi para fungsional umum maupun fungsional tertentu pada triwulan II tahun 2024. Sertifikat hasil bimtek/diklat/workshop di update pada gdrive LPSPL Sorong. Adapun peningkatan kapasitas yang diikuti oleh pegawai LPSPL Sorong diantaranya bimbingan teknis SMAP ISO 37001:2016, uji kompetensi pengadaan barang dan jasa, focus group discussion peningkatan kapasitas bendahara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan peningkatan nilai IP ASN lingkup Ditjen PKRL.



Gambar 3.44 Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Pegawai LPSPL Sorong.

7. Rencana Aksi Triwulan III TA 2024

Pada triwulan III tahun 2024, pegawai LPSPL Sorong secara mandiri maupun ditugaskan untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis/seminar/workshop. Serta melakukan penginputan sertifikat kompetensi pelatihan secara mandiri oleh masing-masing pegawai untuk mendukung IP ASN pada dimensi kompetensi. Bagian kepegawaian akan melakukan monitoring secara berkala melalui WA grup bagi pegawai yang belum menginput data sertifikat pada e-pegawai. Masing-masing pegawai akan mulai mengupload Sertifikat Pelatihan Bimtek/Seminar/Workshop pada aplikasi MyASN dan pengisian arsip sertifikat



secara mandiri pada gdrive yang disiapkan oleh bagian kepegawaian. Kepegawaian LPSPL Sorong juga melakukan share informasi terkait kegiatan bimtek maupun seminar.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup LPSPL Sorong dengan IKM indeks profesionalitas ASN lingkup LPSPL Sorong (Indeks), sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar Rp. 361.955.355 atau 62,93% dari pagu anggaran Rp. 575.176.000 yang dapat dilihat pada tabel 3.38.

Tabel 3.38 Realisasi Anggaran IKM 15 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)

No.	IK	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)	575.176.000	361.955.355	213.220.645	62,93%
a.	Layanan manajemen SDM	575.176.000	361.955.355	213.220.645	62,93%

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2024

3.11.5 IKM 16 Nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

Nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP diantaranya perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%).

Nilai PM SAKIP LPSPL Sorong adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen PKRL. Kategori nilai PM SAKIP dapat dilihat pada tabel 3.39.

Tabel 3.39 Kategori Nilai PM SAKIP Tahun 2024.

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke



		level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.



Tabel 3.40 Capaian IKM 16 Nilai PM SAKIP lingkup LPSPS Sorong (Nilai)

SK.11	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup LPSPS Sorong									
IKU.16	Nilai PM SAKIP lingkup LPSPS Sorong (Nilai)									
Realisasi 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra 2020-2024	
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi thd PK	Target s.d 2024	% Capaian thd Renstra 2024
-	82,70	-	-	-	-	-	81			

Sumber Data: LPSPS Sorong, per 30 Juni 2024

1. Capaian IKM Nilai PM SAKIP lingkup LPSPS Sorong (Nilai) Triwulan II Tahun 2023

Target IKM nilai PM SAKIP lingkup LPSPS Sorong yang ditetapkan sesuai Perjanjian Kinerja LPSPS Sorong tahun 2024 adalah 81, yang periode pelaporannya tahunan. Pada triwulan II tahun 2024, LPSPS Sorong telah melakukan penilaian mandiri SAKIP yang di evaluasi oleh Setditjen PKRL. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai nilai capaian indikator kinerja ini.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dan Triwulan II Tahun 2024

Periode pencapaian dan pelaporan indikator kinerja ini pada tahun 2023 dan 2024 yaitu tahunan. Pada triwulan II pada tahun 2023 dan 2024 kegiatan ini masih dalam progress pencapaian sehingga belum dapat dibandingkan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang ada pada tahun 2023, sehingga belum tercantum dalam dokumen Renstra 2020-2024 dan tidak dapat dibandingkan.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi sumberdaya anggaran. Sebagian kegiatan pendukung dalam progress pencapaian indikator kinerja ini dapat dilakukan secara daring (*online*) sehingga efisiensi pada belanja perjalanan dinas.



5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Keberhasilan diupayakan melalui kelengkapan dokumen dan setiap perubahan diikuti dengan perubahan dokumen perencanaan maupun dokumen monitoring evaluasi. Penyesuaian dokumen tersebut disesuaikan untuk menjamin akuntabilitas kinerja LPSPSPL Sorong.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Pada triwulan II belum terdapat kendala dalam progress pencapaian indikator kinerja ini, karena semua dokumen telah dipenuhi.

c. Solusi

Pada triwulan II belum terdapat kendala sehingga belum terdapat solusi untuk menyelesaikan kendala tersebut.

6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKM 16

LPSPSPL Sorong melakukan pemenuhan dokumen pendukung PM SAKIP diantaranya Perjanjian Kinerja, Rincian Target, Manual IKU, Rencana Aksi, dan Laporan Kinerja Triwulan I. Pada triwulan II telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini diantaranya mengikuti pengukuran kinerja, evaluasi rencana aksi, dan verifikasi capaian kinerja triwulan I tahun 2024, pendampingan SAKIP oleh Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan evaluasi akuntabilitas instansi pemerintah lingkup DJPKRL.



Gambar 3.45 Dokumentasi Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja 16.



7. Rencana Aksi Triwulan III TA 2024

Pada triwulan III tahun 2024 akan dilaksanakan verifikasi data capaian kinerja triwulan II tahun 2024, penyusunan laporan kinerja triwulan II, dan mengikuti pleno SAKIP yang diselenggarakan oleh Setditjen PKRL.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup LPSPL Sorong dengan IKM nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong (Nilai), sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar Rp. 65.834.671 atau 51,17% dari pagu anggaran Rp. 128.660.000 yang dapat dilihat pada tabel 3.41.

Tabel 3.41 Realisasi Anggaran IKM 16 Nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

No.	IK	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
	Nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	128.660.000	65.834.671	62.825.329	51,17%
a.	Layanan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	128.660.000	65.834.671	62.825.329	51,17%

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2024

3.11.6 IKM 17 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan SPIP diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPKRL. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024.



Tabel 3.42 Capaian IKM 17 Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)

SK.11	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup LPSPL Sorong									
IKU.17	Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)									
Realisasi 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra 2020-2024	
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi thd PK	Target s.d 2024	% Capaian thd Renstra 2024
2	4	1	2	2	100	(=)	4	50%		

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2024

1. *Capaian IKM Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen) Triwulan II Tahun 2024*

Periode pencapaian target dan periode pelaporan capaian IKM ini adalah triwulanan, dengan target pada triwulan II yaitu 2 Dokumen. Indikator kinerja ini pada triwulan II telah tercapai 2 dokumen atau capaiannya 100% yaitu dokumen SPIP triwulan IV tahun 2023 dan dokumen SPIP triwulan I tahun 2024. Capaian ini telah disampaikan ke Direktur Jenderal PRL dengan surat nomor: B.358/LPSPL.1/TU.140/IV/2024 tanggal 5 April 2024 (SPIP Triwulan IV Tahun 2023) dan surat nomor: B.637/LPSPL.1/TU.140/VI/2024 (SPIP Triwulan I Tahun 2024).

2. *Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dan Triwulan II Tahun 2024*

Periode pencapaian dan pelaporan indikator kinerja ini pada tahun 2023 dan 2024 yaitu triwulanan. Target indikator kinerja ini pada triwulan II tahun 2023 dan triwulan II tahun 2024 yaitu 2 dokumen. Capaian pada triwulan II pada tahun 2023 yaitu 2 dokumen atau 100% sama dengan capaian pada triwulan II tahun 2024.

3. *Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah*

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang baru ada pada tahun 2022 dan belum tercantum dalam dokumen Renstra 2020-2024, sehingga tidak dapat dibandingkan.



4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi anggaran. Adanya dokumen SPIP ini memudahkan pengendalian secara terpadu terhadap semua kegiatan lingkup LPSPL Sorong yang dilakukan melalui sistem pengendalian yang sudah ada standardisasinya, tanpa perlu langsung ke lapangan maupun penugasan dengan penganggaran. Efisiensi anggaran terjadi karena dalam pencapaian indikator kinerja ini dapat dilakukan secara daring (*online*).

5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

LPSPL Sorong melakukan penyusunan laporan SPIP secara rutin bulanan dan triwulanan sehingga selalu tersedia data dan informasi pengendalian terupdate. Selain itu pemenuhan dokumen SPIP terupdate didukung adanya kerjasama dari SDM sesuai tugasnya masing-masing.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Tidak ada kendala pada pencapaian target indikator ini, kegagalan mencapai target dapat terjadi apabila tidak ada kerjasama dan komitmen SDM untuk selalu menyediakan data dan informasi organisasi terupdate untuk kebutuhan pengendalian.

c. Solusi

Untuk menghindari kegagalan dalam menyusun dokumen SPIP, maka diperlukan koordinasi dan kerjasama dari beberapa pegawai yang memiliki tugas terkait penyusunan dokumen SPIP.

6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKM 17

Pada triwulan II telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini diantaranya mengikuti pembahasan pelaporan SPIP triwulan I tahun 2024 bersama dengan UPT lingkup DJPKRL.





Gambar 3.46 Kegiatan Pendukung Penyelenggaraan SPIP Triwulan II Tahun 2024.

7. Rencana Aksi Triwulan III TA 2024

Pada triwulan III tahun 2024 akan dilakukan penyusunan SPIP triwulan III tahun 2024 dan SPIP rutin bulanan.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup LPSPL Sorong dengan IKM laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen), sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar Rp. 65.834.671 atau 51,17% dari pagu anggaran Rp. 128.660.000 yang dapat dilihat pada tabel 3.43.

Tabel 3.43 Realisasi Anggaran IKM 17 Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)

No.	IK	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
	Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)	128.660.000	65.834.671	62.825.329	51,17%
a.	Layanan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	128.660.000	65.834.671	62.825.329	51,17%

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2024

3.11.7 IKM 18 Persentase Unit Kerja lingkup LPSPL Sorong yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk



mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan. Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian pada komponen keaktifan (100%) pada aplikasi *Collaboration Office*. Untuk satuan kerja level 2 di pusat pegawai yang wajib dinilai yaitu eselon II dan ketua tim kerja, sedangkan untuk level II unit pelaksana teknis (UPT) sementara yang dinilai yaitu kepala UPT.

Teknik menghitung capaian IKM ini yaitu sebagai berikut:

1. Komponen 1 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur capaian kinerja berdasarkan sistem Manajemen Pengetahuan Level 2 ini, yaitu:
 - a. Keaktifan (bobot 100%): Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi target minimal mendapatkan 3 poin dan poin maksimal yang dapat diterima adalah 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.
2. Pembobotan yang dimaksud adalah:
 - a. Konten dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan poin 0,5;
 - b. Konten berupa infografis dengan poin 1;
 - c. Konten video/campaign diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan poin 3.
3. Cara mengukur kinerja ini:
 - a. Menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan yang ditunjuk (*portal Collaboration Office*)
 - b. Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian:
 - Keaktifan akan direkap setiap hari dalam satu triwulan;
 - Perhitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin dan maksimal 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan;
 - Pengukuran level II dihitung dari keaktifan Eselon II;
 - Setditjen PKRL menyediakan data hasil rekapitan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IK MP masing-masing unit kerja eselon II.
 - c. Capaian dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Poin Keaktifan Pejabat}}{\text{Jumlah Target Poin Pejabat Keaktifan Pejabat}} \times 100\%$$

d. Total nilai capaian MP_{LPSPS Sorong}: Nilai keaktifan

Tabel 3.44 Capaian IKM 18 Persentase Unit Kerja lingkup LPSPS Sorong yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

SK.11 Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup LPSPS Sorong										
IKU.18 Persentase Unit Kerja lingkup LPSPS Sorong yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)										
Realisasi 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra 2020-2024	
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi thd PK	Target s.d 2024	% Capaian thd Renstra 2024
100	133,33	-	94	133,33	120%	(+33,33)	94	120%	90	120%

Sumber Data: LPSPS Sorong, per 30 Juni 2024

1. Capaian IKM Persentase Unit Kerja lingkup LPSPS Sorong yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%) Triwulan II Tahun 2024

Periode pencapaian target dan periode pelaporan capaian IKM persentase unit kerja lingkup LPSPS Sorong yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar adalah triwulan dengan perhitungan akhir capaian merupakan nilai rata-rata. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal PKRL nomor: B.3875/DJPKRL.1/TU.140/VII/2024 perihal penyampaian capaian presentase satuan kerja UPT lingkup DJPKRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar triwulan II tahun 2024 bahwa capaian LPSPS Sorong pada triwulan II tahun 2024 yaitu 133,33 atau 120% dari target triwulan II tahun 2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dan Triwulan II Tahun 2024

Periode pencapaian dan pelaporan indikator kinerja ini pada tahun 2023 dan 2024 yaitu triwulanan. Target indikator kinerja ini pada triwulan II tahun 2023 yaitu 92 sedangkan pada triwulan II tahun 2024 yaitu 94. Capaian pada triwulan II pada tahun 2023 yaitu 100% sedangkan capaian pada triwulan II tahun 2024 yaitu 133,33%. Sehingga capaian pada triwulan II tahun 2024 lebih tinggi daripada capaian triwulan II tahun 2023, hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan cara hitung pada triwulan II tahun 2023 dengan triwulan II tahun 2024.



3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah**

Realisasi IKM persentase unit kerja lingkup LPSPL Sorong yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada triwulan II tahun 2024 yaitu 133,33 atau 120% dari target Renstra 2020-2024.

4. **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya**

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi sumberdaya anggaran. Penyampaian informasi kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja di daerah maupun di pusat dapat diketahui secara singkat melalui aplikasi *Collaboration Office*, cukup mengandalkan gadget atau laptop yang tersambung dengan koneksi internet.

5. **Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi**

a. **Analisis Keberhasilan.**

Keaktifan Kepala LPSPL Sorong yang telah memposting berbagi pengetahuan/informasi berupa hasil kegiatan di laman aplikasi *collaboration office* sekurang-kurangnya 6 kali per triwulan dengan memenuhi kriteria 5W1H.

b. **Analisis Kegagalan/Kendala**

Kegagalan pencapaian target terjadi apabila Kepala LPSPL Sorong belum memenuhi target minimal dalam memposting berita di laman aplikasi *collaboration office*.

c. **Solusi**

Dalam rangka mengantisipasi kegagalan, mengantisipasi capaian tidak maksimal atau tidak sesuai target dengan cara memonitoring setiap bulan jumlah postingan dari Kepala LPSPL Sorong di setiap bulannya, sehingga apabila ada kurang posting dapat segera diatasi pada bulan tersebut.

6. **Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKM 18**

LPSPL Sorong selalu melakukan pemantauan terhadap postingan Kepala LPSPL Sorong pada laman aplikasi *collaboration office* serta melakukan rekapitulasi postingan setiap triwulan. Pada tabel 3.45 dapat kita lihat bahwa kepala LPSPL Sorong aktif melakukan update pada setiap bulan sehingga realisasi indikator kinerja ini maksimal.



Tabel 3.45 Keaktifan Pejabat LPSPL Sorong Posting pada laman aplikasi *collaboration office*.

Pejabat	April	Mei	Juni	Total
Kepala LPSPL Sorong	5	23	39	67

7. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Pada triwulan III tahun 2024, Kepala LPSPL Sorong mengupload minimal 2 postingan setiap bulannya pada laman aplikasi *collaboration office* serta operator *collaboration office* LPSPL Sorong melakukan rekapitulasi postingan pada laman *collaboration office* sebagai dasar monitoring capaian IKM 18 pada triwulan III Tahun 2024.

8. Realisasi Anggaran

Tidak ada pagu anggaran dalam mendukung capaian indikator kinerja persentase unit kerja lingkup LPSPL Sorong yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%), yang dapat dilihat pada tabel 3.46.

Tabel 3.46 Realisasi Anggaran IKM 18 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup LPSPL Sorong yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)

No.	IKM	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup LPSPL Sorong yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	-	-	-	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2024

3.11.8 IKM 19 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup LPSPL Sorong yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup LPSPL Sorong merupakan rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sebanyak 80% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. Jumlah



rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 30 September 2024 atau Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS).

Teknik menghitung capaian IKM ini dengan cara persentase dari jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti LPSPL Sorong dibagi dengan Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada LPSPL Sorong.

Tabel 3.47 Capaian IKM 19 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup LPSPL Sorong yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)

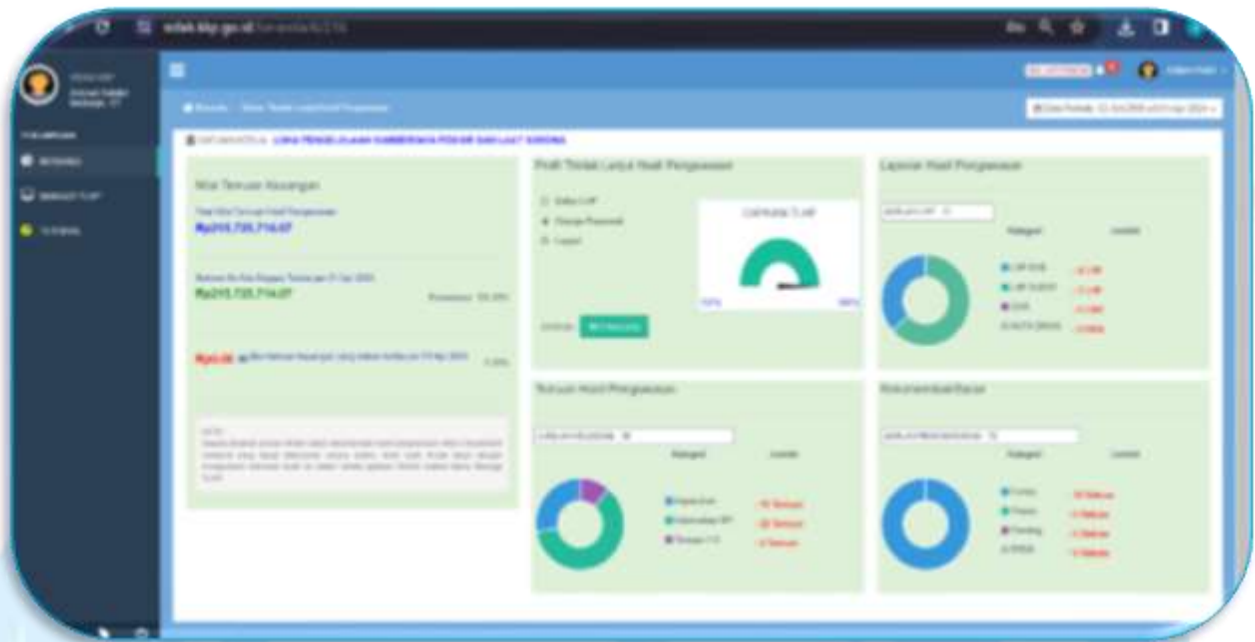
SK.11	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup LPSPL Sorong									
IKU.19	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup LPSPL Sorong yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)									
Realisasi 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra 2020-2024	
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi thd PK	Target s.d 2024	% Capaian thd Renstra 2024
100	100	-	80	100	120%	(=)	80	120%	65	120%

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2024

1. *Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup LPSPL Sorong yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) Triwulan II Tahun 2024*

Periode pencapaian target dan periode pelaporan capaian IKM 19 adalah triwulan dengan perhitungan akhir capaian merupakan nilai posisi akhir. Berdasarkan laman SIDAK yang dibawah naungan Inspektorat Jenderal KKP (<http://sidak.kkp.go.id/hasil-pengawasan/6/216>) dan surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor: B.3970/DJPKRL.1/HP.470/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024 perihal capaian indikator kinerja persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Ditjen PKRL triwulan II tahun 2024, LPSPL Sorong telah menindaklanjuti 7 dari 7 rekomendasi sehingga capaian IKM persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup LPSPL Sorong yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) Triwulan II Tahun 2024 adalah 100%.





Gambar 3.47 Screenshot aplikasi SIDA per 1 Juli 2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dan Triwulan II Tahun 2024

Periode pencapaian dan pelaporan indikator kinerja ini pada tahun 2023 dan 2024 yaitu triwulanan. Target indikator kinerja ini pada triwulan II tahun 2023 yaitu 75 sedangkan pada triwulan II tahun 2024 yaitu 80. Capaian pada triwulan II pada tahun 2023 dan triwulan II tahun 2024 yaitu sama pada nilai 100%. Sehingga capaian pada triwulan II tahun 2024 sama dengan capaian triwulan II tahun 2023.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup LPSPL Sorong pada triwulan II tahun 2024 yaitu 100% sedangkan target nilai posisi akhir pada dokumen Renstra 2020-2024 adalah 65% sehingga capaian pada triwulan II tahun 2024 telah tercapai 120% atau lebih besar dari target nilai posisi akhir pada dokumen Renstra 2020-2024.



4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran terjadi karena penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan secara online pada laman sidak.go.id dan koordinasi dilakukan secara daring dengan aplikasi penunjang.

5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

LPSPL Sorong selalu memonitoring secara rutin/berkala semua rekomendasi yang dikeluarkan oleh Itjen sehingga selalu ada progress tindaklanjut pada aplikasi SIDAK. Setiap pegawai yang terkait dengan rekomendasi yang dikeluarkan tersebut memiliki tanggungjawab masing-masing dengan fungsi kontrol dari Kepala LPSPL Sorong.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Tidak ada kendala pada pencapaian target indikator ini, kegagalan mencapai target dapat terjadi apabila tidak ada koordinasi dan komitmen organisasi untuk memperbaiki kinerja organisasi berdasarkan rekomendasi yang telah ada.

c. Solusi

Belum terdapat solusi yang dilakukan karena tidak ada kendala yang menyebabkan kegagalan. Untuk mengantisipasi atau meminimalisir kegagalan agar dilakukan koordinasi antar pegawai dalam menyelesaikan rekomendasi yang ada.

6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKM 19

Pada triwulan II, LPSPL Sorong dilakukan evaluasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari Inspektorat Jenderal I Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan surat tugas nomor: B.3096/ITJ.1/KP.440/VI/2024.

7. Rencana Aksi Triwulan III TA 2024

Pada triwulan III tahun 2024, LPSPL Sorong melakukan monitoring aplikasi SIDAK secara berkala, serta akan menindaklanjuti jika terdapat rekomendasi yang terbit pada triwulan III tahun 2024 terkait evaluasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

8. Realisasi Anggaran

Tidak ada pagu anggaran dalam mendukung capaian indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup LPSPS Sorong yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%), yang dapat dilihat pada tabel 3.48.

Tabel 3.48 Realisasi Anggaran IKM 19 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup LPSPS Sorong yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)

No.	IKM	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup LPSPS Sorong yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	-	-	-	-

Sumber Data: LPSPS Sorong, per 30 Juni 2024

3.11.9 IKM 20 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup LPSPS Sorong (%)

Temuan LHP BPK LPSPS Sorong yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK LPSPS Sorong Tahun 2023. Teknik menghitung capaian IKM ini dengan cara persentase dari Jumlah Temuan LHP BPK LPSPS Sorong yang diselesaikan dibagi dengan Jumlah temuan dalam LHP BPK LPSPS Sorong. Dengan catatan bahwa jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan **capaian adalah sama dengan target**.

Tabel 3.49 Capaian IKM 20 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup LPSPS Sorong (%)

SK.11	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup LPSPS Sorong									
IKU.20	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup LPSPS Sorong (%)									
Realisasi 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra 2020-2024	
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi thd PK	Target s.d 2024	% Capaian thd Renstra 2024
-	100	-	-	-	-	-	100		100	

Sumber Data: LPSPS Sorong, per 30 Juni 2024



1. Capaian IKM Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup LPSPL Sorong (%) Triwulan II Tahun 2024

Periode pencapaian target dan periode pelaporan capaian IKM ini adalah tahunan dengan target adalah 100, sehingga sampai dengan triwulan II belum diisi capaiannya pada aplikasi kinerjaku dan belum dapat dihitung persentase capaiannya karena masih proses pencapaian.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dan Triwulan II Tahun 2024

Periode pencapaian dan pelaporan indikator kinerja ini pada tahun 2023 dan 2024 yaitu tahunan. Pada triwulan II pada tahun 2023 dan 2024 kegiatan ini masih dalam progress pencapaian sehingga belum dapat dibandingkan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi IKM persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup LPSPL Sorong pada triwulan II tahun 2024 masih dalam progress pencapaian, sehingga belum dapat dibandingkan dengan target pada dokumen Renstra 2020-2024.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi sumberdaya manusia. LPSPL Sorong memiliki pengelola keuangan (PPK, PBJ, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan) dan bmn yang kompeten dan bersertifikat.

5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

LPSPL Sorong segera menindaklanjuti permintaan dokumen dan menyelesaikan temuan dari BPK. Segala tindaklanjut yang dilaksanakan LPSPL Sorong disampaikan secara resmi dan berjenjang.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Pada tahun 2024 belum terdapat kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini, namun kegagalan mencapai target dapat terjadi apabila organisasi tidak kooperatif menindaklanjuti temuan BPK.



c. Solusi

Belum terdapat solusi karena tidak terdapat kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini.

6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKM 20

Pada LPSPSPL Sorong dilakukan pemeriksaan oleh anggota IV BPK RI dengan surat tugas Nomor 01/ST/IV/01/2024 tanggal 9 Januari 2024.

7. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Pada triwulan III LPSPSPL Sorong melakukan koordinasi dengan Setditjen PKRL terkait progress pencapaian target kinerja indikator ini.

8. Realisasi Anggaran

Tidak ada pagu anggaran dalam mendukung capaian indikator kinerja persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup LPSPSPL Sorong (%), yang dapat dilihat pada tabel 3.50.

Tabel 3.50 Realisasi Anggaran IKM 20 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LPSPSPL Sorong (%)

No.	IKM	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LPSPSPL Sorong (%)	-	-	-	-

Sumber Data: LPSPSPL Sorong, per 30 Juni 2024

3.11.10 IKM 21 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LPSPSPL Sorong (%)

Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah adalah suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain:

- memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat;
- memiliki anggaran besar;



- c. mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional;
- d. mendukung pencapaian prioritas nasional;
- e. merupakan arahan direktif presiden; dan/atau
- f. pertimbangan lainnya.

Ruang lingkup evaluasi adalah kegiatan bantuan pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan fokus pengukuran pemanfaatannya dan jenis bantuan yang akan dinilai tingkat efektivitasnya adalah Bantuan KOMPAK.

Teknik menghitung capaian IK ini yaitu sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$$

Keterangan:

- PT = Pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya atau beroperasinya bantuan pemerintah sesuai target
- IG = Integrasi yang diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan atau penerima memahami hak dan kewajibannya setelah menerima bantuan pemerintah
- AT = Adaptasi yang diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan atau kemampuan penerima bantuan pemerintah untuk mengembangkan usahanya atau kegiatan kelautan dan perikanan.

Tabel 3.51 Capaian IKM 21 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LPSPL Sorong (%)

SK.11		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup LPSPL Sorong								
IKU.21		Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LPSPL Sorong (%)								
Realisasi 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra 2020-2024	
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi thd PK	Target s.d 2024	% Capaian thd Renstra 2024
-	100	-	-	-	-	-	80		100	

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2024



1. Capaian IKM Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LPSPL Sorong (%) Triwulan II Tahun 2024

Periode pencapaian target dan periode pelaporan capaian IKM tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup LPSPL Sorong (%) adalah tahunan dengan target 80%. Pada triwulan II belum diisi capaiannya pada aplikasi kinerjajaku dan belum dapat dihitung persentase capaiannya karena masih proses pencapaian. Capaian fisik pada triwulan II yaitu 25% atau tahap persiapan dengan perhitungan fisik mengacu pada e monev Bappenas.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dan Triwulan II Tahun 2024

Periode pencapaian dan pelaporan indikator kinerja ini pada tahun 2023 dan 2024 yaitu tahunan. Pada triwulan II pada tahun 2023 dan 2024 kegiatan ini masih dalam progress pencapaian sehingga belum dapat dibandingkan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi IKM tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup LPSPL Sorong pada triwulan II tahun 2024 masih dalam progress pencapaian, sehingga belum dapat dibandingkan dengan target pada dokumen Renstra 2020-2024.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi anggaran. Pencapaian IKM ini terakomodir melalui pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi bantuan pemerintah yang dilakukan terhadap bantuan pemerintah yang diberikan pada 2 (dua) tahun sebelum periode pengukuran, 1 (satu) tahun sebelum periode pengukuran, dan yang diberikan pada tahun yang sama dengan periode pengukuran. Selain itu, LPSPL Sorong memiliki satuan kerja di 4 Provinsi sehingga memperkecil anggaran yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan ini. Dalam berkoordinasi dan melakukan monitoring evaluasi kepada kelompok penerima bantuan ada yang dilakukan secara daring (*online*).



5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

LPSPL Sorong melakukan koordinasi dengan kelompok penerima bantuan, mitra kerja pemerintah daerah dan mitra kerja konservasi di wilayah kerja. Koordinasi dilakukan dari mulai identifikasi kelompok calon penerima bantuan, verifikasi dokumen kelompok calon penerima bantuan sampai dengan selesainya penyerahan bantuan kepada kelompok penerima bantuan. Selain koordinasi juga dilakukan pendampingan terhadap kelompok yang telah menerima bantuan, baik secara tatap muka, telepon ataupun melalui pihak pemda terkait.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Pada triwulan II tahun 2024 belum terdapat kendala dalam mencapai target indikator kinerja ini.

c. Solusi

Belum terdapat solusi yang dilakukan karena tidak ada kendala pencapaian indikator tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup LPSPL Sorong.

6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKM 21

LPSPL Sorong telah mempersiapkan dokumen terkait bantuan pemerintah TA 2023 dalam rangka pelaksanaan pengukuran indikator kinerja ini. Dokumen yang dipersiapkan, yaitu Proposal Usulan dan Verifikasi, SK Penetapan Penerima Bantuan, BAST Pemberi dan Penerima, Dokumentasi Kegiatan, Laporan Penerima Bantuan kepada Pemberi Bantuan, Laporan Pemberi Bantuan, Laporan Monev dan SPK. Selain itu dalam rangka persiapan monitoring dan evaluasi bantuan KOMPAK, LPSPL Sorong bersurat dengan nomor: B.440/LPSPL.1/PRL.440.V/2024 kepada kelompok penerima bantuan KOMPAK tahun 2021-2023 untuk menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan konservasi triwulan I tahun 2024.

7. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Pada triwulan III tahun 2024 akan monitoring dan evaluasi terhadap kelompok penerima bantuan KOMPAK tahun 2023 sebanyak 3 kelompok, diantaranya POKMASWAS Nusa Matan, POKMASWAS Tanjung Ngolopopo, dan POKMASWAS Sugiaraja Watulu.



8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup LPSPL Sorong dengan IKM tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup LPSPL Sorong (%), sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar Rp. 0 atau 0% dari pagu anggaran Rp. 39.480.000 yang dapat dilihat pada tabel 3.52. Realisasi anggaran yang masih nihil dikarenakan kegiatan masih dalam tahap perencanaan, sehingga pada periode selanjutnya agar dapat dilakukan percepatan pada kegiatan ini.

Tabel 3.52 Realisasi Anggaran IKM 21 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LPSPL Sorong (%)

No.	IK	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LPSPL Sorong (%)	39.480.000	0	39.480.000	0%
a.	Pendampingan dan Pembinaan KOMPAK	39.480.000	0	39.480.000	0%

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2024

3.11.11 IKM 22 Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup LPSP Sorong (Nilai)

Audit kearsipan internal adalah audit kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan system kearsipan internal
 - Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
 - Sumberdaya kearsipan yang meliputi
2. Pengawasan pengelolaan arsip aktif

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.
3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan

Teknik menghitung capaian IK ini yaitu sebagai berikut:

1. Nilai pengawasan kearsipan internal LPSPSPL Sorong akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi.
2. Nilai pengawasan kearsipan internal LPSPSPL Sorong merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:

- a. Aspek pengelolaan arsip dinamis yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:

- Penciptaan arsip
- Penggunaan arsip
- Pemeliharaan arsip
- Penyusutan arsip

Dengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

- b. Aspek sumberdaya kearsipan yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:

- Sumberdaya Manusia Kearsipan
- Sarana dan Prasarana Kearsipan

Dengan bobot masing-masing sub aspek 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

3. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

Tabel 3.53 Kategori Hasil Pengawasan Kearsipan

Kategori		Interval Skor
AA	Sangat Memuaskan	> 90 – 100
A	Memuaskan	> 80 – 90
BB	Sangat Baik	> 70 – 80



Kategori		Interval Skor
B	Baik	> 60 – 70
CC	Cukup	> 50 – 60
C	Kurang	> 30 – 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

Tabel 3.54 Capaian IKM 22 Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

SK.11	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup LPSPL Sorong									
IKU.22	Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup LPSPL Sorong (Nilai)									
Realisasi 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra 2020-2024	
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi thd PK	Target s.d 2024	% Capaian thd Renstra 2024
-	-	-	-	-	-	-	65			

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2024

1. Capaian IKM Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup LPSPL Sorong (Nilai) Triwulan II Tahun 2024

Periode pencapaian target dan periode pelaporan capaian IKM tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup LPSPL Sorong (%) adalah tahunan dengan target 80%. Pada triwulan II belum diisi capaiannya pada aplikasi kinerjajaku dan belum dapat dihitung persentase capaiannya karena masih proses pencapaian. Capaian fisik pada triwulan II yaitu 90% atau tahap pelaksanaan dengan perhitungan fisik mengacu pada e monev Bappenas.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dan Triwulan II Tahun 2024

Sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup LPSPL Sorong dengan IKM nilai pengawasan internal kearsipan lingkup LPSPL Sorong merupakan Sasaran Kegiatan, Indikator, dan Target baru. sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.



3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang ada pada tahun 2024, sehingga belum tercantum dalam dokumen rencana strategis (Renstra) 2020-2024 dan tidak dapat dibandingkan.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi sumberdaya manusia. Efisiensi sumberdaya disebabkan LPSPL Sorong memiliki pegawai dengan jabatan fungsional arsiparis sehingga tidak membutuhkan banyak pegawai dalam mencapai target kinerja ini.

5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

LPSPL Sorong melakukan telaah terhadap lembar kerja evaluasi (LKE) untuk penilaian indikator kinerja ini serta memenuhi hal-hal yang digunakan untuk menjawab lembar kerja evaluasi tersebut.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Pada triwulan I tahun 2024 belum terdapat kendala dalam mencapai target indikator kinerja ini.

c. Solusi

Belum terdapat solusi yang dilakukan karena tidak ada kendala pencapaian indikator ini.

6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKM 22

LPSPL Sorong dalam mendukung indikator kinerja ini telah melakukan beberapa kegiatan pendukung diantaranya revidi pengumpulan bahan dan pengisian instrumen pengawasan internal kearsipan tahun 2024, diklat teknis pengelolaan arsip dinamis angkatan VI, penataan arsip tahun 2023 dan 2024 untuk data dukung penilaian pengawasan kearsipan, finalisasi revidi pengumpulan bahan dan pengisian instrumen pengawasan internal kearsipan tahun 2024. Hasil dari beberapa kegiatan tersebut LPSPL Sorong memperoleh nilai 94,28 dengan kategori sangat memuaskan, hasil ini merupakan hasil sementara yang



diperoleh dari revidu tingkat internal DJPKRL. Selain itu, tenaga arsiparis LPSPS Sorong juga mengikuti bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas, diantaranya bimbingan teknis ahli media arsip dan bimbingan teknis penggunaan aplikasi JIKN.



Gambar 3.48 Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Kearsipan.

7. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Pada triwulan III tahun 2024 akan melaksanakan penataan arsip aktif di unit pengolah dan pemberkasan arsip aktif pada aplikasi portal.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup LPSPS Sorong dengan nilai pengawasan internal kearsipan lingkup LPSPS Sorong (Nilai), sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar Rp. 227.102.211 atau 88,21% dari pagu anggaran Rp. 257.464.000 yang dapat dilihat pada tabel 3.55.

Tabel 3.55 Realisasi Anggaran IKM 22 Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup LPSPS Sorong (Nilai)

No.	IK	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
	Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup LPSPS Sorong (Nilai)	257.464.000	227.102.211	30.361.789	88,21%
a.	Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan	257.464.000	227.102.211	30.361.789	88,21%

Sumber Data: LPSPS Sorong, per 30 Juni 2024



3.12 Akuntabilitas Anggaran

Dalam rangka mendukung kinerja LPSPL Sorong pada tahun anggaran 2024, anggaran yang diberikan Rp. 13.333.073.000 yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp. 11.993.073.000 dan bersumber dari PNPB sebesar Rp. 1.340.000.000, sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kinerja tanggal 25 Januari 2024. Hal ini juga sesuai dengan DIPA Petikan pagu definitif (pagu awal) tahun 2024 dengan Nomor: SP DIPA-032.07.2.477440/2024 tanggal 24 November 2023. Anggaran tersebut mendukung 3 (tiga) program yaitu program kualitas lingkungan hidup sebesar Rp. 3.500.000.000, program pengelolaan perikanan dan kelautan sebesar Rp. 1.150.000.000, dan program dukungan manajemen sebesar Rp. 8.683.073.000. Jika dijabarkan 3 program tersebut menjadi 5 kegiatan yaitu kegiatan perencanaan ruang laut sebesar Rp. 1.100.000.000, kegiatan perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut sebesar Rp. 2.700.000.000, kegiatan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau - pulau kecil sebesar Rp. 800.000.000, kegiatan penataan dan pemanfaatan jasa kelautan sebesar Rp. 50.000.000, dan kegiatan dukungan manajemen internal lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp. 8.683.073.000.

Namun anggaran tersebut tidak bisa dicairkan secara keseluruhan, hal ini dijabarkan pada halaman IV A DIPA Petikan terkait blokir. Jumlah anggaran yang tidak dapat dicairkan yaitu Rp. 631.186.000 yang terdiri dari belanja barang (52) sebesar Rp. 331.186.000 dan belanja modal (53) sebesar Rp. 300.000.000. Pada revisi ke 6 terdapat buka blokir pada beberapa anggaran yang sebelumnya terkena blokir, yaitu belanja barang (52) sebesar Rp. 300.000.000 dan belanja modal (53) sebesar Rp. 300.000.000 sudah dilakukan buka blokir atau dapat dicairkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Sehingga pada halaman IV A DIPA Petikan sisa blokir hanya pada belanja barang (52) sebesar Rp. 31.186.000 yang mendukung kegiatan dukungan manajemen internal lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut.

Realisasi anggaran pada triwulan II tahun 2024 yang berdasarkan aplikasi OMSPAN yaitu Rp. 6.302.818.855 atau 47,27% dari anggaran Rp. 13.333.073.000.



3.13 Tindaklanjuti Atas Rekomendasi Triwulan I Tahun 2024

LPSP Sorong pada triwulan I tahun 2023 memiliki 2 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti diantaranya 1) Melakukan revisi halaman III DIPA periode triwulan II tahun 2024 dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan halaman III yang ditetapkan, dan 2) Melakukan upload sertifikat pegawai pada aplikasi atau laman MyASN.

Rekomendasi pada triwulan I tahun 2024 sama-sama berkaitan dengan revisi halaman III DIPA, pada triwulan II tahun 2024 LPSP Sorong telah melakukan revisi halaman III DIPA hal ini dapat dilihat 3.56 dan 3.57.

Tabel 3.56 Revisi Halaman III DIPA Triwulan II Tahun 2024

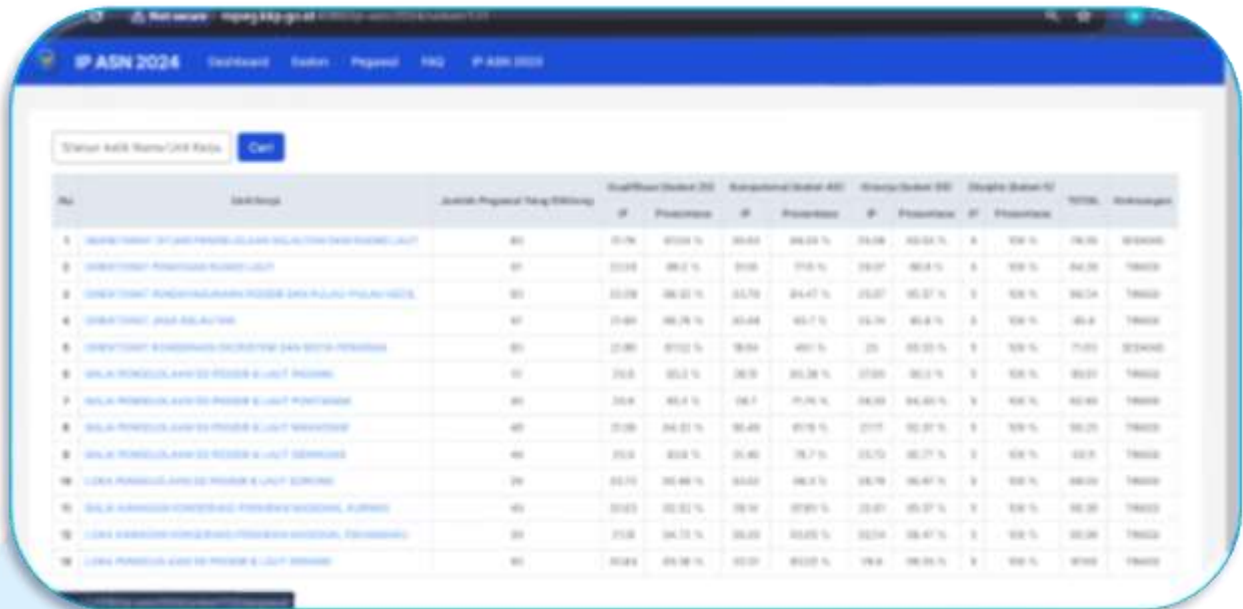
KRO	JEN BEL	PAGU	JUMLAH	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN
PBW	52	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	192.000	0
PEC	52	70.000.000	70.000.000	0	0	0	0	4.284.643	24.620.000
QEH	52	430.000.000	430.000.000	0	0	30.237.012	0	0	353.576.688
REA	52	300.000.000	300.000.000	0	0	0	0	0	0
REB	52	1.450.000.000	1.450.000.000	0	64.025.302	297.837.721	159.127.421	124.543.909	195.916.976
REB	53	300.000.000	300.000.000	0	0	0	0	0	0
UBA	52	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0
QDD	52	800.000.000	800.000.000	327.250	7.719.774	10.168.812	4.079.999	279.894.950	49.280.049
PBW	52	50.000.000	50.000.000	0	0	0	5.871.000	0	44.129.000
PBT	52	970.000.000	970.000.000	20.286.000	36.985.032	219.482.140	25.043.198	91.298.332	123.914.999
RAL	53	130.000.000	130.000.000	0	0	0	0	0	63.000.000
EBA	51	4.588.366.000	4.588.366.000	134.731.261	313.560.406	609.641.409	332.227.463	328.870.413	611.000.000
EBA	52	3.267.017.000	3.267.017.000	31.889.785	278.253.309	277.092.459	314.007.745	221.768.097	429.030.798
EBB	53	32.000.000	32.000.000	0	0	0	31.581.509	0	0
EBC	52	575.176.000	575.176.000	0	850.000	0	0	343.007.541	0

Tabel 3.57 Deviasi Halaman III DIPA Triwulan II Tahun 2024

Deviasi			Deviasi Tertimbang			Deviasi Seluruh Jenis Belanja	Total Deviasi DIPA	Nilai IKPA
51	52	53	51	52	53			
$k = (d-a)/a$	$l = (e-b)/b$	$m = (f-c)/c$	$n = k \times g$	$o = l \times h$	$p = m \times i$	$q = n + o + p$	r	s
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2,73	36,00	0,00	0,94	22,36	0	23,30	11,65	88,35
-	-	100,00	-	-	3,47	3,47	8,92	91,08
0,07	9,81	0,00	0,03	6,09	0	6,12	8,22	91,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	6,58	93,42
0,56	14,58	100	0,19	9,06	3,47	12,72	7,60	92,40

Tindak lanjut terhadap rekomendasi kedua yang berkaitan dengan indeks profesionalitas ASN lingkup LPSP Sorong masih rendah karena minimalnya upload sertifikat pegawai pada aplikasi atau laman MyASN. Pada triwulan II telah dilakukan himbauan kepada seluruh pegawai untuk melakukan upload sertifikat yang telah dimiliki ke laman MyASN masing-masing pegawai. Hal ini terlihat pada capaian IP ASN triwulan II atau semester I LPSP Sorong yang melebihi dari target capaian pada semester I.





No	Indikator Kinerja	Jumlah Pegawai Tetap (Jumlah)	Kualifikasi (Skor 20)		Kualifikasi (Skor 40)		Kualifikasi (Skor 60)		Kualifikasi (Skor 80)		Nilai	Keterangan
			Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase		
1	Nilai PNPB LPSP Sorong (Rp.000)	80	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%
2	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja LPSP Sorong (Orang)	80	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%
3	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSP Sorong (Dokumen)	80	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%
4	Daerah yang difasilitasi	80	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%

Gambar 3.49 Indeks Profesionalitas ASN LPSP Sorong Triwulan II.

3.14 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya

Membandingkan capaian kinerja LPSP Sorong dengan capaian kinerja Unit Kerja lain bertujuan untuk melihat apakah capaian LPSP Sorong sudah maksimal atau dapat ditingkatkan lagi dengan mengacu dari capaian unit kerja lainnya.

Tabel 3.58 Membandingkan capaian kinerja LPSP Sorong dengan Unit Pelaksana Teknis lain pada triwulan II tahun 2024.

No	Indikator Kinerja	LPSP Sorong TW II			LPSP Sorong TW II		
		Target	Capaian	Kinerjaku	Target	Capaian	Kinerjaku
1	Nilai PNPB LPSP Sorong (Rp.000)						
2	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja LPSP Sorong (Orang)						
3	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSP Sorong (Dokumen)						
4	Daerah yang difasilitasi						



No	Indikator Kinerja	LPSPL Sorong TW II			LPSPL Sorong TW II		
		Target	Capaian	Kinerjaku	Target	Capaian	Kinerjaku
	Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Daerah)						
5	Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kesepakatan)						
6	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kelompok)	1	1	100%	1	2	120%
7	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja LPSPL Sorong yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)						
8	Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)	2	2	100%	Target Tahunan		
9	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)						
10	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang diidentifikasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)						



No	Indikator Kinerja	LPSPL Sorong TW II			LPSPL Serang TW II		
		Target	Capaian	Kinerjaku	Target	Capaian	Kinerjaku
11	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kawasan)						
12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	83	97,97	118,04%	83	95,73	115,34%
13	Nilai Kinerja Anggaran lingkup LPSPL Sorong (Nilai)						
14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di LPSPL Sorong (Nilai)						
15	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)	83	89,82	108,22%	83	88,15	106,20%
16	Nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong (Nilai)						
17	Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)	2	2	100%	2	2	100%
18	Persentase Unit Kerja lingkup LPSPL Sorong yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94	133,33	120%	94	133,33	120%
19	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup LPSPL Sorong yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80	100	120%	80	100	120%
20	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup LPSPL Sorong (%)						
21	Tingkat Efektivitas						



No	Indikator Kinerja	LPSP Sorong TW II			LPSP Serang TW II		
		Target	Capaian	Kinerjaku	Target	Capaian	Kinerjaku
	Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LPSP Sorong (%)						
22	Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup LPSP Sorong (Nilai)						

Keterangan:

 : Capaian lebih rendah
 : Capaian lebih tinggi

Dari tabel diatas bahwa terdapat beberapa perbedaan target dan capaian antara LPSP Sorong dengan LPSP Serang diantaranya:

- Pada indikator jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja UPT. LPSP Sorong target capaiannya triwulanan sedangkan LPSP Serang target capaiannya tahunan sehingga belum dapat dibandingkan.
- LPSP Sorong capaiannya lebih rendah daripada capaian LPSP Serang pada indikator kinerja bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LPSP Sorong (Kelompok).
- LPSP Sorong capaiannya lebih tingi daripada LPSP Serang pada 2 indikator kinerja yaitu indikator kinerja nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup LPSP Sorong (Nilai) dan indikator kinerja indeks profesionalitas ASN lingkup LPSP Sorong (Indeks).
- LPSP Sorong dan LPSP Serang capaiannya sama pada 3 indikator kinerja yaitu indikator kinerja laporan SPIP yang disusun lingkup LPSP Sorong (Dokumen), indikator kinerja persentase unit kerja lingkup lpspl sorong yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%), dan indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup lpspl sorong yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%).



BAB IV PENUTUP

2.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) LPSPL Sorong pada Triwulan II Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan dalam mencapai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Mandatory (IKM) sebagai berikut:

1. LPSPL Sorong mempunyai 4 indikator kinerja yang capaiannya melebihi target kinerja diantaranya:
 - a. IKM 12 nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai) tercapai 97,97 dari target 83.
 - b. IKM 15 indeks profesionalitas ASN lingkup LPSPL Sorong (Indeks) tercapai 89,82 dari target 83.
 - c. IKM 18 persentase unit kerja lingkup LPSPL Sorong yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar tercapai 133,33% dari target 94%.
 - d. IKM 19 persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup LPSPL Sorong yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan tercapai 100% dari target 80%.
2. LPSPL Sorong mempunyai 3 indikator kinerja yang capaiannya sama dengan target kinerja diantaranya:
 - a. IKU 6 bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kelompok) tercapai 1 kelompok dari target 1 kelompok.
 - b. IKU 8 jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis) tercapai 2 jenis dari target 2 jenis.
 - c. IKM 17 laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong tercapai 1 dokumen dari target 1 dokumen.
3. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Mandatory LPSPL Sorong Triwulan II Tahun 2024 adalah **104,73** (kategori Hijau=Baik).



2.2 Rekomendasi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti terkait kinerja triwulan II tahun 2024, yaitu:

1. Pada triwulan II tahun 2024 nilai deviasi halaman III DIPA masih belum maksimal atau masih terdapat deviasi, untuk meningkatkan nilai tersebut LPSP Sorong direkomendasikan untuk revisi halaman III DIPA periode triwulan III tahun 2024 dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan halaman III yang ditetapkan.
2. Pada triwulan II terdapat revisi buka blokir, sehingga kegiatan yang bersumber pada anggaran yang terblokir sebelumnya agar segera dilakukan pada triwulan III sebagai percepatan pelaksanaan kegiatan.





LAMPIRAN



Lampiran I. Perjanjian Kinerja LPSPL Sorong TA 2024



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL sespridirenprl@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (LPSPL)
SORONG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rosmini**

Jabatan : Kepala Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Loka Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Sorong


Rosmini



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (LPSPL)
SORONG**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya Nilai PNBP LPSPL Sorong	1.	Nilai PNBP LPSPL Sorong (Rp.000)	1.100.000
2.	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja LPSPL Sorong	2.	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja LPSPL Sorong (Orang)	320
3.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	3.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)	3
4.	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	4.	Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Daerah)	1
5.	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	5.	Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kesepakatan)	1
6.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam mendukung Konservasi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	6.	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kelompok)	3
		7.	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja LPSPL Sorong yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)	1
7.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	8.	Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penysadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)	4



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
8.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	9.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)	3
9.	Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	10.	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang diidentifikasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)	1
10.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran	11.	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kawasan)	4
11.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup LPSPL Sorong	12.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	93,76
		13.	Nilai Kinerja Anggaran lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	86
		14.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di LPSPL Sorong (Nilai)	75
		15.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)	88
		16.	Nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	81
		17.	Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)	4
		18.	Persentase Unit Kerja lingkup LPSPL Sorong yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
		19.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup LPSPL Sorong yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		20.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup LPSPL Sorong (%)	100
		21.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LPSPL Sorong (%)	80



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		22.	Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	65

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	1.100.000.000
2.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	2.700.000.000
3.	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	800.000.000
4.	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	50.000.000
5.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	8.683.073.000
Total Anggaran Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong Tahun 2024		13.333.073.000

Jakarta, 25 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Loka Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Sorong



Rosmini



Lampiran II. Sertifikat ISO 9001:2015



Lampiran III. Piagam Penghargaan Nilai Transaksi KKP Terbesar



Lampiran IV. Piagam Penghargaan Nilai Capaian Kinerja Organisasi Triwulan I

